

RENSTRA PERUBAHAN



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan



2018 - 2023
DINAS KESEHATAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN	
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN SULSEL	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD....	8
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	19
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	50
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD.....	139
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD.....	143
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	147
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA	152
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	156
3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	176
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD.....	177
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	178
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	180
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN.....	181
BAB VIII. PENUTUP	182
<hr/>	
Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023	i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Rencana Strategis ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Kesehatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan Kesehatan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerja optimal dan sungguh-sungguh serta seluruh pihak yang turut membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Demikian Renstra ini disusun dan diharapkan dapat memperoleh masukan, saran dan kritik membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan 5 (lima) tahun mendatang dengan harapan dapat terwujud “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”.

Makassar,

2021

The seal of the Health Department of South Sulawesi Province is circular, featuring a central emblem with a caduceus (a staff with two snakes) and a sun. The text around the emblem reads "KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA" and "DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN".
**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

dr. H. MUHAMMAD ICHSAN MUSTARI, MHM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660217 199803 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan perlunya disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kementerian Kesehatan telah menetapkan RPJMN dan RENSTRA Tahun 2020-2024 yang merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan bidang kesehatan di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Keenam pengarusutamaan tersebut adalah 1) Kesetaraan Gender 2) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 3) Pembangunan Berkelanjutan 4) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 5) Modal Sosial Budaya 6) Transformasi Digital

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;

- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Sehubungan dengan adanya perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018–2023, yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down dan bottom-up.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun, menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan penyusunan Rencana Strategis Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

16. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
20. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah, Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 – 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai penjabaran terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dan sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan strategis.

2. Tujuan

Rencana Strategis ini memiliki tujuan antara lain :

- 2.1. Sebagai pedoman perencanaan bagi unit kerja lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama lima tahun ke depan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran
- 2.2. Sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT Dinas Kesehatan
- 2.3. Sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan bagi unit kerja lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2.4. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULSEL

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

21. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kebijakan yang mengatur tentang Perangkat Daerah, Kedudukan serta Tugas Pokok dan Fungsinya adalah Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

➤ Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sumber daya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- Susunan Organisasi
 - Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, meliputi :
 - 1. Subbagian Program
 - 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - 3. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, meliputi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, meliputi:
 - 1. Seksi Kefarmasian
 - 2. Seksi Alat Kesehatan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Jabatan Fungsional.

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
1. UPT Transfusi Darah
 2. UPT Pelatihan Kesehatan
 3. UPT RS Khusus Daerah Gigi dan Mulut
 4. UPT RS Khusus Daerah Provinsi Sulsel
 5. UPT RSKIA Pertiwi
 6. UPT RSKIA Fatimah
 7. UPT RS Sayang Rakyat
 8. UPK (Unit Pelayanan Kesehatan) Kulit, Kelamin dan Kosmetika
 9. UPK (Unit Pelayanan Kesehatan) Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

UPT RSKD DADI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Direktur UPT RSKD Dadi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi promotif, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi dan menyelenggarakan upaya rujukan di sektor kesehatan terutama di bidang kesehatan jiwa dan pelayanan stroke serta kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktur UPT RSKD Dadi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi, medik dan keperawatan;
- b. Penyelenggaraan urusan administrasi, medik dan keperawatan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang administrasi, medik dan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

UPT RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Pertiwi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan Ibu dan Anak yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak PERTIWI mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana.
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana, dan
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Direktur UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan Ibu dan Anak yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktur RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana;
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dibidang pelayanan dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sebagai tugas dan fungsinya.

UPT RSUD SAYANG RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

Direktur UPT RSUD Sayang Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan dibidang kesehatan utamanya lingkup Rumah Sakit Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyusun rencana kegiatan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, merumuskan kebijakan teknis operasional kegiatan di bidang pelayanan, penunjang pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan, serta ketatausahaan, menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi, medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kepada masyarakat utamanya di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di bidang kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

UPT RSKD GIGI DAN MULUT PROVINSI SULAWESI SELATAN

Direktur UPT RSKD Gigi dan Mulut mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur UPT RSKD Gigi dan Mulut mempunyai fungsi :

- a. Memimpin penyusunan seluruh kebijakan rumah sakit agar dapat mewujudkan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang berpusat pada pasien dan dilaksanakan secara berkolaborasi
- b. Memimpin upaya terpenuhinya sumber daya di rumah sakit sesuai dengan persyaratan undang-undang dan kebutuhan masyarakat
- c. Memimpin penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai standar akreditasi rumah sakit
- d. Memimpin pelaksanaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik (*good governance* dan *clinical governance*)
- e. Memimpin implementasi sistem pelayanan di rumah sakit yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan JKN
- f. Memimpin pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan pencegahan terhadap potensi *fraud* dan gratifikasi di rumah sakit
- g. Membangun budaya organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai rumah sakit, berbasis bukti dan praktek kolaborasi
- h. Memimpin pelaksanaan pengelolaan rumah sakit berdasarkan standar Badan Layanan Umum Daerah
- i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian dan evaluasi kegiatan seksi dan sub bagian tata usaha
- j. Menandatangani surat-surat berharga, dokumen, naskah penting lainnya untuk kepentingan RSKGM dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku
- k. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/institusi/lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
- l. Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas kepada seluruh jajarannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
- m. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

UPT TRANSFUSI DARAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala UPT Transfusi Darah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pelayanan darah, antara lain menjaga, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala UPT TRANSFUSI DARAH mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan teknis pelayanan darah, antara lain menjaga ketersediaan, meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan darah;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengelolaan pelayanan darah;
- c. Pelaksanaan administrasi UPT dan peningkatan SDM; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPT PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala UPT Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, pelayanan kesehatan kerja masyarakat, pelayanan kesehatan olahraga masyarakat serta mengelola akademi keperawatan anging mammiri

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala UPT Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelayanan teknis operasional pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, pelayanan kesehatan kerja masyarakat, pelayanan kesehatan olahraga masyarakat, serta pengelolaan akademi keperawatan anging mammiri
- b. pelaksanaan pelayanan teknis operasional, pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, pelayanan kesehatan kerja masyarakat, pelayanan kesehatan olahraga masyarakat, serta pengelolaan akademi keperawatan anging mammiri
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelayanan teknis operasional pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dan masyarakat; pelayanan kesehatan kerja masyarakat, pelayanan kesehatan olahraga masyarakat serta pengelolaan akademi keperawatan anging mammiri
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

UPK BALAI PELAYANAN KESEHATAN

Kepala UPK Balai Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala UPK Balai Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

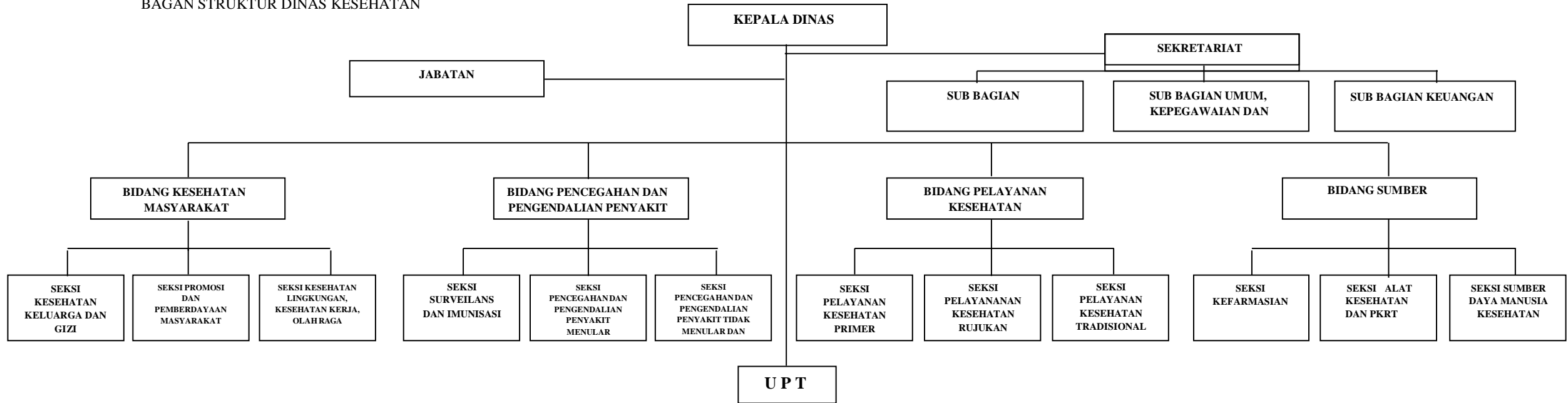
- a. perencanaan pelayanan kesehatan pada Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- c. pelaksanaan administrasi Unit Pelayanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya

UPK BALAI PELAYANAN KESEHATAN KULIT, KELAMIN DAN KOSMETIK

Kepala UPK mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada Balai Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR : 71 TAHUN 2016
 TANGGAL :
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAGAN STRUKTUR DINAS KESEHATAN



22 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan diuraikan di bawah ini menurut jenis kepegawaiannya.

a. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.535 orang pada tahun 2020. Adapun jumlah pegawai menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Dinas Kesehatan	0	3	23	41	49	54	92	262
2	UPT Transfusi Darah	0	2	13	8	10	2	4	39
3	UPT Pelatihan Kesehatan	0	6	11	11	10	12	17	67
4	UPT RSKD Gigi dan Mulut	0	1	15	17	24	7	21	85
5	UPK Balai Pelayanan Kesehatan Pemprov Sulsel	3	1	12	15	5	4	11	51
6	UPK Balai Kesehatan Kulkel dan Kosmetik	0	0	7	4	4	3	10	28
7	UPT RSKD Dadi	14	48	56	51	83	69	111	432
8	UPT RSKDIA Pertiwi	0	40	42	34	33	18	24	191
9	UPT RSKDIA Siti Fatimah	0	2	21	29	22	26	33	133
10	UPT RS Sayang Rakyat	1	11	81	66	40	16	34	249
TOTAL		18	114	281	276	280	211	357	1537

Jumlah pegawai menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa kelompok umur terendah adalah pegawai usia 20-25 tahun sebesar 1%, sedangkan kelompok umur tertinggi adalah pegawai usia ≥ 50 tahun sebesar 23%. Adapun kelompok umur 26 tahun sampai dengan 50 tahun berkisar antara 7% hingga 18%. Hal ini harus diantisipasi mengingat masih banyak pegawai usia ≥ 50 tahun yang pada akhirnya akan memasuki usia pensiun, sehingga perlu untuk melakukan kaderisasi dan penambahan pegawai yang berusia muda untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas sumber daya aparatur.

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menurut golongan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Golongan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Dinas Kesehatan	3	31	147	81	262
2	UPT Transfusi Darah	0	18	20	1	39
3	UPT Pelatihan Kesehatan	2	11	39	15	67
4	UPT RSKD Gigi dan Mulut	1	5	45	34	85
5	UPK Balai Pelayanan Kesehatan Pemprov Sulsel	0	8	25	18	51
6	UPK Balai Kesehatan Kulkel dan Kosmetik	0	2	14	12	28
7	UPT RSKD Dadi	1	83	229	119	432
8	UPT RSKDIA Pertiwi	6	63	103	19	191
9	UPT RSKDIA Fatimah	5	34	65	29	133
10	UPT RS Sayang Rakyat	0	48	161	40	249
TOTAL		18	303	848	368	1537

Jumlah pegawai menurut golongan jabatan memperlihatkan bahwa jumlah paling rendah terdapat pada pegawai golongan I sebesar 1% dan jumlah terbanyak terdapat pada pegawai golongan III sebesar 55%. Sementara pegawai golongan II dan IV masing-masing sebesar 20% dan 24%. Perlu dipertimbangkan pengembangan sumber daya aparatur dari sisi peningkatan golongan jabatan pegawai, khususnya pegawai golongan I dan golongan II, sehingga dengan peningkatan tersebut diharapkan kapasitas pegawai juga akan meningkat. Jumlah pegawai golongan III yang cukup besar juga perlu diarahkan untuk meningkatkan golongannya.

c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Dinas Kesehatan	1	5	37	17	117	82	3	262
2	UPT Transfusi Darah	0	0	10	13	12	4	0	39
3	UPT Pelatihan Kesehatan	2	0	6	12	30	16	1	67
4	UPT RSKD Gigi dan Mulut	0	1	3	29	38	14	0	85
5	UPK Balai Pelayanan Kesehatan Pemprov Sulsel	0	0	1	19	25	6	0	51
6	UPK Balai Kesehatan Kulkel dan Kosmetik	0	0	3	8	13	4	0	28
7	UPT RSKD Dadi	0	1	12	179	192	47	1	432
8	UPT RSKDIA Pertiwi	5	1	32	83	50	19	1	191
9	UPT RSKDIA Fatimah	4	1	21	56	35	14	2	133
10	UPT RS Sayang Rakyat	0	0	16	112	90	31	0	249
TOTAL		12	9	141	528	602	237	8	1537

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 adalah jumlah terbanyak sebesar 39%, kemudian jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma sebesar 34%, tingkat pendidikan S2 sebesar 15%, tingkat pendidikan S3 sebesar 1%. Sementara jumlah pegawai yang paling sedikit adalah jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SD dan SMP masing-masing sebesar 1%. Pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 9%. Dari sisi tingkat pendidikan sudah cukup bagus karena sudah banyak yang memiliki jenjang pendidikan S1, namun perlu ditingkatkan ke jenjang S2 ataupun S3 untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

d. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menurut peta jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Peta Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	22
3	Eselon IV	50
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	983
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	481
	Jumlah	1537

Jumlah pegawai menurut peta jabatan, terdapat sebesar 64% memiliki jabatan Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil), Fungsional Pelaksana sebesar 31%, sementara eselon III dan eselon IV masing-masing sebesar 1% dan 3%. Berdasarkan perkembangan regulasi yang baru tentang kebijakan jabatan fungsional kepegawaian, maka struktur pegawai di atas sudah sejalan dengan arah kebijakan tersebut dimana jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu cukup besar (64%).

e. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	10	12	22
3	Eselon IV	25	25	50
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	200	775	975
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	141	348	489
	Jumlah	376	1161	1537

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, terdapat sebanyak 76% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 24% pegawai berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan jabatan, pada Eselon III terdapat sebanyak 45% pejabat berjenis kelamin perempuan dan 55% berjenis kelamin laki-laki, pada Eselon IV terdapat sebanyak 50% pejabat berjenis kelamin perempuan dan 50% berjenis kelamin laki-laki. Adapun pada fungsional tertentu terdapat sebanyak 21% pegawai berjenis kelamin perempuan dan 75% berjenis kelamin laki-laki, sementara pada tingkat fungsional pelaksana (staf), terdapat sebanyak 29% pegawai berjenis kelamin perempuan dan 71% berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan kondisi ini, diharapkan ke depan dapat ditingkatkan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan untuk lebih menyeimbangkan struktur pegawai dan dalam rangka mendukung kebijakan yang responsif gender.

f. Jumlah Sarana dan Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Kantor Jl. Perintis Kemerdekaan	Hak Pakai	-	-	134.240 m2
2	Tanah Bangunan Kantor Jl. Gowa Raya Pettarani	Hak Pakai	-	-	185.540 m2
3	Tanah Bangunan Kantor Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 2	Hak Pakai	-	-	8.635 m2
4	Tanah Bangunan Kantor (Kota Palopo)	Hak Pakai	-	-	8.748 m2
5	Tanah Bangunan Kantor Jl. Veteran Utara (UPK Kulkel dan Kosmetik)	Hak Pakai	-	-	652 m2
6	Gedung Utama Dinkes Prov SulSel	Baik	-	-	2.984 m2
7	Gedung Darma Wanita	Baik	-	-	154 m2
8	Gedung P2PL (Gudang Perlengkapan)	Baik	-	-	258 m2
9	Gedung Koperasi	Baik	-	-	172 m2
10	Gedung Wisma/Kantor P2PL	Baik	-	-	500 m2
11	Gedung HV-V/Digunakan Oleh UPT Pusat (BKTMMakassar)	Baik	-	-	400 m2
12	Kantor Gudang Bajiminasa	-	Kurang Baik	-	350 m2
13	Digunakan Oleh Akper Anging Mamiri makassar	Baik	-	-	2.450 m2
14	Gudang Bencana	-	Kurang Baik	-	1.950 m2
15	Gedung Poli di Akper Anging Mamiri	Baik	-	-	200 m2

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
16	Gedung Peralatan P2PL (Kantor BKKM)	Baik	-	-	480 m2
17	Pengadaan Sarana Perkantoran berupa Belanja Modal Pengadaan Papan Bicara>Nama Instansi	Baik	-	-	-
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen (mutasi dr Biro Aset ke Poli)	Baik	-	-	-
19	Bangunan Gedung Kantor	Baik	-	-	-
20	Uptd Balai Pelayanan Kesehatan	Baik	-	-	-
21	UPK Kulkel dan Kosmetik	Baik	-	-	-
22	Modal pembuatan area parkir dinkes 2017	Baik	-	-	-
23	Pengaspalan jalan kompleks Gudang Vaksin	Baik	-	-	-
24	Pembangunan Papan Nama Instansi Dinas Kesehatan	Baik	-	-	-
25	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor UPTD BPKP2SS	Baik	-	-	-
26	Bangunan Kantor UPTD Wilayah I Palopo.	-	Kurang Baik	-	-
27	Bangunan Kantor Sub UPTD Luwu Selatan.	-	Kurang Baik	-	-
28	Bangunan Rumah Jabatan Kepala UPTD Wilayah I Palopo.	-	Kurang Baik	-	-
29	Bangunan Rumah Jabatan Kepala Sub UPTD Luwu Selatan.	-	Kurang Baik	-	-
30	Gudang Transito Out	-	Kurang Baik	-	976 m2
31	Gudang Cairan	-	Kurang Baik	-	275 m2
32	Gudang Transito In	-	Kurang Baik	-	87 m2
33	Gudang Ex Farmasi Digunakan Oleh Balai POM	-	Kurang Baik	-	393 m2
34	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Digunakan oleh balai POM Makassar (Kamar Cuci)	-	Kurang Baik	-	35 m2

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
35	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (digunakan Oleh Balai POM (Bahan Baku)	-	Kurang Baik	-	104 m2
36	Gedung Gudang Bencana (Depan Transfusi Darah Makassar)	-	Kurang Baik	-	70 m2
37	Gudang Ex Vaksin Sudah Terbakar 1997	-	Kurang Baik	-	160 m2
38	Gedung PERBEKLAN	Baik	-	-	420 m2
39	Gedung Gudang Bencana	Baik	-	-	210 m2
40	Gedung Gudang Pembekalan Peralatan	Baik	-	-	252 m2
41	Gedung Kantor DHS-2/Kantor Bantuan	Baik	-	-	72 m2
42	Gedung Masjid (Swadaya PNS Dinkes)	Baik	-	-	600 m2
43	Gedung Aula Krida Nirmala	Baik	-	-	481 m2
44	Gedung Pos Jaga	Baik	-	-	5 m2
45	Pagar dan Garasi Gudang Farmasi Banta-Bantaeng	Baik	-	-	-
46	Belanja modal pengadaan konstruksi perparkiraan	Baik	-	-	-
47	Pembangunan Tower Bang Air Tandon	Baik	-	-	-
48	Pagar samping gudang vaksin	Baik	-	-	-
49	Pintu besi masuk kantor 3 buah 2017	Baik	-	-	-
50	Pintu Gerbang Gudang Vaksin JL. GUBERNUR	Baik	-	-	-
51	Pintu Gerbang Kantor Dinas jl Gubernur	Baik	-	-	-
52	Rumah Negara Golongan II Tipe A digunakan Oleh BTKL Makassar	Baik	-	-	120 m2

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
53	Pemeliharaan tpt kerja (tercatat di RSKD)	Baik	-	-	-
54	Rumah Type 36 (3 Tiga Unit Di Banta-Bantaeng)	-	Kurang Baik	-	108 m2
55	Bangunan Perambu Lain-Lain	Baik	-	-	-
56	Bangunan Perambu Lain-Lain	Baik	-	-	-
57	Bangunan Perambu Lain-Lain (Rambu Lalu Lintas)	Baik	-	-	-
58	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
59	Gambar Presiden/Gubernur	-	-	-	1
60	Gambar Presiden/Gubernur	-	-	-	1
61	Lambang Garuda	-	-	-	1
62	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
63	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
64	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
65	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
66	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	4
67	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
68	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
69	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
70	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
71	Ilmu Pengetahuan umum	-	-	-	1
72	Tanaman Perkebunan Lain-lain	-	-	-	1
73	Benda-benda Bersejarah Lain-lain	-	-	-	1

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
	RSKD DADI				
	Bangunan Utama	Baik	-	-	1 Unit (15 Jenis Ruangan)
	Bangunan Penunjang	Baik	-	-	1 Unit (10 Jenis Bagian)
	Rawat Inap Jiwa/NAPZA	Baik	-	-	411 Tempat Tidur
	Rawat Inap Non Jiwa	Baik	-	-	115 Tempat Tidur
	Kendaraan Roda 4 (Mobil Ambulans, Mobil Jenazah, Mobil Operasional)	Baik	-	-	6 Unit
	Kendaraan Roda 2	Baik	-	-	3 Unit
	RS SAYANG RAKYAT		-	-	
	Peralatan dan Mesin	Baik	-	-	9 Jenis
	Bangunan Gedung	Baik	-	-	4 Jenis
	Jalan, Irigasi, Jaringan	Baik	-	-	2 Jenis
	Aset Tetap lainnya	Baik	-	-	2 Jenis
	Instalasi Rawat Jalan	Baik	-	-	12 Unit
	Instalasi Rawat Inap	Baik	-	-	5 Unit
	Rawat Khusus	Baik	-	-	2 Unit
	Pelayanan Penunjang Medik	Baik	-	-	9 Unit
	Kamar Jenazah	Baik	-	-	1 Unit

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
	RSKDIA SITI FATIMAH				
	Luas Bangunan	Baik	-	-	1.808 m2
	Instalasi Rawat Jalan	Baik	-	-	Ada
	Instalasi Rawat Inap Ibu	Baik	-	-	Ada
	Instalasi Rawat Inap Anak	Baik	-	-	Ada
	Ruang Pendukung	Baik	-	-	Ada
	Ruang Bersalin	Baik	-	-	Ada
	Instalasi Gawat Darurat	Baik	-	-	Ada
	Instalasi Laboratorium	Baik	-	-	Ada
	High Care Unit (HCU/RR)	Baik	-	-	Ada
	NICU/PICU	Baik	-	-	Ada
	ICU	Baik	-	-	Ada
	Ruang Operasi	Baik	-	-	Ada
	Instalasi Radiologi	Baik	-	-	Ada
	Instalasi Patologi Klinik	Baik	-	-	Ada
	Instalasi Farmasi	Baik	-	-	Ada
	Instalasi Gizi	Baik	-	-	Ada
	IPSRS	Baik	-	-	Ada
	Rekam Medis	Baik	-	-	Ada
	Tempat Tidur	Baik	-	-	68 Tempat Tidur

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
	RSKDIA PERTIWI				
	Luas Bangunan	Baik	-	-	5.742 m2
	Ruang Perawatan (Obgyn, Bayi, Anak)	Baik	-	-	3 Jenis
	Ruang Periksa (Poli Kandungan, Poli Gigi, Poli KB, Poli Anak, Poli Bedah)	Baik	-	-	5 Jenis
	Ruang Tindakan (Kamar Operasi, Ruang Bersalin, Ruang ICU, Ruang UGD)	Baik	-	-	4 Jenis
	RSKD GIGI DAN MULUT		-	-	
	Gedung dan Bangunan	Baik	-	-	1 Paket
	Peralatan dan Mesin	Baik	-	-	1 Paket
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Baik	-	-	1 Paket
	Aset Tetap Lainnya	Baik	-	-	1 Paket
	Pelayanan Medis		-	-	
	Instalasi Gawat Darurat	Baik	-	-	1 Paket
	Instalasi Rawat Jalan	Baik	-	-	1 Paket
	Intensive Care Unit (ICU)	Baik	-	-	1 Paket
	Pelayanan Penunjang Medik		-	-	
	Instalasi Farmasi	Baik	-	-	1 Paket
	Instalasi Laboratorium	Baik	-	-	1 Paket
	Instalasi Radiologi	Baik	-	-	1 Paket
	Instalasi Gizi	Baik	-	-	1 Paket
	Rekam Medik	Baik	-	-	1 Paket
	Pelayanan Non Medik (Instalasi Laundry, Instalasi Teknik dan pemeliharaan fasilitas dan utilitas bangunan, Sistem pengelolaan limbah)	Baik	-	-	3 Jenis

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
	UPT TRANSFUSI DARAH				
	Lahan	Baik	-	-	1.700 m2
	Gedung	Baik	-	-	885,15 m2
	Mobil Unit	Baik	-	-	2 Buah
	Mobil KIE	Baik	-	-	2 Buah
	Mobil Operasional	Baik	-	-	5 Buah
	Laboratorium		-	-	
	Screening Test	Baik	-	-	1 Unit NAT, 1 Unit ELISA
	Serologi	Baik	-	-	Gell Test dan Konvensional
	Trombopheresis	Baik	-	-	1 Unit Apheresis
	UNIT PELATIHAN KESEHATAN				
	Gedung Utama	Baik	-	-	36 Ruangan
	Gedung Aula dan Perpustakaan	Baik	-	-	1 Unit
	Gedung Wisma Utama	Baik	-	-	16 Kamar
	Gedung Wisma Tambahan	Baik	-	-	20 Kamar
	Gedung Laboratorium	Baik	-	-	3 Ruangan
	Gedung Kesehatan Olahraga	Baik	-	-	6 Ruangan
	Gedung Pelayanan Medis	Baik	-	-	8 Ruangan
	Instalasi Listrik, Genset, Sumber Air Bersih, IPAL	Baik	-	-	8 Paket
	Kendaraan Operasional (Mobil, Motor)	Baik	-	-	8 Unit
	Ambulans	Baik	-	-	2 Unit

Jumlah sarana dan prasarana sudah cukup memadai dan tersebar di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh UPT Dinas yaitu RSKD DADI, RS SAYANG RAKYAT, RSKDIA SITI FATIMAH, RSKDIA PERTIWI, RSKD GIGI DAN MULUT, UPT UNIT TRANSFUSI DARAH dan UPT PELATIHAN KESEHATAN.

Situasi sumber daya kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan berupa sarana dan tenaga kesehatan digambarkan melalui uraian di bawah ini.

Sarana Kesehatan

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

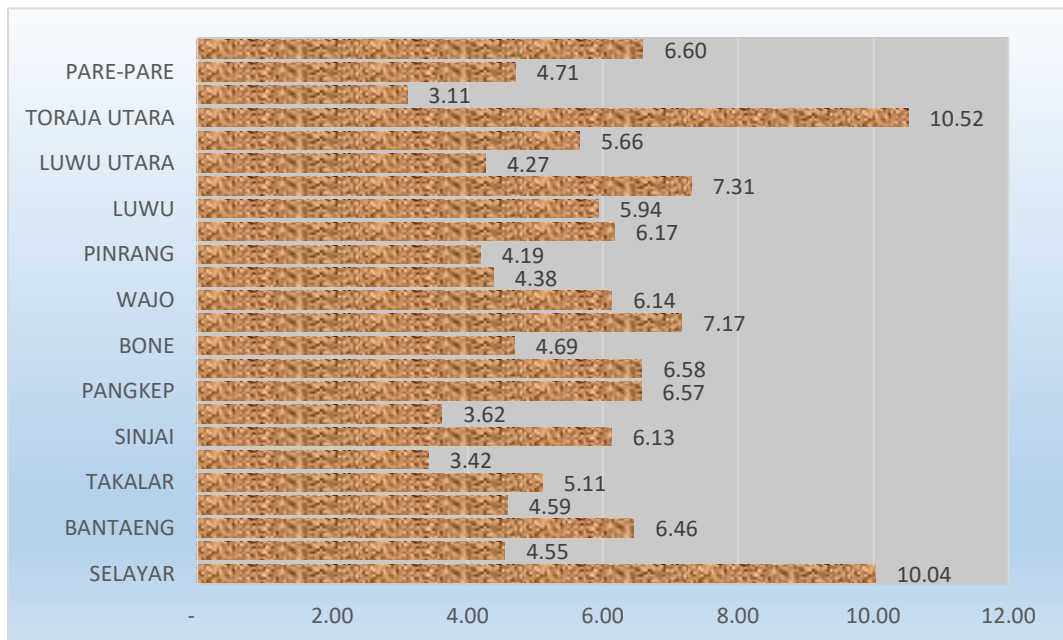
Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Secara umum, puskesmas harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) atau Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Hal ini disepakati oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan yang bersangkutan. Dalam memberikan pelayanan di masyarakat, puskesmas biasanya memiliki Sub unit Pelayanan seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Posyandu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) maupun Pos Bersalin Desa (Polindes) (Kemenkes RI, 2014b).

Prinsip penyelenggaraan puskesmas, tugas fungsi dan wewenang meliputi:

- ❖ Paradigma sehat, yaitu puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga kelompok, dan masyarakat.
- ❖ Pertanggungjawaban wilayah, yaitu puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- ❖ Kemandirian masyarakat, yaitu puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- ❖ Pemerataan, adalah puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- ❖ Teknologi tepat guna, yaitu puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- ❖ Keterpaduan dan kesinambungan, yaitu puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas.

Pada Tahun 2019 dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat beberapa Puskesmas Non Perawatan telah ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas Perawatan. Jumlah puskesmas meningkat menjadi 460 unit terdiri dari Puskesmas Perawatan sebanyak 289 unit dan Puskesmas Non Perawatan sebanyak 171 unit dengan 1.321 Puskesmas Pembantu.

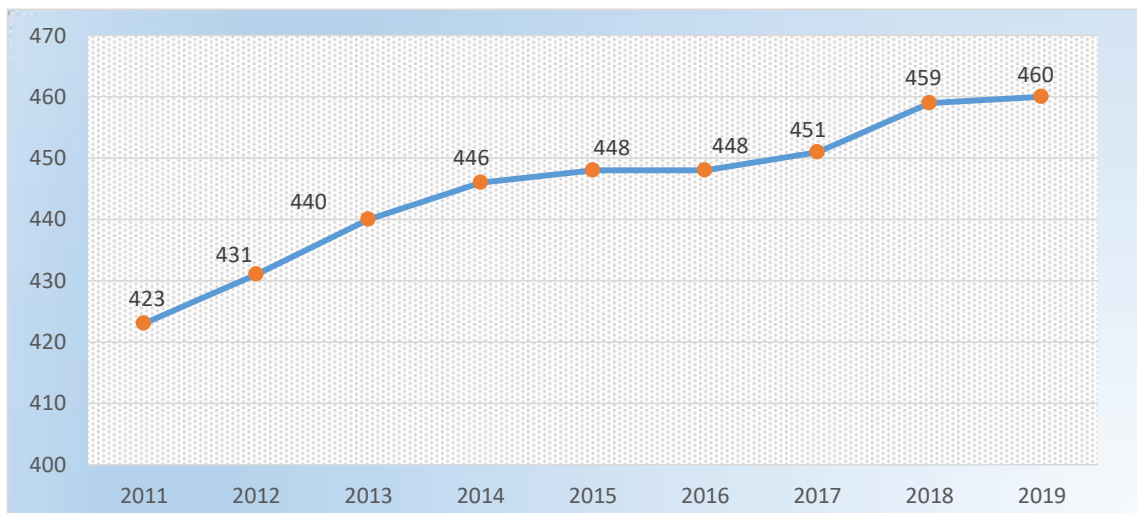
GRAFIK III.A.1
RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT KAB/ KOTA
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019



Sumber : Profil Kesehatan kabupaten/ Kota Tahun 2019

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Selayar merupakan kabupaten yang tertinggi rasio puskesmasnya per 100.000 penduduk. Artinya di Kabupaten Toraja Utara dan Selayar terdapat 10-11 unit puskesmas yang melayani setiap 100.000 penduduk. Dengan kata lain di Kabupaten Toraja Utara 1 unit puskesmas melayani rata-rata 9.506 jiwa, sedangkan di Kabupaten Selayar 1 unit puskesmas melayani rata-rata 9.962 jiwa. Sedangkan menurut Kementerian HAM bahwa di setiap daerah 1 puskesmas maksimal melayani 16.000 jiwa, sesuai dengan lampiran I Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang kriteria daerah kabupaten/ kota peduli Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM, 2016).

**GRAFIK III.A.2
PERKEMBANGAN JUMLAH PUSKESMAS DI SULAWESI SELATAN
SELAMA TAHUN 2011 – 2019**



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota 2019

B. RUMAH SAKIT

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

**TABEL III.B.1
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (UMUM & KHUSUS)
MENURUT KEPEMILIKAN/ PENGELOLA DI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2011-2019**

No	Pengelola / Kepemilikan	Tahun								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kementerian Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Pemerintah Prov/Kab/Kota	37	37	37	37	37	37	35*	38	39
3	TNI/POLRI	7	7	7	7	7	7	7	8	8
4	BUMN/Kementerian Lain	1	1	1	1	1	1	1	3	2
5	Swasta	39	39	48	48	48	48	57	55	59
Jumlah		86	86	86	95	87	87	102	106	110

Sumber : Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2011-2019

Tabel III.B.1 menunjukkan pada tahun 2011–2019, perkembangan jumlah Rumah Sakit (Umum dan Khusus) di Sulawesi Selatan cenderung relatif stabil. Data terinci pada lampiran Tabel 4.

Rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk juga dapat menggambarkan kemampuan Rumah Sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk tahun 2017, jumlah tempat tidur dan rasionya terhadap 100.000 penduduk tercatat sebanyak 7.533 tempat tidur dengan rasio sebesar 78 atau rata-rata setiap tempat tidur Rumah Sakit melayani 1.281 penduduk dalam setahun. Sedangkan untuk tahun 2018 jumlah tempat tidur dan rasionya terhadap 100.000 penduduk tercatat 12.966 tempat tidur dengan rasio sebesar 89,45 atau rata-rata setiap tempat tidur Rumah Sakit rata-rata melayani 1.118 penduduk dalam setahun.

C. SARANA PRODUKSI, DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam program obat dan perbekalan kesehatan adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yang dilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaannya di masyarakat. Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika.

Jumlah sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang dilaporkan oleh kabupaten/ kota untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL III.C.1
JUMLAH SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019

SARANA KESEHATAN	JUMLAH
Industri Farmasi	0
Industri Obat Tradisional	0
Usaha Mikro Obat Tradisional	34
Produksi Alat Kesehatan	17
Pedagang Besar Farmasi	38
Apotek	1414
Apotek PRB	23
Toko Obat	386
Toko Alkes	29

Sumber : Program Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan

D. SARANA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

Dalam mewujudkan masyarakat sehat diperlukan kesadaran setiap anggota masyarakat akan pentingnya perilaku sehat, berkeinginan, serta berdaya untuk hidup sehat. Masyarakat bersinergi membangun kondisi lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat. Langkah tersebut tercermin dalam pengembangan sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di desa dan kelurahan, seperti adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

UKBM yang ada di desa dan kelurahan menjadi ciri khas bahwa desa dan kelurahan tersebut telah menjadi desa kelurahan siaga aktif. Dinyatakan demikian karena penduduk di desa dan kelurahan siaga tersebut dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Upaya peningkatan peran dan fungsi posyandu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader.

Peran kader dalam penyelenggaraan posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

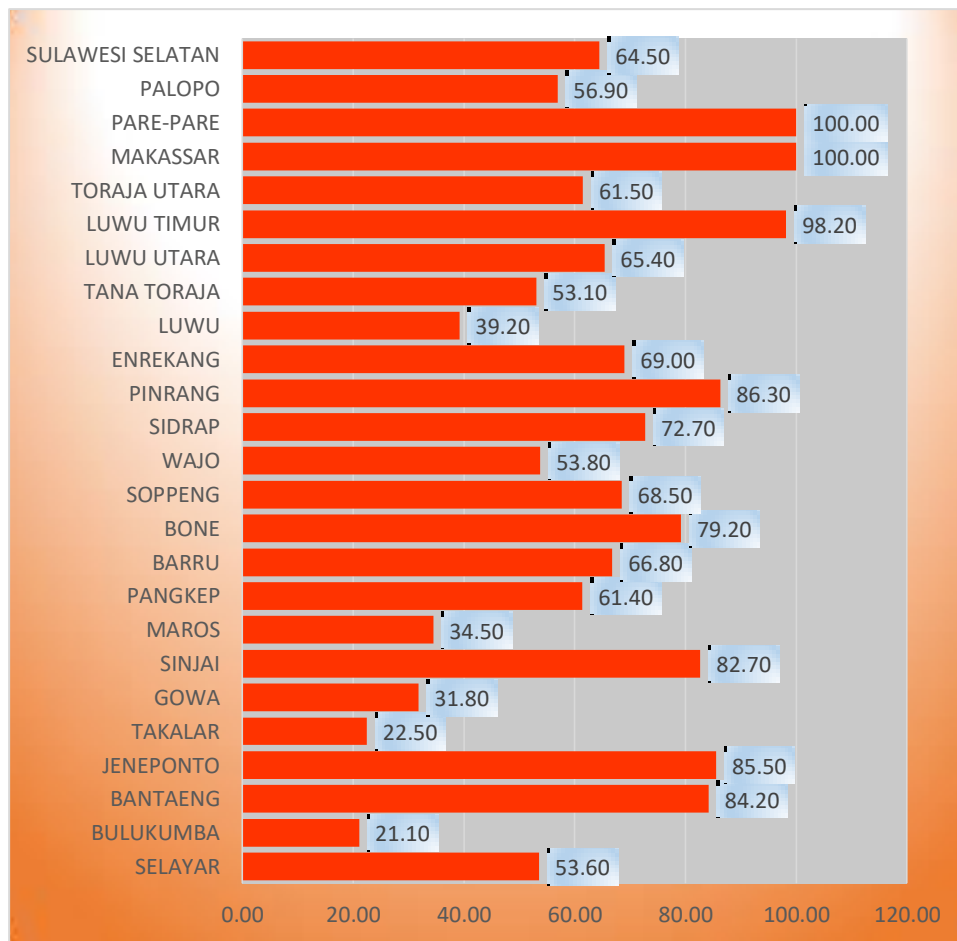
Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal di masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal lima program prioritas, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare. Untuk memantau perkembangannya, posyandu dikelompokkan ke dalam empat strata, yaitu Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

1. Posyandu Purnama dan Mandiri

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari BKKBN dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana.

Sebagai indikator peran aktif masyarakat melalui pengembangan UKBM digunakan persentase desa yang memiliki posyandu. Posyandu merupakan wahana kesehatan bersumberdaya masyarakat yang memberikan layanan lima kegiatan utama (KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan P2 Diare) dilakukan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat.

GRAFIK III.D.1
CAKUPAN POSYANDU AKTIF PER KABUPATEN/ KOTA
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019

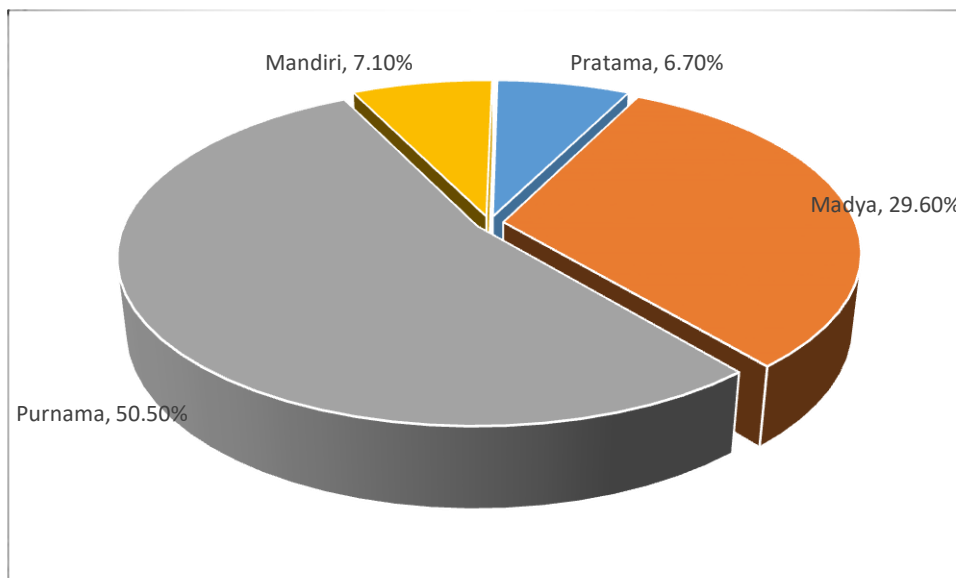


Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2019

Grafik III.D.1 menunjukkan pencapaian posyandu purnama dan mandiri (posyandu aktif) Tahun 2019 di Sulawesi Selatan sebesar 64,5%, yang tertinggi capaiannya yaitu Kota Makassar 100%, Parepare 100%, Kabupaten Luwu Timur 98,2%, dan Kabupaten Pinrang 86,3%. Sedangkan pencapaian posyandu terendah yaitu Kabupaten Takalar 22,5%, Bulukumba 21,1%, dan Gowa (31,8%), tidak jauh berbeda dengan cakupan tahun 2018.

Untuk Tahun 2019 jumlah posyandu sebanyak 9.984 unit: 6,7% berstatus Pratama; 29,6% berstatus Madya; 50,5% berstatus Purnama; 7,1% berstatus Mandiri. Posyandu yang aktif sebanyak 6.378 (63,9%) dengan rasio posyandu sebanyak 1,56 per 100 balita.

GRAFIK III. D. 2
PROPORSI POSYANDU MENURUT STRATA
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019



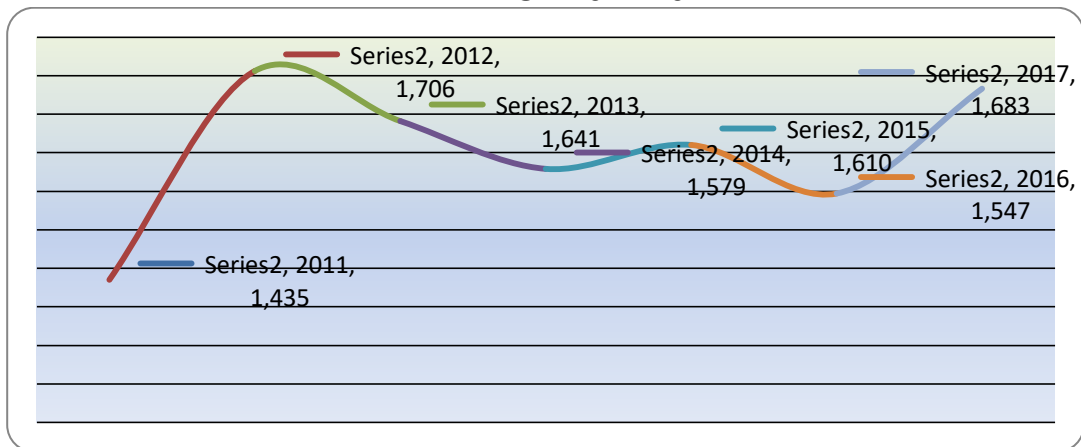
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Tahun 2019

2. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat dengan Poskesdes, adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dibentuk sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar setiap hari bagi masyarakat di desa serta sebagai sarana untuk mempertemukan upaya masyarakat dan dukungan Pemerintah. Pelayanan Poskesdes meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader kesehatan.

Kegiatan poskesdes, utamanya adalah pelayanan kesehatan dasar yaitu layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kesehatan anak dan pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, revisi juknis surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka kegiatan di poskesdes didukung dengan pencatatan dan pelaporan. Poskesdes merupakan pendorong dalam menumbuh kembangkan terbentuknya UKBM lain di masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kegiatan dilakukan berdasarkan pendekatan edukatif atau kemasyarakatan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh forum desa siaga aktif atau forum kesehatan lainnya yang sudah ada, yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat.

**GRAFIK III.D.3
JUMLAH POSKESDES BERDASARKAN DATA PROFIL KESEHATAN
TAHUN 2011-2017**



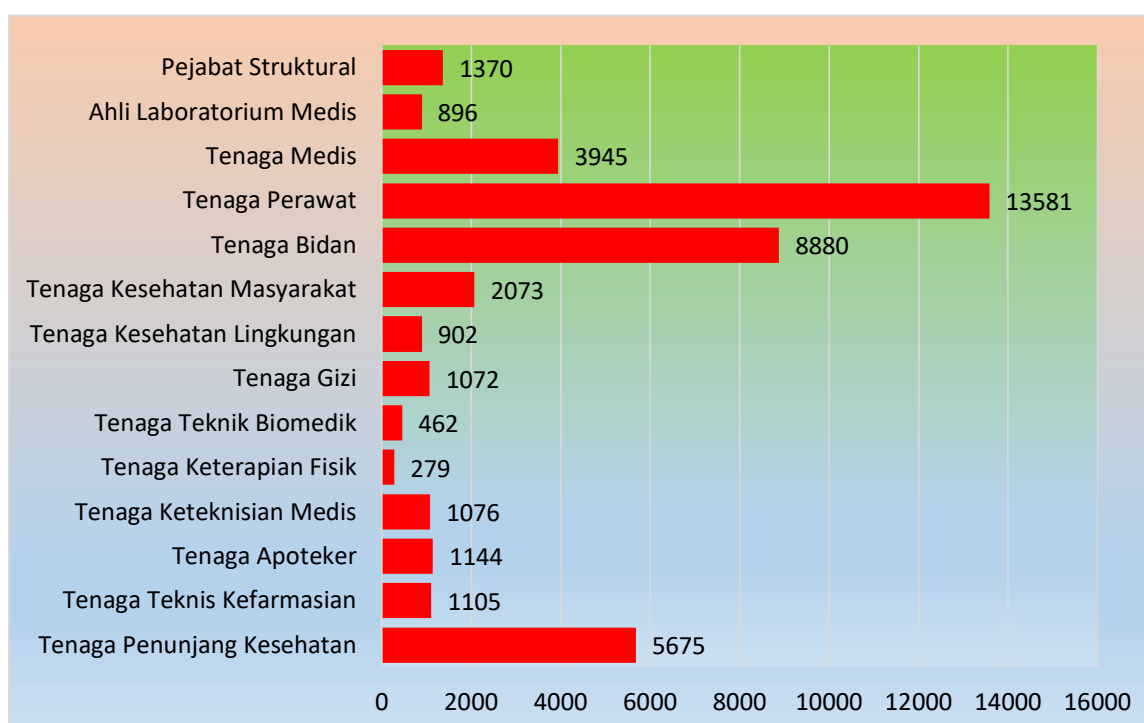
Sumber : Profil Dinas Kesehatan kabupaten/ kota

Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma III (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

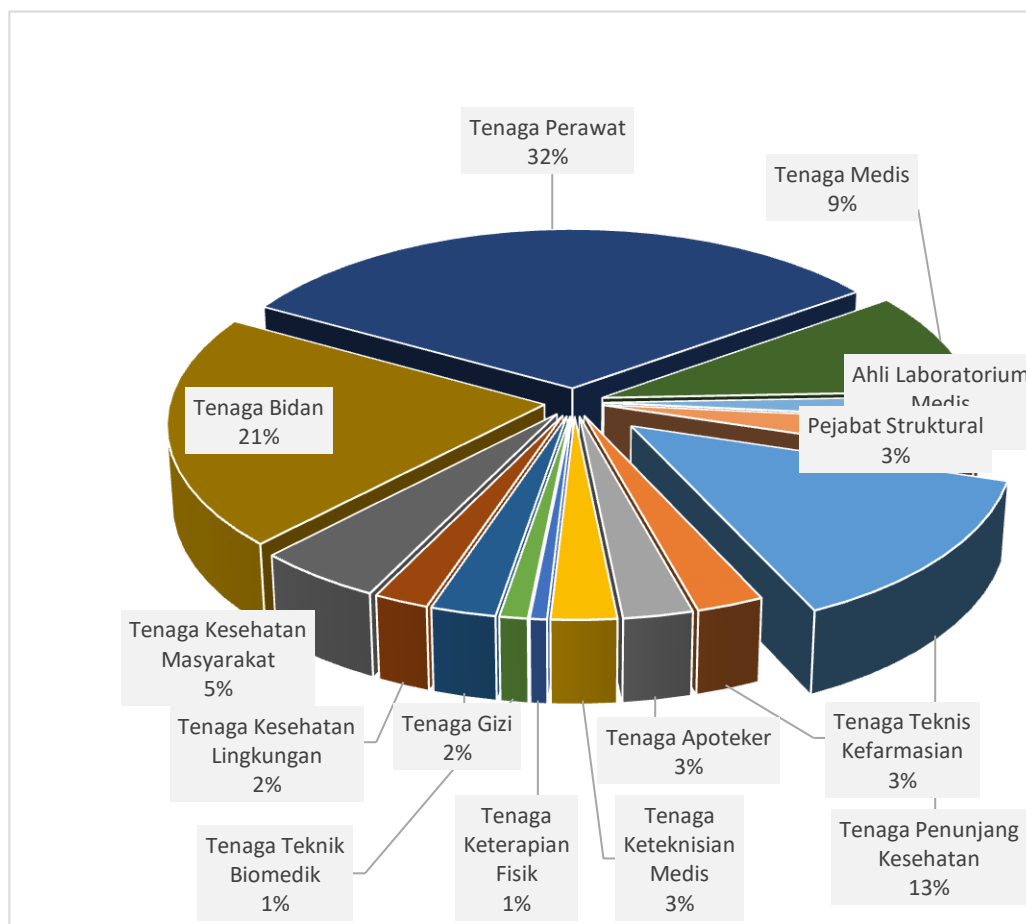
GRAFIK IV.1
JUMLAH TENAGA KESEHATAN
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Saat ini jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan yang tercatat melalui Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota pada tahun 2019 sebanyak 42.355 orang (pegawai kesehatan) dengan proporsi tenaga kesehatan yang terbesar adalah perawat 32% (13.581 orang), bidan 20,96% (8.880 orang), kemudian tenaga medis sebesar 9,3% (3.945 orang). Sedangkan jumlah tenaga dalam lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data Subag Kepegawaian hingga akhir 2018 berjumlah 263 orang.

GRAFIK IV.2
PRESENTASE TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019



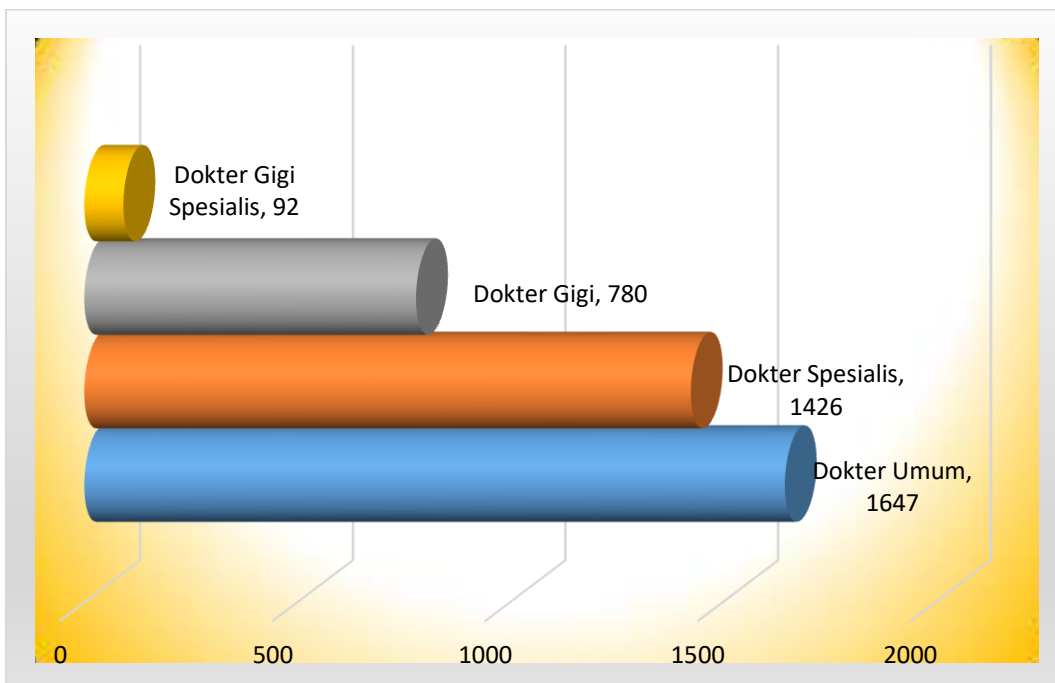
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

A. TENAGA MEDIS

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Tenaga medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter keluarga.

Hingga tahun 2018 di Sulawesi Selatan tercatat jumlah tenaga medis sebanyak 4.126 orang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 1.787 orang, dokter umum sebanyak 1.597 orang, dokter gigi sebanyak 718 orang dan dokter spesialis gigi sebanyak 24 orang dengan rasio tenaga medis sebanyak 43,77 per 100.000 penduduk. Artinya ada sebanyak 43 sampai 44 orang tenaga medis yang melayani 100.000 penduduk di Sulawesi Selatan.

GRAFIK IV.A
JUMLAH TENAGA MEDIS
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019



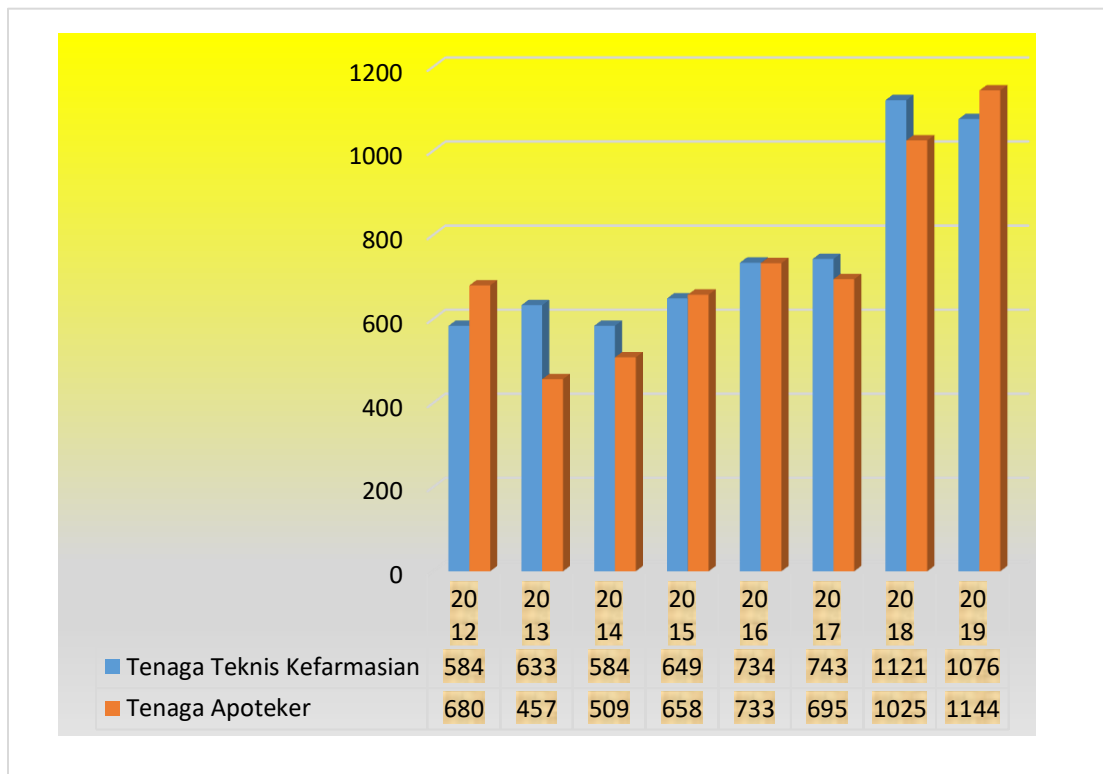
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota Tahun 2019

Rasio masing-masing tenaga medis per 100.000 penduduk berdasarkan data yang diterima melalui 24 Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota Tahun 2019 diperoleh bahwa :

1. Rasio dokter spesialis sebesar 18,96/100.000 penduduk atau (1,185:16.000). Artinya rasio tersebut telah melebihi target yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2018 yaitu 13/100.000 penduduk. Hal ini juga melebihi target yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016 bahwa Rasio Tenaga Dokter Spesialis per penduduk adalah 1:16.000 (KEMENKUMHAM, 2016).
2. Rasio dokter umum 16,94 per 100.000 penduduk. Sedangkan menurut Kementerian Hukum dan HAM berpendapat bahwa rasio dokter umum adalah 1:2.500 atau 40:100.000 penduduk. Artinya Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi target rasio dokter umum. Provinsi Sulawesi Selatan masih kekurangan dokter umum sekitar 23/100.000 penduduk. Demikian halnya target yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Renstra 2018 yaitu 17/100.000 penduduk, belum memenuhi rasio.
3. Rasio dokter gigi sebesar 7,62 per 100.000, belum memenuhi rasio yang ditetapkan oleh Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8 per 100.000 penduduk.
4. Rasio spesialis dokter gigi sebanyak 7,87 per.100.000 penduduk, belum memenuhi rasio sebesar 8 per 100.000 penduduk.

B. TENAGA KEFARMASIAN

GAMBAR IV. B
JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012- 2018



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota 2019

Untuk tenaga kefarmasian Tahun 2018 ini telah berjumlah 2.220 orang dengan rincian Tenaga Teknis Kefarmasian sebanyak 1.076 orang atau 52,23% dari seluruh tenaga kefarmasian dengan rasio 11,89 per 100.000 penduduk. Tenaga apoteker sebanyak 1.144 orang atau 47,76% dengan rasio 10,87 per 100.000 penduduk. Total rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk yaitu 22,76 per 100.000 penduduk.

C. TENAGA GIZI

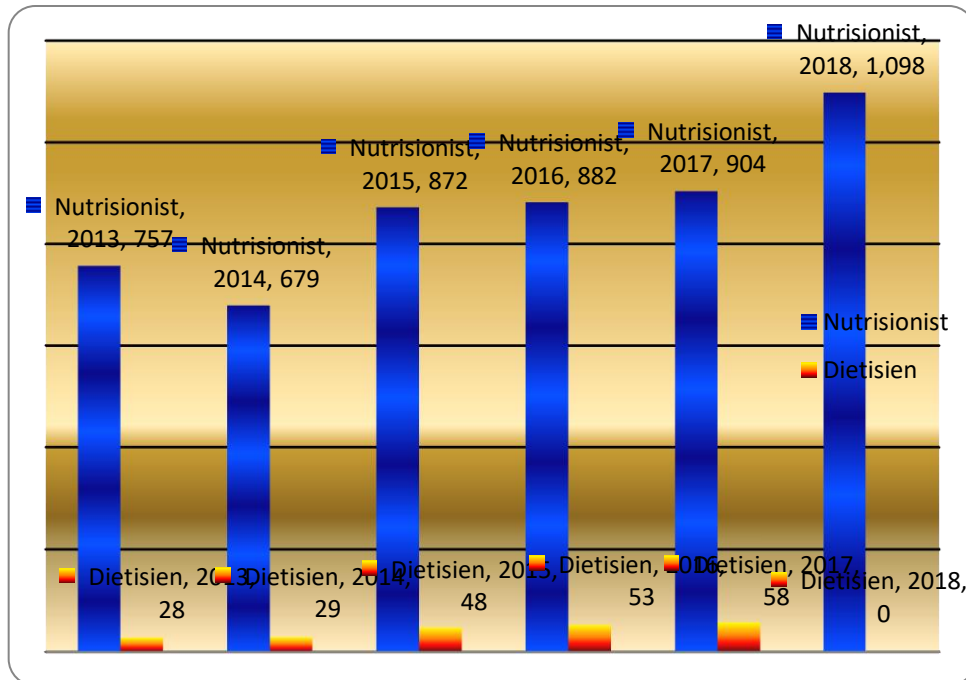
Tenaga gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik;
- Pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi pelayanan gizi;
- Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi; dan
- Melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar.

Tenaga gizi *technical registered dietisien* dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, hanya terbatas pada:

- ✚ Pemberian pelayanan gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi tertentu, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan lanjut usia.
- ✚ Pemberian pelayanan gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi.

GRAFIK IV.C
JUMLAH TENAGA GIZI DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 – 2018



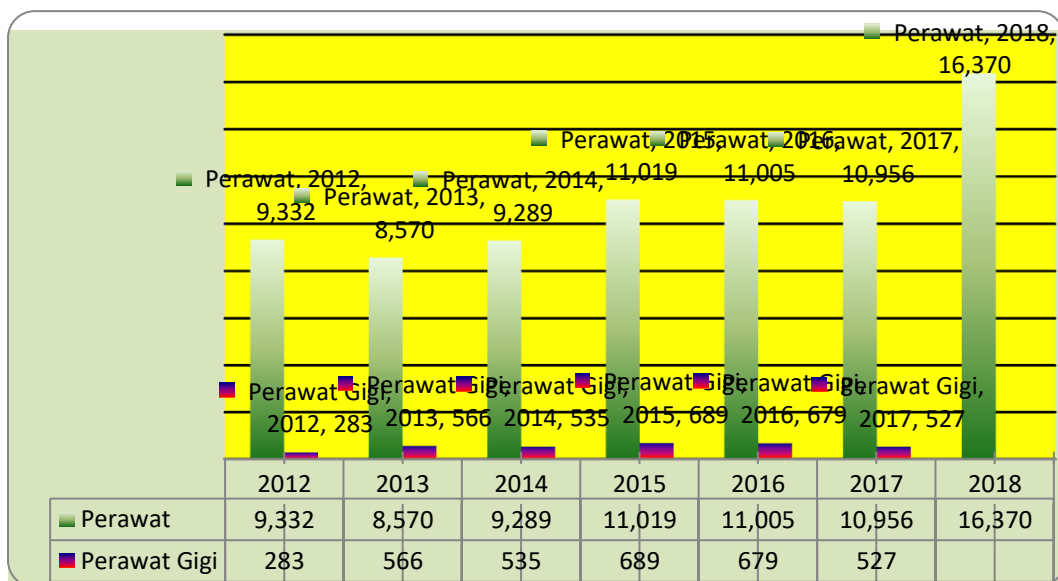
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota

Berdasarkan grafik IV.C.1 di atas, jumlah tenaga gizi hingga tahun 2013 tenaga *nutrisionist* sebanyak 757 dan *dietisien* sebanyak 28 orang, tahun 2014 tenaga *nutrisionist* sebanyak 679 dan *dietisien* sebanyak 29 orang, tahun 2015 tenaga *nutrisionist* sebanyak 872 dan *dietisien* sebanyak 48 orang, tahun 2016 tenaga *nutrisionist* sebanyak 882 dan *dietisien* sebanyak 53 orang, sedangkan tahun 2017 tenaga *nutrisionist* sebanyak 904 dan *dietisien* sebanyak 53 orang, dengan rasio sebesar 10,10 per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk data tahun 2018 sesuai permintaan dari Pusdatin Kemenkes RI tak ada lagi pemisahan antara *nutrisionist* dan *dietisien*, total tenaga gizi sebesar 1.098 orang.

D. TENAGA KEPERAWATAN

Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.

GRAFIK IV.D
JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012-2018



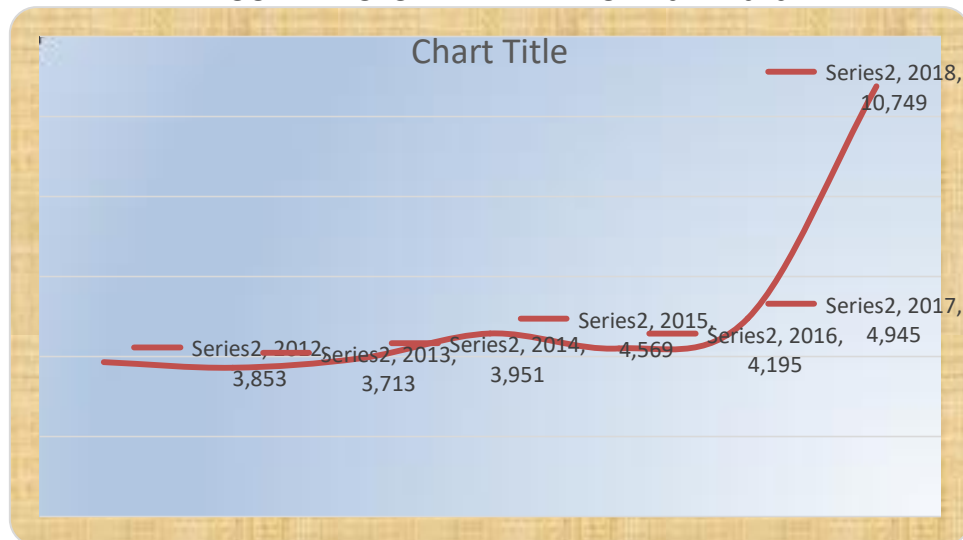
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Jumlah tenaga perawat tahun 2018 di Sulawesi Selatan sebesar 16.370 orang dengan rasio sebesar 173,65 per 100.000 penduduk. Berdasarkan Renstra Sulawesi Selatan tahun 2018 menetapkan rasio perawat yaitu 100/100.000 penduduk, maka jumlah perawat yang ada saat ini sudah memenuhi rasio.

E. TENAGA BIDAN

Ikatan Bidan Indonesia menetapkan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan (Ikatan Bidan Indonesia, 2016).

**GRAFIK IV.E
JUMLAH TENAGA BIDAN
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012-2018**



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bidan adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan ke dalam tenaga kebidanan, memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB. Di dalam keadaan tertentu yakni suatu kondisi tidak adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk maka seorang bidan dapat memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian di luar kewenangannya dalam batas tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

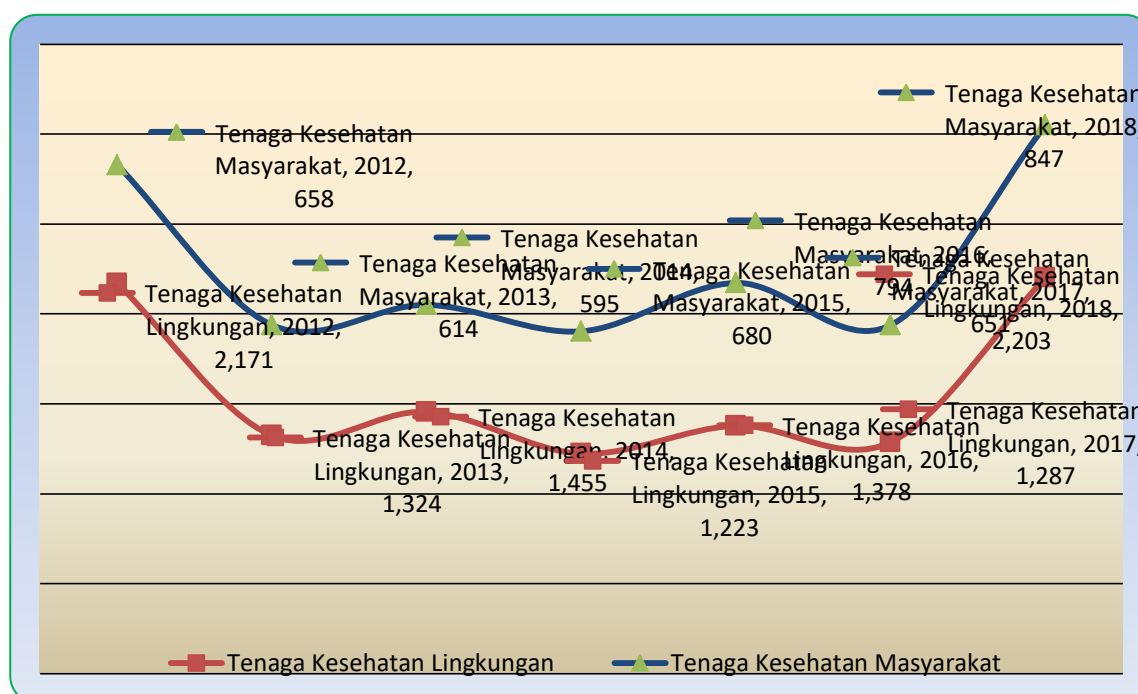
F. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN SANITASI

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014 tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri atas Epidemiolog Kesehatan, tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, tenaga Biostatistik dan Kependudukan, serta tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga. Tenaga Kesehatan Lingkungan terdiri atas tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, dan Mikrobiolog Kesehatan.

Jumlah tenaga Kesehatan Masyarakat di Sulawesi Selatan dari hasil pengumpulan Profil Kesehatan pada tahun 2012 tercatat 2.237 orang dengan rasio sebesar 18,78 dari 100.000 penduduk. Adapun jumlah tenaga sanitasi yang dilaporkan sebanyak 653 orang dengan rasio sebesar 6,65% per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013 jumlah tenaga Kesehatan Masyarakat tercatat 1.324 orang dengan rasio sebesar 15.87 dari 100.000 penduduk, sedangkan jumlah tenaga sanitasi yang dilaporkan sebanyak 614 orang dengan rasio sebesar 7.36 per 100.000 penduduk.

Pada Tahun 2014 jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat tercatat 1.455 orang dengan rasio sebesar 17,26 dari 100.000 penduduk, sedangkan jumlah tenaga sanitasi yang dilaporkan sebanyak 595 orang dengan rasio sebesar 7,06 per 100.000 penduduk.

GRAFIK IV.F
JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012 – 2018



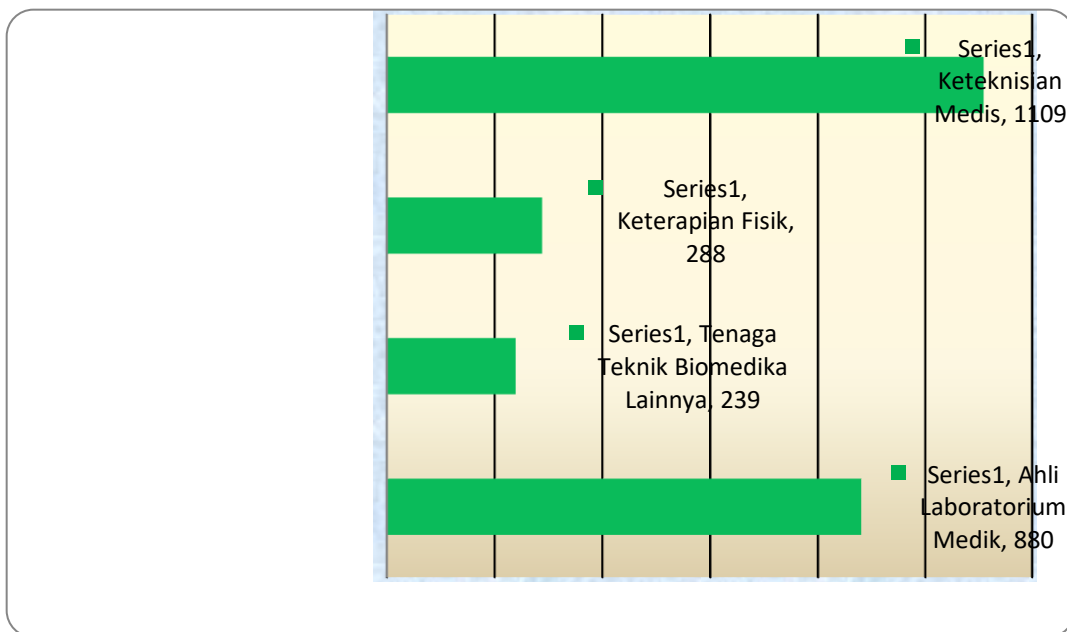
Sumber :Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2015 jumlah tenaga kesehatan masyarakat tercatat 1.223 orang dengan rasio sebesar 14,35 dari 100.000 penduduk, adapun jumlah tenaga sanitasi yang dilaporkan sebanyak 680 orang dengan rasio sebesar 7,98 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2016 jumlah tenaga Kesehatan Masyarakat tercatat 1.378 orang dengan rasio sebesar 16,01 dari 100.000 penduduk, adapun jumlah tenaga sanitasi yang dilaporkan sebanyak 794 orang dengan rasio sebesar 9,23 per 100.000 penduduk. Untuk tahun 2017 jumlah tenaga Kesehatan Masyarakat tercatat 1.287 orang dengan rasio sebesar 13,52 per 100.000 penduduk. Adapun jumlah tenaga Kesehatan Lingkungan tercatat 651 orang dengan rasio 6,84 per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk tahun 2018 jumlah tenaga Kesehatan Masyarakat tercatat 2.203 orang dengan rasio sebesar 23,37 per 100.000 penduduk. Adapun jumlah tenaga Kesehatan Lingkungan tercatat 847 orang dengan rasio 8,98 per 100.000 penduduk.

G. TENAGA KETEKNISIAN MEDIS DAN KETERAPIAN FISIK

Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisik awan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik (Kemenkes RI, 2014d).

GRAFIK IV.G
JUMLAH TENAGA KETEKNISIAN MEDIS
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

Adapun jumlah tenaga teknisi medis tahun 2017 yang dilaporkan sebanyak 1.689 orang dengan rasio sebesar 17,74 per 100.000 penduduk. Teknisi kardiovaskuler 34 orang, Radiografer 355 orang, Radioteraphis 11 orang, Teknis Elektro Medis sebanyak 146 orang, Teknisi Gigi sebanyak 47 orang, Analis Kesehatan sebanyak 736 orang, Refraksionis Opitisien sebanyak 1 orang, tenaga Ortetik Prostetik sebanyak 11 orang, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sebanyak 360 orang, dan Teknisi Transfusi Darah sebanyak 22 orang.

23. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Umur Harapan Hidup (UHH)				71,30 tahun	71,30 tahun	72,10 tahun	69,90 tahun	70 Tahun	69,60 Tahun	69,80 Tahun	69,82 Tahun	69,84 Tahun	70,08 Tahun	0.98	0.98	0.97	1.00	1.00
3	Jumlah Kematian Bayi				724 Kasus	1.026 kasus	1.021 Kasus	1.037 kasus	1.012 kasus	1.113 kasus	1.167 kasus	1.183 kasus	1.059kasus	1.037 kasus	1.54	1.14	1.16	1.02	1.02
4	Jumlah Kematian Ibu				101 Kasus	106 kasus	105 Kasus	104 Kasus	108 kasus	138 kasus	149 kasus	156 kasus	115 kasus	139 kasus	1.37	1.41	1.49	1.11	1.29
8	Angka Penemuan/Kejadian Malaria Per 1.000 Penduduk (API)				1/1.000 Penduduk	< 1/1.000 Penduduk	<1 / 1.000 Penduduk	<1/ 1.000 Penduduk	<1/1.000 Penduduk	0,14/1.000 Penduduk	0,11/1.000 Penduduk	0,12/1.000 Penduduk	0,14/1.000 Penduduk	0,1/1.000 Penduduk	0.14	0.11	0.12	0.14	0.10
9	Angka Kejadian Tuberkulosis/100.000 Penduduk (Case Notification Rate)				169/100.000 Penduduk	177/100.000 Penduduk	186/100.000 Penduduk	160/100.000 Penduduk	160/100.000 Penduduk	152/100.000 Penduduk	154/100.000 Penduduk	155/100.000 Penduduk	155/100.000 Penduduk	145/100.000 Penduduk	0.90	0.87	0.83	0.97	0.91
10	Prevalensi Balita Gizi Buruk + Gizi kurang				17,0%	23,6%	23,1%	22,1%	21,5%	26,1%	22,2%	25,2%	22,49%	23,0%	1.54	0.94	1.09	1.02	1.07

11	Prevalensi Balita Stunting				34,5%	35.26%	34,5%	33.86%	33.18%	40.9%	34.1%	35.7%	34.8%	35.6%	0.01	0.97	1.03	1.03	1.07
12	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4				95%	92.5%	93%	93%	93%	91.22%	91.72%	89.25%	91.13%	89.32%	0.96	0.99	0.96	0.98	0.96
13	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani				70%	67%	69%	71%	73%	71.65%	79.21%	76.48%	81.84%	80.71%	1.02	1.18	1.11	1.15	1.11
14	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan				93%	94%	95%	96%	96%	92.79%	94.02%	92.90%	94.05%	92%	1.00	1.00	0.98	0.98	0.96
15	Cakupan Pelayanan Nifas				89%	89%	91%	89%	90%	89.49%	91.72%	91.32%	91.48%	90.09%	1.01	1.03	1.00	1.03	1.00
16	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani				90%	94%	95%	70%	70%	56.44%	88.74%	60.66%	60.28%	58.32%	0.63	0.94	0.64	0.86	0.83
17	Cakupan Kunjungan Bayi				90%	95%	96%	97%	98%	95.23%	98.11%	98.08%	98.54%	96.04%	1.06	1.03	1.02	1.02	0.98
18	Cakupan Pelayanan Anak Balita				85%	70%	75%	63%	64%	65.17%	76.51%	69.09%	71.74%	71.64%	0.77	1.09	0.92	1.14	1.12
19	Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)				100%	100%	95%	95%	95%	94.98%	95.28%	94.26%	91.13%	93.26%	0.95	0.95	0.99	0.96	0.98
20	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81.84%	100%	1.00	1.00	1.00	0.82	1.00
21	Cakupan Penimbangan Balita (D/S)				80%	85%	87%	83%	84%	75.04%	77%	81.00%	79.00%	76%	0.94	0.91	0.93	0.95	0.90
22	Cakupan ASI Eksklusif				75%	80%	83%	70%	70%	68.45%	71.50%	68%	73.40%	73.6%	0.91	0.89	0.82	1.06	1.05
23	Cakupan Pendistribusian Vitamin A pada Balita				85%	87%	87%	88%	89%	85.40%	88.00%	84.80%	89.0%	91%	1.00	1.01	0.97	1.01	1.02

24	Cakupan Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Fe 90 Tablet				80%	85%	90%	85%	86%	88.10%	87.80%	87%	87.20%	86.7%	1.10	1.03	0.97	1.03	1.01
25	Cakupan Konsumsi Garam Beryodium				85%	90%	92%	86%	87%	90.40%	99.00%	89.20%	88.0%	89%	1.06	1.10	0.97	1.02	1.02
26	Cakupan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
27	Cakupan Kunjungan Puskesmas				33,12%	36.77%	40,42%	44.08%	47.73%	39.11%	39.24%	39.59%	42.05%	43.6%	1.18	1.07	0.98	0.95	0.91
28	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam				100%	100%	100%	100%	100%	96.83%	100%	100%	100%	100%	0.97	1.00	1.00	1.00	1.00
29	Cakupan Kualitas Air Minum				80,5%	82%	83.5%	85%	86%	71.78%	80.95%	82.07%	87.13%	88%	0.89	0.99	0.98	1.03	1.02
30	Cakupan Akses Sanitasi Dasar				64%	65%	67%	69%	70%	63.28%	69.44%	82.57%	87.26%	93.63%	0.99	1.07	1.23	1.26	1.34
31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin				100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin				100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
33	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
34	Cakupan PHBS Rumah Tangga				56%	56%	60%	58%	60%	53.56%	54.57%	56.26%	56.98%	56.98%	0.96	0.97	0.94	0.99	0.95
35	Cakupan Desa Siaga Aktif				92%	92%	98%	100%	98%	91.22%	94.05%	97.11%	97.31%	97.11%	0.99	1.02	0.99	0.97	0.99

36	Jumlah Kemitraan Lintas Sektor				4 Lintas Sektor	5 Lintas Sektor	6 Lintas Sektor	7 Lintas Sektor	6 Lintas Sektor	100%	100%	100%	100%	> 6 Lintas Sektor	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
37	Jumlah Rumah Sakit (RS) yang Terakreditasi Internasional				1 RS	1 RS	1 RS	-	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
38	Jumlah RS yang Terakreditasi Nasional				5 RS	5 RS	5 RS	5 RS	5 RS	1 RS	8 RS (meningkat sebanyak 7 RS)	31 RS (meningkat sebanyak 23 RS)	62 RS (meningkat sebanyak 31 RS)	75 RS	1.00	1.60	6.20	12.40	15.00
39	Jumlah Regulasi yang Dihasilkan				2 Dokumen Regulasi	1 Dokumen Regulasi	1 Dokumen Regulasi	Tidak ditargetkan untuk tahun ini	1 Dokumen Regulasi	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	0.50	2.00	1.00	0.00	0.00
40	% RS Pemerintah yang Telah Mempunyai Registrasi				100% (32 RS)	100% (32 RS)	100% (32 RS)	100% (32 RS)	100% (32 RS)	(32 RS)	(32 RS)	(32 RS)	100% (32 RS)	>100% (35 RS)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.09
41	% RS Swasta yang Telah Mempunyai Registrasi				60% (30 RS)	70% (30 RS)	80% (40 RS)	90% (45 RS)	100% (49 RS)	88,64% (39 RS)	86,67% (39 RS)	95,74% (45 RS)	90% (45 RS)	>100% (57 RS)	1.30	1.30	1.13	1.00	1.16
42	% RS Pemerintah yang Telah Melaksanakan Penetapan Klas				100%	100% (32 RS)	100%	100%	100%	96,88% (31 RS)	100% (32 RS)	100% (32 RS)	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
43	% RS Swasta yang Telah Melaksanakan Penetapan Klas				60% (30 RS)	70% (35 RS)	80% (40 RS)	80% (30 RS)	100% (49 RS)	50% (22 RS)	82,22% (37 RS)	89,36% (42 RS)	89,36% (42 RS)	>100% (52 RS)	0.73	1.06	1.05	1.40	1.06

44	% RS Non Rujukan Menjadi Klas C				92% (24 RS)	96% (25 RS)	100% (26 RS)	26 RS	100% (26 RS)	88,46% (23 RS)	88,46% (23 RS)	88,46% (23 RS)	27 RS	84,62% (22 RS)	0.96	0.92	0.88	1.04	0.85
45	% RS Pusat Rujukan Sebagai Klas B				83% (5 RS)	100% (6 RS)	100% (6 RS)	100% (6 RS)	100% (6 RS)	80% (4 RS)	100% (6 RS)	100% (6 RS)	100% (7 RS)	100% (6 RS)	0.80	1.00	1.00	1.17	1.00
46	% RS Pemerintah yang Memiliki Izin Rumah Sakit				60% (19 RS)	70% (22 RS)	80% (26 RS)	90% (29 RS)	100% (32 RS)	81,25% (26 RS)	84,38% (27 RS)	100% (32 RS)	100% (32 RS)	100% (32 RS)	1.37	1.23	1.23	1.10	1.00
47	% RS Swasta yang Memiliki Izin Rumah Sakit				50% (24 RS)	60% (30 RS)	70% (35 RS)	80% (40 RS)	90% (45 RS)	61,36% (27 RS)	82,22% (37 RS)	100% (45 RS)	100% (45 RS)	>100% (54 RS)	1.13	1.23	1.29	1.13	1.20
48	Jumlah Puskesmas yang Telah Melaksanakan Akreditasi Pelayanan				2 Puskesmas	4 Puskesmas	6 Puskesmas	8 Puskesmas	10 Puskesmas	-	7 PKM	135 PKM	152 PKM	379 Puskesmas	0.00	1.75	22.50	19.00	37.90
49	% RS sebagai Wahana Internship				73% (19 RS)	100% (21 RS)	100% (21 RS)	21 RS	100% (21 RS)	12 RS	21 RS	23 RS	23 RS	>100% (28 RS)	0.63	1.00	1.10	1.10	1.33
50	Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk				20/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	19/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	0.75	1.00	0.89	0.89	1.00
51	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk				8/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	12/100.000 Penduduk	13/100.000 Penduduk	5/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	16/100.000 Penduduk	16/100.000 Penduduk	16/100.000 Penduduk	0.63	1.10	1.45	1.33	1.23
52	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk				10/100.000 penduduk	11/100.000 penduduk	14/100.000 Penduduk	8/100.000 Penduduk	8/100.000 Penduduk	7/100.000 Penduduk	8/100.000 Penduduk	8/100.000 Penduduk	8/100.000 Penduduk	7/100.000 Penduduk	0.70	0.73	0.57	1.00	0.88
53	Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk				10/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	13/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	7/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	14/100.000 Penduduk	0.70	0.82	0.85	1.22	1.56
54	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk				95/100.000 Penduduk	95/100.000 Penduduk	97/100.000 Penduduk	99/100.000 Penduduk	100/100.000 Penduduk	95/100.000 Penduduk	136/100.000 Penduduk	136/100.000 Penduduk	136/100.000 Penduduk	163/100.000 Penduduk	1.00	1.43	1.40	1.37	1.63
55	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk				53/100.000 Penduduk	53/100.000 Penduduk	54/100.000 Penduduk	56/100.000 Penduduk	58/100.000 Penduduk	51/100.000 Penduduk	59/100.000 Penduduk	59/100.000 Penduduk	59/100.000 Penduduk	98/100.000 Penduduk	0.96	1.11	1.09	1.05	1.69

56	Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduduk				10/100.000 Penduduk	12/100.000 Penduduk	14/100.000 Penduduk	16/100.000 Penduduk	18/100.000 Penduduk	11/100.000 Penduduk	13/100.000 Penduduk	14/100.000 Penduduk	14/100.000 Penduduk	12/100.000 Penduduk	1.10	1.08	1.00	0.88	0.67
57	Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk				13/100.000 Penduduk	13/100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	16/100.000 Penduduk	17/100.000 Penduduk	10/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	15/100.000 Penduduk	9/100.000 Penduduk	0.77	0.69	1.00	0.94	0.53
58	Rasio Ahli Kesmas per 100.000 Penduduk				23/100.000 Penduduk	22/100.000 Penduduk	23/100.000 Penduduk	24/100.000 Penduduk	25/100.000 Penduduk	21/100.000 Penduduk	18/100.000 Penduduk	23/100.000 Penduduk	23/100.000 Penduduk	21/100.000 Penduduk	0.91	0.82	1.00	0.96	0.84
59	% Ketersediaan Obat Generik				75%	80%	85%	90%	95%	70%	80%	85%	95%	95%	0.93	1.00	1.00	1.06	1.00
60	% Pengawasan Obat dan Makanan yang Layak, Bermutu dan Aman Dikonsumsi Masyarakat				40%	45%	50%	40%	45%	35%	35%	35%	45%	45%	0.88	0.78	0.70	1.13	1.00
61	% Kualitas Pelayanan Kefarmasian pada Sarana Pelayanan Obat Tradisional				30%	35%	50%	60%	65%	30%	35%	50%	60%	65%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
62	% Kualitas Kefarmasian dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia				50%	60%	65%	75%	80%	40%	50%	50%	55%	55%	0.80	0.83	0.77	0.73	0.69
63	Cakupan Kepesertaan Jamkesda Menuju Universal Coverage				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
64	Cakupan Kepesertaan Kemitraan Asuransi Kesehatan Menuju Universal Coverage				45%	50%	60%	70%	80%	47.95%	56.70%	69.68%	75.30%	87.11%	1.07	1.13	1.16	1.08	1.09

Dari Tabel TC. 23 di atas tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan selama tahun 2013-2018 menunjukkan rata-rata pencapaian indikator kinerja di setiap tahun periode renstra ini mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pencapaian kinerja pada akhir periode renstra terlihat pada tabel sebanyak 70,3% (54 indikator) telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak 29,7% (19 Indikator) belum mencapai target yang ditetapkan.

Indikator yang mengalami kesenjangan terhadap target antara lain :

1. Jumlah Kasus Kematian Bayi, dengan rata-rata rasio capaian 0,87
2. Jumlah Kasus Kematian Ibu, dengan rata-rata rasio capaian 0,76
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk + Gizi kurang, dengan rata-rata rasio capaian 0,91
4. Prevalensi Balita Stunting, dengan rata-rata rasio capaian 0,95
5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, dengan rata-rata rasio capaian 0,97
6. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan, dengan rata-rata rasio capaian 0,98
7. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani, dengan rata-rata rasio capaian 0,78
8. Cakupan Kunjungan Bayi, dengan rata-rata rasio capaian 1,02
9. Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) , dengan rata-rata rasio capaian 0,97
10. Cakupan Penimbangan Balita (D/S) , dengan rata-rata rasio capaian 0,93
11. Cakupan Kunjungan Puskesmas, dengan rata-rata rasio capaian 1,02
12. Cakupan PHBS Rumah Tangga, dengan rata-rata rasio capaian 0,96
13. Cakupan Desa Siaga Aktif, dengan rata-rata rasio capaian 0,99
14. Persentase RS Non Rujukan Menjadi Klas C, dengan rata-rata rasio capaian 0,93
15. Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk, dengan rata-rata rasio capaian 0,77
16. Rasio Ahli Gizi per 100.000 Penduduk, dengan rata-rata rasio capaian 0,95
17. Rasio Ahli Sanitasi per 100.000 Penduduk, dengan rata-rata rasio capaian 0,79
18. Rasio Ahli Kesmas per 100.000 Penduduk, dengan rata-rata rasio capaian 0,91
19. Persentase Kualitas Kefarmasian dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia, dengan rata-rata rasio capaian 0,76

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indikator di atas, antara lain :

1. Mobilitas tenaga kesehatan cukup tinggi, proses mutasi yang sering terjadi utamanya pada Puskesmas di daerah non perkotaan, sehingga menyebabkan jumlah tenaga kesehatan tidak merata secara proporsional yang berdampak pada pemberian tugas rangkap bagi petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan profesinya.
2. Beban ganda penyakit pada masyarakat, dimana meningkatnya angka kejadian penyakit menular dan infeksi juga disertai dengan meningkatnya angka kejadian penyakit tidak menular, akibat pola hidup masyarakat yang tidak sehat serta adanya gaya hidup kekinian khususnya pada kelompok remaja serta menjamurnya warung-warung makanan siap saji khususnya di daerah Perkotaan yang dapat merubah pola konsumsi masyarakat sehingga mempertinggi resiko terhadap penyakit hasil manifestasi obesitas dan tekanan darah tinggi.
3. Kesenjangan dalam hal pendapatan keluarga yang dampaknya berimbas pada penyediaan pangan di tingkat rumah tangga.
4. Keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga dalam mengatasi permasalahan kesehatan khususnya dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), seperti terlambat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan yang beresiko sehingga terlambat dalam mendapatkan pertolongan dan tindakan kesehatan, yang mungkin saja disebabkan masih adanya pengaruh budaya/mitos pada masyarakat kelompok tertentu yang dianggap tabu, sehingga berpengaruh pada optimalisasi pencapaian sasaran.
5. Belum semua sektor menyadari pentingnya program/kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga beban tanggungjawab dirasa hanya pada SKPD teknis yang bersangkutan langsung, dengan kata lain kesibukan masing-masing sektor fokus pada pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran masing-masing sehingga pencapaian sasaran kurang maksimal.
6. Adanya dampak eksternal pada masyarakat berupa pandangan “Stigma Negatif” terhadap Fasilitas Pelayanan milik Pemerintah utamanya RS, adanya kasus-kasus tuntutan pada suatu RS tentang anggapan terhadap mutu pelayanan hingga dugaan malpraktik yang memperbesar pandangan negatif tersebut sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut.

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut di atas antara lain:

1. Perlunya regulasi yang mengatur tentang penempatan tenaga strategis dan fungsional terlatih terutama pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan sehingga tenaga kesehatan dapat didayagunakan secara profesional dan proporsional sesuai dengan kompetensinya.
2. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan mengalakkan promosi kesehatan melalui berbagai media mengenai pola konsumsi dan gaya hidup sehat.
3. Pemberian kesempatan melalui dukungan dana dalam pembukaan lapangan kerja swadaya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu.
4. Sosialisasi dan peningkatan frekwensi penyuluhan penanganan deteksi dini resiko kehamilan dan persalinan serta permasalahan di bidang KIA lainnya dengan Pemberdayaan keluarga (suami siaga) dan masyarakat (RW siaga) melibatkan peran serta Lintas Sektor terkait melalui forum-forum wilayah setempat. Selain itu pemberian informasi dilakukan melalui pendekatan kedaerahan yang dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghilangkan pengaruh tabu terhadap pola konsumsi dan hidup sehat, meningkatkan kemampuan dan kemandirian semua komponen masyarakat dan membangun hubungan kemitraan dengan pemangku adat dan dukun khususnya pada daerah DTPK.
5. Sinergitas lintas program/sektor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang melibatkan program kesehatan serta perlunya kesepakatan yang diperkuat dengan regulasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan.
6. Perbaiki manajemen pengelolaan Rumah Sakit utamanya peningkatan mutu pelayanan dan strategi pemasaran untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan.

Selanjutnya dari sisi penganggaran dan realisasi pendanaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN		PD PENANGGUNGJAWAB
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(17)	(18)	(19)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,048,798,375.00	3,472,094,683.00	2,791,197,040.00	2,418,326,775.00	1,657,719,759.00	2,048,798,375.00	3,472,094,683.00	2,791,197,040.00	2,428,624,319.00	882,709,611.00	-19.09	-56.92	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	667,231,825.00	714,248,255.00	698,000,000.00	774,000,000.00	688,028,708	667,231,825.00	714,248,255.00	698,000,000.00	695,030,949	411,287,112	3.12	-38.36	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	400,700,000.00	728,889,000.00	522,926,800.00	412,368,300.00	44,816,538	400,700,000.00	728,889,000.00	522,926,800.00	412,368,100	15,122,000	-88.82	-96.23	Dinas Kesehatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor	142,225,800.00	157,250,000.00	122,280,500.00	130,068,900.00	36,342,400	142,225,800.00	157,250,000.00	122,280,500.00	130,068,900	33,500,000	-74.45	-76.45	Dinas Kesehatan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	364,433,800.00	1,490,143,428.00	1,127,434,740.00	565,269,500.00	518,064,613	364,433,800.00	1,490,143,428.00	1,127,434,740.00	805,136,370	185,016,957	42.16	-49.23	Dinas Kesehatan

Belanja perangko , materai dan benda pos lainnya	10,000,000.0 0	23,722,00 0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,00 0.00	23,722,00 0.00	0.00	0.00	0.00	137.22	137.22	Dinas Kesehatan
Penyediaan Makanan dan Minuman	188,079,250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,079,2 50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD	5,962,374,94 9.00	5,643,648, 967.00	4,378,559, 315.00	12,686,49 8,059.69	12,140,90 7,203.00	5,962,374, 949.00	5,643,648, 967.00	4,378,559, 315.00	12,249,05 4,042.00	3,691,397, 310.00	103.63	-38.09	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	642,951,598. 00	882,206,0 51.00	733,884,2 64.00	1,046,890, 000.00	594,955,000	642,951,5 98.00	882,206,0 51.00	733,884,2 64.00	1,046,889,97 5	196,641,259	-7.47	-69.42	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,529,602,88 1.00	2,135,802, 500.00	784,016,0 00.00	0.00	0.00	2,529,602, 881.00	2,135,802, 500.00	784,016,0 00.00	0.00	0	-69.01	-69.01	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Kantor/Rumah Tangga	135,900,000. 00	124,930,8 64.00	105,570,0 00.00	157,000,0 00.00	62,000,000	135,900,0 00.00	124,930,8 64.00	105,570,0 00.00	156,350,000	7,000,000	-54.38	-94.85	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kantor/Rumah Tangga dan Mobiler	501,857,870. 00	788,964,0 00.00	1,217,125, 000.00	3,977,696, 000.00	1,031,288,34 0	501,857,8 70.00	788,964,0 00.00	1,217,125, 000.00	3,667,391,50 0	972,145,000	105.49	93.71	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	205,200,000. 00	263,492,7 00.00	385,000,0 00.00	463,428,1 25.00	449,185,000	205,200,0 00.00	263,492,7 00.00	385,000,0 00.00	463,245,000	431,842,051	118.90	110.45	Dinas Kesehatan
Asuransi Gedung Kantor	80,392,000.0 0	79,934,85 2.00	79,934,85 2.00	80,701,00 0.00	80,701,000	80,392,00 0.00	79,934,85 2.00	79,934,85 2.00	79,971,717	0	0.38	-0.52	Dinas Kesehatan
Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	198,600,000. 00	761,400,0 00.00	0.00	2,042,400, 000.00	0.00	198,600,0 00.00	761,400,0 00.00	0.00	2,000,617,20 0	0.00	907.36	907.36	Dinas Kesehatan

Pengadaan Sport Center	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	187,324,000.00	175,690,000.00	216,563,500.00	229,110,000.00	282,400,000	187,324,000.00	175,690,000.00	216,563,500.00	217,100,000	148,000,000	50.75	-20.99	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pra Tugas Dokter/Dokter Gigi PTT	0.00	177,367,000.00	89,110,000.00	0.00	0.00	0.00	177,367,000.00	89,110,000.00	0.00	0.00	-49.76	-49.76	Dinas Kesehatan
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Sulsel	301,124,600.00	201,661,000.00	235,549,999.00	286,425,000.00	360,900,000	301,124,600.00	201,661,000.00	235,549,999.00	286,424,650	292,552,000	19.85	-2.85	Dinas Kesehatan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	0.00	52,200,000.00	153,430,000.00	65,485,000.00	21,200,000	0.00	52,200,000.00	153,430,000.00	65,485,000	10,600,000	-59.39	-79.69	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	44,870,000.00	0.00	186,215,700.00	95,003,201.00	0.00	44,870,000.00	0.00	186,215,700.00	94,962,000	0.00	111.73	111.64	Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam rangka Pengembangan Kesehatan Olahraga (BKOM)	0.00	0.00	0.00	227,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,804,000.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan, Pelaksanaan, Pembinaan Analisis Jabatan, Monev dan Administrasi Kepegawaian	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800,000	0.00	0.00	0.00	0.00	99,640,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Prov.Sulsel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Kesehatan Prov.Sulsel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	8,961,942,563	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,377,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	3,515,831,733.69	196,535,300	0.00	0.00	0.00	3,444,089,000	187,600,000	-94.41	-94.55	Dinas Kesehatan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP)	0	0	192,160,000	0	0	0	0	192,160,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA	700,641,650	513,398,164	839,646,300	1,688,366,771	1,468,879,466	700,641,650	513,398,164	839,646,300	1,681,434,875	988,436,730	109.65	41.08	Dinas Kesehatan
Pengembangan Website Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel	41,341,000	0	0	46,681,300	25,355,680	41,341,000	0	0	46,680,000	12,480,000	-38.67	-69.81	Dinas Kesehatan
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	80,660,000	75,309,100	41,689,100	100,000,000	148,297,920	80,660,000	75,309,100	41,689,100	100,000,000	12,061,900	83.86	-85.05	Dinas Kesehatan
Validasi dan Diseminasi Informasi Kesehatan	74,123,100	50,000,000	104,070,000	150,000,000	198,775,920	74,123,100	50,000,000	104,070,000	149,170,000	193,760,180	168.17	161.40	Dinas Kesehatan

Pengembangan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan (Website)	0	41,041,914	40,547,610	0	0	0	41,041,914	40,547,610	0	0	-1.20	-1.20	Dinas Kesehatan
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan	70,200,000	182,336,550	138,937,300	186,458,200	82,596,112	70,200,000	182,336,550	138,937,300	186,418,375	82,578,800	17.66	17.63	Dinas Kesehatan
Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan kesehatan	37,452,550	0	0	333,726,144	100,370,043	37,452,550	0	0	328,899,100	89,752,700	167.99	139.64	Dinas Kesehatan
Penyusunan Rencana Kerja (Forum SKPD)	58,575,000	36,875,000	50,540,000	49,800,000	55,000,000	58,575,000	36,875,000	50,540,000	48,600,000	55,000,000	-6.10	-6.10	Dinas Kesehatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	51,270,000	29,400,000	23,350,000	23,350,000	26,105,341	51,270,000	29,400,000	23,350,000	23,350,000	26,082,150	-49.08	-49.13	Dinas Kesehatan
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	0	0	30,400,000	0	0	0	0	30,400,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	0	0	0	309,833,127	142,000,000	0	0	0	309,799,400	141,260,000	-54.17	-54.40	Dinas Kesehatan
Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Upaya Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi (BKOM)	0	0	0	150,670,000	222,733,000	0	0	0	150,670,000	222,733,000	47.83	47.83	Dinas Kesehatan
Pertemuan Monev bagi Pengelola Kesehatan Olahraga (BKOM)	0	0	0	307,448,000	184,098,000	0	0	0	307,448,000	0	-40.12	0.00	Dinas Kesehatan
Monev Kesehatan Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Bimtek Pelaksanaan Kesehatan Olahraga di Kab/Kota (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran	0	33,020,000	0	30,400,000	29,600,000	0	33,020,000	0	30,400,000	29,600,000	-10.36	-10.36	Dinas Kesehatan
Konsultasi dan Bimtek Perencanaan kesehatan	0	65,415,600	71,985,290	0	0	0	65,415,600	71,985,290	0	0	10.04	10.04	Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Kesehatan Olahraga	50,750,000	0	136,416,000	0	0	50,750,000	0	136,416,000	0	0	168.80	168.80	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Dokter Puskesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Olahraga	0	0	201,711,000	0	0	0	0	201,711,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
penyusunan laporan keuangan triwulanan	32,270,000	0	0	0	0	32,270,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring hasil tindak lanjut LHP	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Konsultasi tindak lanjut LHP ke Pusat	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penyusunan RENSTRA	0	0	0	0	39,499,200	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tingkat Provinsi	0	0	0	0	62,600,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Rapat Koordinasi Lintas Program Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
DAK Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Satker BOK					151,848,250					23,128,000	0.00	0.00	
PENGADAAN OBAT, PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	2,037,224,750	2,028,592,100	623,600,700	1,731,228,025	1,207,909,870	2,037,224,750	2,028,592,100	623,600,700	1,701,675,003	424,582,360	-40.71	-79.16	Dinas Kesehatan
Penerapan Pengembangan Software SIPNAP untuk Unit Layanan	0	47,450,000	57,284,300	82,681,000	0	0	47,450,000	57,284,300	81,689,400	0	74.25	72.16	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Obat-obatan Peralatan Kesehatan dan Bahan Kimia	0	0	0	84,465,025	0	0	0	0	84,465,025	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Bimbingan Teknis Pemantauan dan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR)	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	99,830,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Pembekalan Pembuatan dan Analisis Laporan POR bagi Tenaga Pengelola POR	0	0	0	0	96,187,800	0	0	0	0	94,408,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Rapat Koordinasi Penerapan Pelaporan SIPNAP	0	0	0	0	47,682,360	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Peraturan Alat Kesehatan dan PKRT	0	0	0	304,353,000	0	0	0	0	303,452,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Petugas Penyuluh dan Pengawas Keamanan Pangan	0	0	0	65,300,000	0	0	0	0	64,369,078	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pendampingan Petugas Pangan dalam pemantauan MJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah)	0	99,120,000	0	0	0	0	99,120,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pendampingan Petugas Pengelola Obat Tradisional dalam Pemantauan Usaha Jamu Gendong dan Usaha Jamu Racikan	0	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat melalui Sistem e-Catalog RS	0	52,075,000	0	0	55,000,000	0	52,075,000	0	0	0	5.62	0.00	Dinas Kesehatan
Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Perawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kefarmasian	0	0	0	1,033,704,000	75,000,000	0	0	0	1,007,150,000	74,500,000	-92.74	-92.60	Dinas Kesehatan
Pembinaan Sarana Industri Kecil Obat Tradisional	0	27,480,000	0	0	0	0	27,480,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembekalan Pemanfaatan Obat asli Indonesia	58,369,700	0	0	0	124,301,800	58,369,700	0	0	0	0	112.96	-100.00	Dinas Kesehatan
Penerapan Pelaporan Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika SIPNAP)	0	45,442,300	0	0	0	0	45,442,300	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Kefarmasian provinsi Sulawesi Selatan (DAK)	1,734,130,150	1,555,449,000	0	0	0	1,734,130,150	1,555,449,000	0	0	0	-10.30	-10.30	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	193,224,900	201,575,800	328,933,400	60,725,000	83,700,000	193,224,900	201,575,800	328,933,400	60,719,500	0	-56.68	-68.58	Dinas Kesehatan

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong	0	0	98,169,800	0	0	0	0	98,169,800	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Pangan	0	0	64,213,200	0	0	0	0	64,213,200	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)	0	0	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi pengamanan jajanan anak sekolah	51,500,000	0	0	0	0	51,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimtek Pemberian Izin Sarana Pelayanan dan Sertifikasi Alkes dan PKRT	0	0	0	0	27,375,960	0	0	0	0	13,295,960	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monev Sertifikasi Produksi Distribusi Alkes dan PKRT	0	0	0	0	166,950,000	0	0	0	0	149,470,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Advokasi Penggunaan Alkes Dalam Negeri dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang baik	0	0	0	0	130,106,750	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Binwasa Sarana Produksi dan Distribusi Alkes dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga	0	0	0	0	71,605,200	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat kedokteran (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola Preogram Alkes terhadap Sistem Regulasi Harmonisasi Alkes dan PKRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan CDAKB dan CDPKRTB serta e-Raport bagi Sarana Distribusi Alkes dan PKRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembekalan CDAKB (Care Distribusi alat Kesehatan yang baik)	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Pembekalan Report SDM dalam mengabliskasikan e-Report	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	92,908,400	0.00	0.00	
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	678,969,200	3,491,455,577	3,485,029,100	3,224,135,000	1,681,684,000	678,969,200	3,491,455,577	3,485,029,100	3,215,759,525	937,657,600	-51.83	38.10	Dinas Kesehatan
Pemilihan Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik)	200,000,000	200,000,000	247,900,000	250,000,000	254,800,000	200,000,000	200,000,000	247,900,000	249,941,000	204,710,000	27.40	2.36	Dinas Kesehatan

Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar	40,000,000	37,070,000	37,077,000	0	0	40,000,000	37,070,000	37,077,000	0	0	-7.31	-7.31	Dinas Kesehatan
Penguatan dan Pembinaan Akreditasi Puskesmas	0	0	244,860,100	0	149,610,000	0	0	244,860,100	0	149,220,000	-38.90	-39.06	Dinas Kesehatan
Pelatihan Manajemen Puskesmas	0	0	149,700,000	0	0	0	0	149,700,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimbingan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ke Lokasi Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pencetakan Buku Pedoman Pemeriksaan Tajam Penglihatan di Sekolah	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monev Program Kesehatan Olahraga	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Senam Sehat dan Bugar bagi Karyawan Dinas Kesehatan Prov.Sulsel	0	0	14,800,000	0	46,200,000	0	0	14,800,000	0	39,000,000	212.16	163.51	Dinas Kesehatan
Pembudayaan Olahraga di Dinas Kesehatan Prov.Sulsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Tes Kebugaran	0	52,137,500	0	0	0	0	52,137,500	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penilaian Lomab Taman Obat keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pembinaan Kesehatan Tradisional Kab/Kota	0	0	0	0	139,152,800	0	0	0	0	133,350,600	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi dan Advokasi Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi	0	0	0	0	51,538,600	0	0	0	0	13,361,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa Kab/Kota	0	0	0	0	79,920,400	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Senam Khusus Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota (BKOM)	0	1,150,376,266	507,256,000	440,229,000	0	0	1,150,376,266	507,256,000	439,929,000	0	-61.73	-61.76	Dinas Kesehatan
Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pengukuran Kebugaran bagi Petugas Kesehatan Olahraga (BKOM)	0	0	0	272,137,000	0	0	0	0	272,137,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Petugas Operator Alat Kesehatan Olahraga (Elektromedik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi program perkesmas	92,776,200	0	0	0	0	92,776,200	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Penatalaksanaan Penggunaan EKG (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pelatihan Kegawatdaruratan Medik Olahraga (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pemeriksaan Kepadatan Tulang (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Deteksi dan kecacatan Dini bagi Anak sekolah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Forum komunikasi Kemitraan Lintas Program dan Lintas Sektor (BKOM)	0	0	329,298,500	0	0	0	0	329,298,500	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pemeriksaan Psikolog bagi Pelatih dan atlet Olahraga (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan Olahraga pada Anak Sekolah melalui UKS (BKOM)	0	0	0	208,313,000	0	0	0	0	208,313,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Workshop Pengembangan Pusat-Pusat Kesehatan Olahraga di Kab/Kota (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Teknis bagi Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan di UKGS/UKGM	0	0	100,450,000	100,000,000	0	0	0	100,450,000	99,680,000	0	0	-0.45	-0.77	Dinas Kesehatan
Pencetakan Buku Pedoman K3 Puskesmas	0	0	31,500,000	0	0	0	0	31,500,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Peningkatan Keterampilan Kesehatan Indera bagi Dokter dan Petugas Kesehatan di Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Perencanaan Program Kesehatan Olahraga Tingkat Prov.Sulsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi Petugas Medis di Tingkat Pelayanan Dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Gizi Kesehatan Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pencetakan Buku Pedoman Perkesmas dan Form Pencatatan dan Pelaporan Perkesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kemampuan Teknis Perkesmas bagi Pengelola di Kab/Kota	0	0	0	112,500,00	0	0	0	0	112,291,900	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Orientasi Self Care Ramuan dan Manfaat TOGA bagi Petugas Puskesmas	0	0	0	146,206,00	0	0	0	0	140,882,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Kader Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi (BKOM)	0	0	0	155,398,00	0	0	0	0	155,398,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pelatihan Senam Ibu Hamil Di Tingkat Provinsi (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani Bagi Pengelola Program Haji Tingkat Provinsi (BKOM)	0	0	0	163,524,000	0	0	0	0	163,524,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Penanganan Cedera Olahraga Bagi Tenaga Tim Medis Kab/Kota (BKOM)	0	0	0	372,803,000	0	0	0	0	372,803,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penilaian Puskesmas Peduli Kesehatan Olahraga (BKOM)	0	0	0	255,224,000	0	0	0	0	253,059,625	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Penatalaksanaan Deteksi Dini Kecacatan Bagi Anak Usia Sekolah (BKOM)	0	0	0	408,456,000	0	0	0	0	408,456,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembudayaan Olahraga di Dinas Kesehatan Prov.Sulsel	22,793,000	0	0	0	0	22,793,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantauan Kasus Pasung di Kab/Kota	0	0	49,110,000	0	0	0	0	49,110,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimbingan Tenis Program Kesehatan Indra	0	0	149,910,000	0	0	0	0	149,910,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Indra	0	0	82,463,500	0	0	0	0	82,463,500	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monev Pemantauan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di Kab/Kota	0	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Uji Coba Akreditasi Puskesmas bagi Puskesmas berprestasi	0	104,907,000	0	0	0	0	104,907,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Rekam Medik di Pelayanan Dasar	0	42,892,000	0	0	0	0	42,892,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan SP2TP bagi Kab/Kota	0	72,260,000	49,999,500	0	0	0	72,260,000	49,999,500	0	0	-30.81	-30.81	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat	0	26,499,900	0	0	0	0	26,499,900	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis Provinsi Program Kesehatan Jiwa Kab/Kota	0	89,640,000	0	0	0	0	89,640,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program kesehatan jiwa Provinsi	0	59,173,900	0	0	0	0	59,173,900	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan gangguan kesehatan gigi mulut bagi Puskesmas Kab/Kota	0	62,595,400	0	0	0	0	62,595,400	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi program Pelayanan Kesehatan Olahraga	0	368,530,000	0	0	0	0	368,530,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Program Kesehatan Indra Provinsi	0	53,369,000	0	0	0	0	53,369,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Monev program Kesehatan Olahraga	0	148,264,062	0	0	0	0	148,264,062	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani	0	523,760,549	0	0	0	0	523,760,549	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Sumber Daya Aparatur	0	499,980,000	0	0	0	0	499,980,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimtek Program Kesehatan Olahraga ke Kab/Kota	0	0	54,840,000	0	0	0	0	54,840,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pencetakan Buku Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Puskesmas	0	0	47,295,000	0	0	0	0	47,295,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimbingan teknis Program Perkesmas Kab/Kota	0	0	100,484,000	0	0	0	0	100,484,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas	0	0	42,952,000	0	0	0	0	42,952,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Petugas Perkesmas di Puskesmas	0	0	51,495,000	0	0	0	0	51,495,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Tenaga Front Office Puskesmas	0	0	68,540,000	0	0	0	0	68,540,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Tahunan Kesehatan Olahraga Tingkat Provinsi	0	0	136,027,000	0	0	0	0	136,027,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Instruktur Kesehatan Olahraga	0	0	305,111,000	0	0	0	0	305,111,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pelatihan Pengukuran Kebugaran Fisik di Kabupaten/Kota	0	0	289,830,000	0	0	0	0	289,830,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi dan Advokasi Program pelayanan kesehatan tradisional , alternatif dan komplementer	98,500,000	0	0	0	0	98,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pencetakan buku pedoman kegiatan perawat kesehatan masyarakat di Puskesmas	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Monitoring SIMPUS/SP2TP	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
peningkatan Kemampuan Instruktur Senam Khusus kesehatan (BKOM)	109,900,000	0	0	0	0	109,900,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Senam Osteopoprosis di Kantor kantor (BKOM)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penatalaksanaan Pengukuran Kebugaran Fisik Bagi Tenaga Kesehatan Haji (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Upaya Kesehatan Olahraga (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Penatalaksanaan Pengukuran Kebugaran Fisik pada Calon Jemaah Haji / Umroh Kab/Kota di Provinsi (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pendekatan Psikologi Olahraga Bahi Pelatih dan Atlet Dalam Olahraga Prestasi (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan Pelayanan Kesehatan Olahraga Melalui Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah-sekolah (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penatalaksanaan Pengukuran Kebugaran Fisik Bagi Tenaga Kesegatan Olahraga (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Petugas Laboratorium bagi Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pelayanan Perkesmas di Kab/Kota	0	0	0	0	83,528,000	0	0	0	0	0	83,528,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Teknis Bagi Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	189,087,200	0	0	0	0	180,915,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Lomba Senam Sehat Bugar dalam rangka HKN Tingkat Provinsi (BKOM)	0	0	334,130,500	339,345,000	100,000,000	0	0	334,130,500	339,345,000	0	-70.07	1.56	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kemampuan Teknis Perkesmas bagi Pengelola Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monev Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) Ke Kab/Kota	0	0	0	0	136,853,000					133,573,000	0.00	0.00	
Pertemuan Implementasi dan Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	0	0	0	0	113,147,000					0	0.00	0.00	
Lomba Senam Sehat Bugar dalam rangka HKN Tingkat Provinsi (BKOM)	0	0	0	0	237,847,000					0	0.00	0.00	
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1,653,337,900	1,665,895,300	1,243,328,200	308,706,000	933,572,000	1,653,337,900	1,665,895,300	1,243,328,200	306,889,000	657,396,000	-43.53	-60.24	Dinas Kesehatan
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	0	826,100,000	714,620,200	308,706,000	377,000,000	0	826,100,000	714,620,200	306,889,000	201,430,000	-54.36	-75.62	Dinas Kesehatan

Peningkatan Kesadaran Pola Hidup Sehat	100,000,000	140,123,000	132,748,000	0	0	100,000,000	140,123,000	132,748,000	0	0	32.75	32.75	Dinas Kesehatan
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Lomba PosyanduTingkat Provinsi)	94,120,000	98,653,900	0	0	0	94,120,000	98,653,900	0	0	0	4.82	4.82	Dinas Kesehatan
Pengembangan UKBM dan Generasi Muda (Pengembangan SBH dan UKBM lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan UKBM, Generasi Muda dan PSM	0	0	119,281,000	0	0	0	0	119,281,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan Kemitraan Swasta dan Ormas	0	36,162,400	0	0	0	0	36,162,400	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Program Kesehatan Olahraga dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan UKGM dan generasi muda (Pengembangan SBH dan UKBM lainnya)	0	465,912,100	144,754,000	0	0	0	465,912,100	144,754,000	0	0	-68.93	-68.93	Dinas Kesehatan
Pengembangan media promosi melalui radio tentang dampak rokok terhadap kesehatan	80,500,000	0	0	0	0	80,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pengembangan UKBM, Generasi Muda dan PSM (Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi)	93,670,000	98,943,900	131,925,000	0	0	93,670,000	98,943,900	131,925,000	0	0	40.84	40.84	Dinas Kesehatan
Pengembangan Media cetak promosi dampak rokok terhadap kesehatan	275,600,000	0	0	0	0	275,600,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan Kapasitas dokter kecil dalam promosi dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Makassar	123,225,000	0	0	0	0	123,225,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengenalan pada usia dini dampak rokok terhadap kesehatan bagi anak sekolah SD	289,345,000	0	0	0	0	289,345,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan Media promosi melalui TV tentang dampak rokok terhadap kesehatan	101,000,000	0	0	0	0	101,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Kampanye dampak rokok terhadap kesehatan pada Hari Kesehatan Nasional	89,375,000	0	0	0	0	89,375,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan media promosi merchandise dampak rokok terhadap kesehatan	140,350,000	0	0	0	0	140,350,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pengembangan media promosi dampak rokok terhadap kesehatan melalui pameran	138,822,900	0	0	0	0	138,822,900	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Survei prilaku merokok di tempat umum atau pendapat masyarakat tentang pentingnya KTR	127,330,000	0	0	0	0	127,330,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kader Kesehatan Olahraga Dalam Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan Olahraga Tingkat Prov. Sulsel (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penilaian Puskesmas Peduli Kesehatan Olahraga (BKOM)	0	0	0	0	255,322,000	0	0	0	0	254,716,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Penatalaksanaan Deteksi Dini Kecacatan Bagi Anak Usia Sekolah (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Workshop Pengembangan Kesehatan Olahraga Melalui Lintas Sektor dan SKPD di Prov. Sulse (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Dalam Pelayanan Cedera Olahraga (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Perilaku hidup Sehat	0	0	0	0	301,250,000					201,250,000	0.00	0.00	
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	2,285,502,440	2,690,843,337	2,622,091,362	2,361,077,000	3,621,221,608	2,285,502,440	2,690,843,337	2,622,091,362	2,325,402,500	289,691,600	58.44	-87.32	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemanfaatan Pangan Lokal dalam mengatasi Gizi Kurang	0	195,775,000	102,220,000	0	0	0	195,775,000	102,220,000	0	0	-47.79	-47.79	Dinas Kesehatan
Pencapaian Perbaikan Gizi Masyarakat melalui Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	0	0	0	290,000,000	39,900,000	0	0	0	287,274,000	39,815,000	-86.24	-86.14	Dinas Kesehatan
Pendampingan Kasus Gizi Buruk oleh Kader Posyandu	0	134,875,000	0	0	0	0	134,875,000	0	0	0	0.00	0	Dinas Kesehatan
Pelayanan Balita Gizi Buruk	0	0	0	300,000,000	47,900,000	0	0	0	298,222,400	47,900,000	-84.03	-83.94	Dinas Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Konseling Menyusui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengawasan Penegakan Perda No.6 Tahun 2010 (PERDA ASI) dan Pergub No. 68 Tahun 2011 (PERGUB ASI)	62,900,000	77,535,000	60,770,000	0	0	62,900,000	77,535,000	60,770,000	0	0	-3.39	-3.39	Dinas Kesehatan
Penguatan Jejaring dan Mitra LS/LP dalam Implementasi PERDA dan PERGUB tentang ASI EKSKLUSIF	0	52,675,000	87,425,000	96,206,000	30,619,375	0	52,675,000	87,425,000	94,743,000	30,460,000	-41.87	-67.85	Dinas Kesehatan
Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Tablet Fe Tingkat Kab/Kota	0	0	0	112,500,000	0	0	0	0	112,500,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Review Surveilans Gizi Puskesmas dan Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Surveilans Gizi melalui e-PPGBM Dalam rangka penanganan balita Gizi Kurang/Buruk	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	99,996,600	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pencetakan Buku Grafik Pemantauan Pertumbuhan Balita	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0	0	71,520,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemanfaatan Pangan Lokal dalam mengatasi Gizi Kurang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Fasilitasi dan Bimtek Petugas terkait Pembinaan Masyarakat menuju 1000 Hari Pertama Kehidupan	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimtek dan Pendampingan Surveilans Gizi dan On The Job Training KMS Baru pada 427 Puskesmas	79,300,000	108,100,000	143,900,000	0	0	79,300,000	108,100,000	143,900,000	0	0	0	81.46	81.46	Dinas Kesehatan
Pengadaan Buffer stock bahan antisipasi kejadian ibu hamil KEK	249,730,000	0	0	0	0	249,730,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengawasan penegakan PERDA No. 6 tahun 2010 dan Pergub No. 68 tahun 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penguatan Jejaring dan mitra LS/LP dalam implementasi PERDA dan PERGUB tentang ASI Eksklusif	57,800,000	0	0	0	0	57,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Penatalaksanaan Gizi Kesehatan Olahraga (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1,835,772,440	2,121,883,337	2,127,776,362	1,562,371,000	3,274,311,633	1,835,772,440	2,121,883,337	2,127,776,362	1,532,663,100	1,730,036,240	78.36	-5.76	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis dalam Pengendalian Penyakit Tekanan Darah Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Pengendalian Faktor Resiko Obesitas bagi SKPD Provinsi Sulsel	0	0	0	0	56,490,600	0	0	0	0	56,470,600	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi dan Implementasi Perda KTR Provinsi Sulsel di Sekolah Menengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Alat Pengendalian Penyakit Tidak Menular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pekan Aman Arus Mudik Pengendalian Gangguan Kecelakaan dan Cidera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Biaya Perawatan dan Operasional Kendaraan Khusus PPTM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pengembangan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	0	0	0	24,000,000	66,721,000	0	0	0	23,995,000	0	178.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara (Pengembangan Daerah Pilot Project)	0	0	0	99,994,000	0	0	0	0	99,994,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pengembangan Posbindu di Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	0	0	0	66,666,000	83,599,583	0	0	0	66,640,000	83,340,000	25.40	25.06	Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Kesehatan Haji	51,875,000	39,507,000	45,830,000	52,600,000	76,808,000	51,875,000	39,507,000	45,830,000	52,410,000	76,228,000	48.06	46.95	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan DQS (Data Quality Self Assessment)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi bagi Kabupaten Daerah Sulit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Rutin Tim Pokja Eradikasi Polio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Cold Room dan Distribusi Vaksin	0	49,146,200	72,415,950	30,800,000	14,500,000	0	49,146,200	72,415,950	30,768,600	14,000,050	-70.50	-71.51	Dinas Kesehatan
Pertemuan Monitoring Penggunaan Vaksin Baru	53,709,700	0	0	0	65,620,000	53,709,700	0	0	0	65,610,000	22.18	22.16	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Mobil Box Angkutan Vaksin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pendistribusian Vaksin dan Logistik Lainnya	0	0	0	0	83,250,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Investigasi dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Surveillance Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kab/Kota	0	0	19,895,700	0	0	0	0	19,895,700	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik Malaria	0	22,500,000	0	35,800,000	24,900,000	0	22,500,000	0	35,800,000	24,899,000	10.67	10.66	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria	0	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan/Workshop Petugas Diare dan Dokter Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis/Supervisi Suportif Program Diare dan ISP Lainnya	0	35,759,000	0	32,000,000	34,908,000	0	35,759,000	0	31,280,000	34,905,000	-2.38	-2.39	Dinas Kesehatan
Cetak Buku Pedoman Program P2 Diare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Tatalaksana Kasus ISPA	0	48,253,000	0	16,200,000	0	0	48,253,000	0	16,200,000	0	-66.43	-66.43	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Supervisi Suportif Program P2 ISPA	0	0	0	16,000,000	24,900,000	0	0	0	15,715,000	9,960,000	55.63	-36.62	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Tatalaksana Teknis Pengendalian Penyakit Tifoid	37,250,000	0	0	32,000,000	0	37,250,000	0	0	31,890,000	0	-14.09	-14.39	Dinas Kesehatan

Supervisi/Pembinaan dan Pemantauan Program P2 Tifoid	0	52,397,000	0	0	0	0	52,397,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Konsultasi Teknis Program P2 Tifoid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemberian PMT TB MDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Transportasi Pasien TB MDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Supervisi Suportif Program P2 TB	0	0	0	33,400,000	88,721,280	0	0	0	32,150,000	73,979,800	165.63	130.11	Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik Tuberculosis (TB)	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Format RR (Recording and Reporting) MDR dan TB HIV	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Konsultasi Teknis Program P2 TB ke Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Kontak (Penderita Kusta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Supervisi Suportif Program P2 Kusta	0	53,240,000	54,980,000	35,800,000	0	0	53,240,000	54,980,000	35,570,000	0	-32.76	-33.19	Dinas Kesehatan
Pengadaan Format RR (Recording and Reporting) P2 Kusta	11,000,000	34,700,000	10,000,000	0	0	11,000,000	34,700,000	10,000,000	0	0	-9.09	-9.09	Dinas Kesehatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kusta (Radio Spot, Dialog Interaktif dan Bahan KIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Rapid Village Survey (Kusta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Peran Kader dalam Deteksi Dini Kasus Kusta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Advokasi Kusta di Daerah Endemis Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sero Survey Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV	0	0	43,640,000	0	284,527,050	0	0	43,640,000	0	274,141,800	551.99	528.19	Dinas Kesehatan
Rapid Survey (HIV) Pengetahuan Komprehensif pada Penduduk Usia 15-24 Tahun	43,500,000	54,607,000	0	33,300,000	0	43,500,000	54,607,000	0	33,190,000	0	-23.45	-23.70	Dinas Kesehatan
Pelatihan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) HIV-AIDS	0	0	0	0	524,559,000	0	0	0	0	197,677,750	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelacakan dan Penyelidikan Epidemiologi, penatalaksanaan Kasus Zoonosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Buffer Stock Vaksin Anti Rabies (VAR)	36,000,000	46,800,000	62,362,378	0	0	36,000,000	46,800,000	62,362,378	0	0	73.23	73.23	Dinas Kesehatan
Konsultasi Teknis Program Zoonosis	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	7,574,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Bimbingan Teknis/Supervisi Suportif Program Zoonosis	0	47,958,000	0	20,800,000	19,960,000	0	47,958,000	0	20,800,000	9,960,000	-58.38	-79.23	Dinas Kesehatan
Cetak Buku Pedoman dan Brosur/Pamflet Pengendalian Penyakit Zoonosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum Masyarakat	0	49,283,700	0	0	0	0	49,283,700	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Sanitasi Tempat tempat Umum (TTU)	0	74,315,000	0	0	0	0	74,315,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Jejaring dan Pokjanel DBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantauan Sanitasi Perumahan	0	54,414,700	0	0	0	0	54,414,700	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Buku Pedoman DBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penggandaan laboratorium Supply DBD	9,999,000	28,000,000	0	0	0	9,999,000	28,000,000	0	0	0	180.03	180.03	Dinas Kesehatan
Pengadaan Logistik HIV	0	69,000,000	0	0	0	0	69,000,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Larvasida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Insektisida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Penanggulangan Kasus DBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pengadaan Jumantik KIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimtek Program DBD	0	50,642,000	0	85,966,000	75,835,000	0	50,642,000	0	85,929,000	36,750,000	49.75	-27.43	Dinas Kesehatan
Pemetaan Vektor Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Uji Resistensi Insektisida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimtek Program Vektor	0	0	45,000,000	33,300,000	20,000,000	0	0	45,000,000	33,265,000	20,000,000	-55.56	-55.56	Dinas Kesehatan
Pelatihan Tatalaksana Kasus Filariasis	0	53,612,000	0	0	0	0	53,612,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Manajemen dan Tatalaksana Kasus Kecacingan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemetaan dan Evaluasi Pengobatan Selektif dan Pengobatan Massal Kecacingan	0	0	0	35,800,000	0	0	0	0	35,800,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penyelidikan/Pengulangan KLB Penyakit Menular	159,550,000	0	37,374,000	0	100,000,000	159,550,000	0	37,374,000	0	10,575,000	-37.32	-93.37	Dinas Kesehatan

TOT Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Penyakit Respon KLB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Provincial Epidemiology Surveilans Team (PEST)	0	0	0	54,814,000	75,112,680	0	0	0	53,064,000	6,758,000	37.03	-87.26	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Posko Terpadu dan Operasional Kapal Penanggulangan Bencana	122,073,190	127,443,887	103,077,834	0	0	122,073,190	127,443,887	103,077,834	0	0	-15.56	-15.56	Dinas Kesehatan
Pemantauan Sistem Kewaspadaan Penanggulangan Bencana	0	0	39,184,000	93,492,000	344,410,000	0	0	39,184,000	80,475,000	167,170,000	778.96	326.63	Dinas Kesehatan
Pembinaan Pengawasan Kualitas Air Minum Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
TOT Community Lead Total Sanitation	61,500,000	0	0	0	0	61,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Dasar	124,025,000	0	0	66,666,000	67,000,000	124,025,000	0	0	66,550,000	0	-45.98	-46.34	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	0	63,175,000	116,470,500	0	0	0	63,175,000	116,470,500	0	0	84.36	84.36	Dinas Kesehatan
Pemantauan Klinik Sanitasi	0	0	99,981,500	100,000,000	49,950,000	0	0	99,981,500	95,640,000	49,880,000	-50.04	-50.11	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Limbah Medis	0	0	62,300,000	0	60,000,000	0	0	62,300,000	0	59,990,000	-3.69	-3.71	Dinas Kesehatan

Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan	0	0	73,977,50 0	0	0	0	0	73,977,50 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sekolah	0	0	70,380,00 0	0	0	0	0	70,380,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kab/Kota Sehat	0	718,179,8 50	0	158,720,0 00	100,000,000	0	718,179,8 50	0	158,710,500	0	-86.08	-77.90	Dinas Kesehatan
Pertemuan Kab/Kota Sehat	0	121,900,0 00	0	100,000,0 00	0	0	121,900,0 00	0	100,000,000	0	-17.97	-17.97	Dinas Kesehatan
Konsultasi Teknis Kabupaten Sehat ke Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Program TB Tk. Provinsi	0	62,205,00 0	0	0	0	0	62,205,00 0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan Provincial Epidemiologi Surveilans Team (PEST)	0	36,370,00 0	61,920,00 0	0	0	0	36,370,00 0	61,920,00 0	0	0	70.25	70.25	Dinas Kesehatan
Pemetaan Surveilans Vektor	0	56,650,00 0	0	0	0	0	56,650,00 0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimtek Program/Supervisi Supportif Program Zoonosis	0	0	14,970,00 0	0	0	0	0	14,970,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Workshop Tatalaksana Teknis Program Tifoid Kab/Kota	0	0	50,173,00 0	0	0	0	0	50,173,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Tatalaksana ISPA	25,473,750	0	16,008,00 0	0	0	25,473,75 0	0	16,008,00 0	0	0	-37.16	-37.16	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi ISPA	0	0	35,000,00 0	0	0	0	0	35,000,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Survey Jentik Demam Berdarah Dengue (DBD)	0	0	34,305,00 0	0	0	0	0	34,305,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penanggulangan Kasus DBD (Demam Bertdarah Dengue)	69,910,300	0	24,900,00 0	0	0	69,910,30 0	0	24,900,00 0	0	0	-64.38	-64.38	Dinas Kesehatan
Advokasi dan Sosialisasi Hepatitis	0	0	28,011,25 0	0	179,785,440	0	0	28,011,25 0	0	179,596,240	541.83	541.16	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis Program Diare	16,043,000	0	32,550,00 0	0	0	16,043,00 0	0	32,550,00 0	0	0	102.89	102.89	Dinas Kesehatan
Workshop Program Diare	0	0	29,751,00 0	0	0	0	0	29,751,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Rutin Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Provinsi	0	0	133,570,0 00	0	0	0	0	133,570,0 00	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Provinsi	0	0	119,470,0 00	0	0	0	0	119,470,0 00	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantauan Sistem Kewaspadaan Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan Kab/Kota Sehat	210,685,000	0	190,411,0 00	0	0	210,685,0 00	0	190,411,0 00	0	0	-9.62	-9.62	Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi Program Kab/Kota Sehat	0	0	49,920,00 0	0	0	0	0	49,920,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan Pengawasan Kualitas Air Minum	0	0	35,000,00 0	0	0	0	0	35,000,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Kecacingan Tingkat Kabupaten	0	0	118,117,750	0	0	0	0	118,117,750	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantauan dan Evaluasi Pengobatan Selektif dan Pengobatan Massal Kecacingan	0	0	69,830,000	0	19,920,000	0	0	69,830,000	0	0	-71.47	0.00	Dinas Kesehatan
Workshop pengelola diare kab/kota dan puskesmas	26,100,000	0	0	0	0	26,100,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Supervisi supportif program P2 ISPA	14,440,000	0	0	0	0	14,440,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Supervisi dan Monitoring Program P2 Tyoid	9,945,000	0	0	0	0	9,945,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Supervisi Supportif Program Kusta	34,500,000	0	0	0	0	34,500,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Supervisi supoortif terpadu TB MDR dan TB HIV	35,765,000	0	0	0	0	35,765,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Mass Blood Survey (MBS)	45,120,000	0	0	0	0	45,120,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Survey kepadatan jentik aedes aegyti	25,291,000	0	0	0	0	25,291,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Survey Darah Jari	59,349,000	0	0	0	0	59,349,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan Provincial Epidemiologi Surveilans Team (PEST)	76,134,000	0	0	0	0	76,134,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pilot Project pengendalian penyakit tidak menular melalui posbindu	39,805,000	0	0	0	0	39,805,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pertemuan evaluasi daerah pengembangan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	54,405,000	0	0	0	0	54,405,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sistem kewaspadaan penanggulangan bencana	29,360,000	0	0	0	0	29,360,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan cool room dan distribusi vaksin	31,189,500	0	0	0	0	31,189,500	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan manajemen Pengawasan kualitas air minum	38,400,000	0	0	0	0	38,400,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pengawasan pengolahan limbah sarana kesehatan	40,575,000	0	0	0	0	40,575,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
TOT Sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) dan tempat-tempat umum (TTU)	42,800,000	0	0	0	0	42,800,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Ranperda kawasan tanpa asap rokok (Naskah Akademik)	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Survei Darah jari (SDJ) tahap III Treatment Assesment Survey (TAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Supervisi Supportif Sistem Kewaspadaan Dini Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV AIDS bagi Pemuda dan Pelajar dengan Berolahraga (BKOM)	0	0	0	289,253,000	0	0	0	0	289,253,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis pada Sarana Kesehatan	0	71,825,000	0	0	0	0	71,825,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Buku Jumanik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Penemuan Kasus (RDT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimtek dan Monev Sanitasi TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)	0	0	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan laboratorium Program HIV	0	0	0	0	125,000,000					0	0.00	0.00	
Pengiriman dan pemeriksaan sampel paket spesimen TB	0	0	0	0	100,000,000					0	0.00	0.00	
Pemeriksaan laboratorium Program Hepatitis	0	0	0	0	125,000,000					50,000,000	0.00	0.00	
Pertemuan evaluasi pelaksanaan STBM bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota	0	0	0	0	50,594,000					0	0.00	0.00	
Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Servix dan Payudara	0	0	0	0	125,000,000					76,350,000	0.00	0.00	
Administrasi Sekretariat Tenaga STBM Provinsi	0	0	0	0	6,000,000					5,000,000	0.00	0.00	

Monitoring Perkembangan Percepatan Desa STBM (Stop Buang Air Besar sembarangan)	0	0	0	0	147,000,000					146,795,000	0.00	0.00	
Pengadaan Format RR (Recording and Reporting) MDR dan TB HIV	0	0	0	0	20,000,000					0	0.00	0.00	
Monitoring dan Supervisi Suportif Program P2 Kusta	0	0	0	0	20,000,000					0	0.00	0.00	
Pengadaan Format RR (Recording and Reporting) P2 Kusta	0	0	0	0	5,000,000					0	0.00	0.00	
Pengadaan Buku Pedoman DBD	0	0	0	0	9,240,000					0	0.00	0.00	
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	521,656,700	2,175,436,140	1,390,271,400	906,118,000	1,833,522,730	521,656,700	2,175,436,140	1,390,271,400	855,140,000	859,742,750	251.48	64.81	Dinas Kesehatan
Persiapan Rumah Sakit Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantauan RS Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Pengelola Gizi RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Petugas CSSD RS	0	0	0	96,206,000	0	0	0	0	96,204,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Workshop Manajemen dan Penggunaan Obat serta HPK dalam rangka Akreditasi RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Visitasi Perizinan RS	0	1,383,562,500	0	100,000,000	106,627,400	0	1,383,562,500	0	100,000,000	0	-92.29	-92.77	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Pengelola Izin RS Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monev PSC di Kabupaten/Kota	0	0	0	192,500,000	0	0	0	0	192,460,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Satuan Pengawas Internal (SPI) RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Pelaporan Berbasis SIM RS terintegrasi JKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Dokter Pendamping Insternsip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monev Internsip	0	0	0	0	66,860,000	0	0	0	0	66,860,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis Akreditasi Bagi Puskesmas Berprestasi	0	0	0	58,706,000	0	0	0	0	58,706,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pendataan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota	0	98,560,000	99,970,000	91,756,000	129,400,000	0	98,560,000	99,970,000	91,650,000	121,700,000	31.29	23.48	Dinas Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit Khusus (RSK) Geriatric Hospital and Advance Medicine	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Pemenuhan Nakes di RS dan Puskesmas Berdasarkan Rasio di Kab/Kota se Sulsel	0	349,713,000	0	0	0	0	349,713,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Pengelola Program Sumber Daya Kesehatan (SDK)	0	0	120,812,000	58,350,000	124,166,980	0	120,812,000	58,340,000	0	0	2.78	-51.71	Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi Program SDK dalam rangka Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk	0	0	86,442,000	58,600,000	0	0	86,442,000	58,600,000	0	0	-32.21	-32.21	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Standar di Unit Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	190,000,000	0	0	0	190,000,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	0	0	0	100,000,000	76,760,000	0	0	99,990,000	76,760,000	0	-23.24	-23.23	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	0	0	0	100,000,000	0	0	0	99,190,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Anastesi di RS	0	13,100,000	0	0	0	0	13,100,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

penyusunan Pedoman Penyelenggaraan ICU di RS	0	39,906,90 0	0	0	0	0	39,906,90 0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantauan Penyusunan rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) di RS	0	90,593,74 0	0	0	0	0	90,593,74 0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pendataan Nakes Asing di Kab/Kota	0	82,625,00 0	86,490,00 0	0	0	0	82,625,00 0	86,490,00 0	0	0	4.68	4.68	Dinas Kesehatan
Pertemuan Perencanaan kebutuhan Nakes Berdasarkan Rasio terhadap jumlah Penduduk	0	117,375,0 00	0	0	0	0	117,375,0 00	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantauandan Pembinaan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pemberian Izin RS Pemerintah	0	0	104,820,0 00	0	0	0	0	104,820,0 00	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Front Office RS	0	0	85,297,60 0	0	0	0	0	85,297,60 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Penyusunan Sistem Remonerasi di Rumah Sakit	0	0	183,075,5 00	0	0	0	0	183,075,5 00	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
workshop PONEK (Penanganan Obstrik Neonatal Emergency Komprehensif)	0	0	93,066,50 0	0	0	0	0	93,066,50 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Penyusunan Juknis SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	0	0	20,210,70 0	0	0	0	0	20,210,70 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monev Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Pusatb Rujukan Region	0	0	35,000,00 0	0	0	0	0	35,000,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Dokter Interensip	0	0	60,007,90 0	0	0	0	0	60,007,90 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas	0	0	76,980,00 0	0	0	0	0	76,980,00 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	0	0	157,332,0 00	0	0	0	0	157,332,0 00	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan Rasio terhadap Jumlah Penduduk	0	0	58,337,50 0	0	0	0	0	58,337,50 0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan manajemen ICU di rumah sakit	61,899,000	0	0	0	0	61,899,00 0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA) Blud rumah sakit	167,277,100	0	0	0	0	167,277,1 00	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

pertemuan Koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi OK	158,944,500	0	0	0	0	158,944,500	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan pemantauan izin penyelenggaraan RS	133,536,100	0	0	0	0	133,536,100	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Pengelola Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKM RS)	0	0	0	0	115,817,800	0	0	0	0	109,816,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapsitas Pengelola Farmasi di RS	0	0	0	0	115,887,800	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Pengelola Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPS RS)	0	0	0	0	122,088,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Whorkshop Pelayanan Anamnesi dan Bedah dalam rangka Akreditasi RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantauan SPI dalam rangka Penguatan BLUD di RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Whorkshop Akreditasi RS menuju Akreditasi Internasional	0	0	122,429,700	0	0	0	0	122,429,700	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pertemuan koordinasi Pelaksana DAK Tahun 2018 dalam rangka peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	118,200,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan DAK 2018 DI Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota	0	0	0	0	198,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring terpadu, lintas Program peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas Pelayanan Kesehatan Kab/Kota	0	0	0	0	47,226,750	0	0	0	0	46,950,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan koordinasi Pelaksanaan LS Pemenuhan Tenaga Kesehatan Di Provinsi	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Sosialisasi Pemenuhan SDM DI Kab/Kota	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	65,568,750	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan koordinasi LS Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota	0	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan sosialisasi Pemenuhan SDM DI Provinsi	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monev Pemenuhan SDM DI 24 Kab/Kota	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Peningkatan Pengelolaan gizi di Rumah Sakit	0	0	0	0	122,088,000	0	0	0	0	122,088,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT	207,996,800	238,013,300	1,840,399,200	829,353,000	678,946,000	207,996,800	238,013,300	1,840,399,200	797,997,000	373,694,000	226.42	79.66	Dinas Kesehatan
Monitoring Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN	0	0	184,520,000	0	0	0	0	184,520,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN	0	0	45,631,000	179,702,000	172,586,000	0	0	45,631,000	177,932,000	171,797,000	278.22	276.49	Dinas Kesehatan
Pertemuan Pemutakhiran Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	0	0	88,933,000	0	0	0	0	88,933,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	25,987,000	109,665,300	0	0	0	25,987,000	109,665,300	0	0	322.00	322.00	Dinas Kesehatan
Survey Kepuasan Masyarakat tentang Pelaksanaan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	0	0	0	375,000,000	0	0	0	0	372,300,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelayanan Penduduk Miskin di Puskesmas	0	0	0	200,000,000	97,500,000	0	0	0	198,875,000	66,439,500	-51.25	-66.59	Dinas Kesehatan

Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Diseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Intergrasi ke JKN	0	100,590,500	0	0	0	0	100,590,500	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Bimtek dan Monitoring Evaluasi Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Konsultasi dan Bimtek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN	0	46,704,000	0	74,651,000	0	0	46,704,000	0	48,890,000	0	59.84	4.68	Dinas Kesehatan	
Penguatan Tim Pertimbangan Klinis dan Penanganan Masalah Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN	0	0	0	0	192,080,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Semiloka pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis	59,000,000	28,657,000	0	0	0	59,000,000	28,657,000	0	0	0	-51.43	-51.43	Dinas Kesehatan
Penunjang Pokja / Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis	34,880,000	14,074,800	0	0	0	34,880,000	14,074,800	0	0	0	-59.65	-59.65	Dinas Kesehatan
Sosialisasi dan Advokasi Integrasi kesehatan Gratis ke dalam Program JKN/BPJS	0	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Sosialisasi dan Advokasi PEMDA dalam Rangka Integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program JKN/BPJS	0	0	184,400,000	0	0	0	184,400,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Konsultasi dan Bimtek Pemantapan Kesehatan Gratis	69,116,800	0	142,606,800	0	0	69,116,800	142,606,800	0	0	0	106.33	106.33	Dinas Kesehatan
Diseminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis	45,000,000	0	159,356,700	0	0	45,000,000	159,356,700	0	0	0	254.13	254.13	Dinas Kesehatan
Perubahan Ranperda Program Kesehatan Gratis	0	0	406,217,400	0	0	0	406,217,400	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Sosialisasi Perubahan Ranperda Kesehatan Gratis ke Program JKN	0	0	373,165,000	0	0	0	373,165,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pokja Pelayanan Kesehatan Gratis	0	0	145,904,000	0	0	0	145,904,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Konsultasi dan Bimtek Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi ke JKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program JKN/KIS Tingkat Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Perubahan Pergub Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	0	0	0	0	216,780,000	0	0	0	0	135,457,500	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, BALITA DAN LANSIA	469,849,000	824,346,200	1,026,451,100	1,692,228,500	509,624,575	469,849,000	824,346,200	1,026,451,100	1,684,133,000	465,787,360	8.47	-0.86	Dinas Kesehatan
Audit Maternal Perinatal (AMP)	0	0	0	0	74,327,640	0	0	0	0	74,237,800	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (Dokter Umum, Bidan dan Perawat) dalam Tatalaksana Neonatus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Peningkatan Kemampuan Dokter Umum dalam Penanganan Bayi dan Balita Sakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantapan dan Evaluasi Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Penguatan Sistem Rujukan	0	59,370,00 0	0	270,000,0 00	0	0	59,370,00 0	0	267,587,000	0	354.78	350.71	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas petugas dalam pengelolaan program ibu dan reproduksi yang berbasis gender	0	40,700,00 0	0	0	0	0	40,700,00 0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Evaluasi Sistem Pelayanan dan Pencatatan/Pelaporan KB di Fasilitas Kesehatan.	0	0	0	69,568,00 0	0	0	0	0	65,795,500	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Evaluasi Pelaksanaan ANC Terpadu bagi Pengelola Puskesmas di Kab/Kota	0	50,000,00 0	0	0	149,327,560	0	50,000,00 0	0	0	149,273,160	198.66	198.55	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Supervisi Fasilitatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Peningkatan Pemantapan Petugas RS PONEK dan Puskesmas PONED	0	99,857,00 0	0	0	0	0	99,857,00 0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan SDM dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi sesuai Standar	0	51,500,00 0	0	0	0	0	51,500,00 0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantapan Sistem Pelayanan dan Pencatatan / Pelaporan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	0	50,000,00 0	90,186,30 0	50,000,00 0	0	0	50,000,00 0	90,186,30 0	50,000,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	0	0	0	100,000,0 00	0	0	0	0	99,198,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Penjaringan Anak Sekolah Dasar.	0	0	0	169,570,0 00	0	0	0	0	168,885,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Promosi Lansia Sehat	0	0	0	100,000,0 00	30,699,375	0	0	0	99,850,000	0	-69.30	0.00	Dinas Kesehatan
Lomba Lansia Sehat Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	0	92,775,00 0	29,450,00 0	50,000,00 0	0	0	92,775,00 0	29,450,00 0	50,000,000	0	-46.11	-46.11	Dinas Kesehatan
Lomba Posyandu Lansia	0	164,079,3 00	100,553,0 00	69,568,00 0	0	0	164,079,3 00	100,553,0 00	69,295,000	0	-57.60	-57.77	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Lansia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia	0	47,275,000	0	0	0	0	47,275,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Penguatan Kerjasama dan Koordinasi LS/LP dalam mendukung Program Lansia Sehat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Tim Pokja SHK	0	26,540,000	0	0	0	0	26,540,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pembinaan UKS tingkat Provinsi	0	39,649,900	0	0	0	0	39,649,900	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantapan dan Evaluasi Pelaksanaan Audit maternal dan perinatal (AMP) dan Penguatan sistem rujukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Evaluasi sistem pelayanan dan pencatatan / pelaporan KB di fasilitas kesehatan	0	46,600,000	0	0	0	0	46,600,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang sesuai standar	0	0	115,000,000	0	0	0	0	115,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Pertemuan Pemantapan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang serta Sistem Pencatatan	0	0	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Pokja AKI/AKB untuk Penguatan Sistem Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam rangka Akselerasi Penurunan AKI dan AKB	121,300,000	0	151,799,800	0	0	121,300,000	0	151,799,800	0	0	25.14	25.14	Dinas Kesehatan
Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)	0	0	190,210,000	0	0	0	0	190,210,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan Pemanfaatan Buku KIA untuk Bidan Praktek Swasta dan Rumah Sakit	0	0	193,252,000	0	0	0	0	193,252,000	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penguatan sistem perlindungan anak (Perda perlindungan anak Sulsel)	53,975,000	0	0	0	0	53,975,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pengembangan Lansia Sehat	294,574,000	0	0	0	0	294,574,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Senam Ibu Hamil di Tingkat Provinsi (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Penatalaksanaan Senam Ibu Hamil Bagi Tenaga Bidan di Rumah Sakit dan Puskesmas (BKOM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

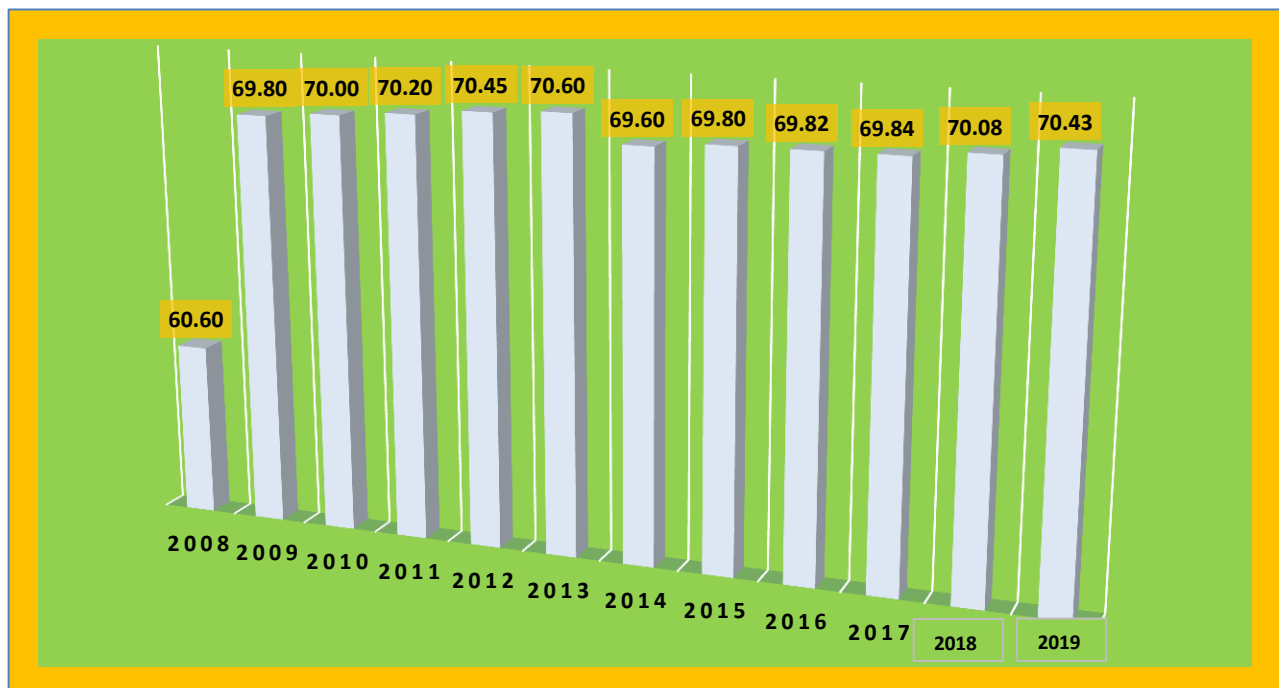
Penatalaksanaan Latihan Fisik Pada Usila (BKOM)	0	0	0	522,364,500	0	0	0	0	522,364,500	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pelatihan Senam Ibu Hamil di Tingkat Provinsi	0	0	0	291,158,000	0	0	0	0	291,158,000	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Peningkatan Pemanfaatan Buku KIA melalui Kerjasama LP/LS Terkait Kesehatan Anak	0	56,000,000	0	0	0	0	56,000,000	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pemantapan Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	0	0	0	0	85,370,000	0	0	0	0	72,376,400	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
Pertemuan terintegrasi dalam rangka Penanganan masalah AKI dan AKB Tingkat Provinsi	0	0	0	0	169,900,000	0	0	0	0	169,900,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan

Berikut ini adalah gambaran kinerja pelayanan melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama Bidang Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Kematian Ibu, Kematian Bayi dan Status Gizi (Stunting); pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan komitmen untuk mewujudkan tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs).

1. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) bermanfaat untuk mengetahui berapa lama orang dapat hidup sejak dari usia tertentu. Umur harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat taraf hidup suatu negara juga tinggi, begitupun sebaliknya. Umur harapan hidup penduduk di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

GRAFIK 1
UMUR HARAPAN HIDUP DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2019



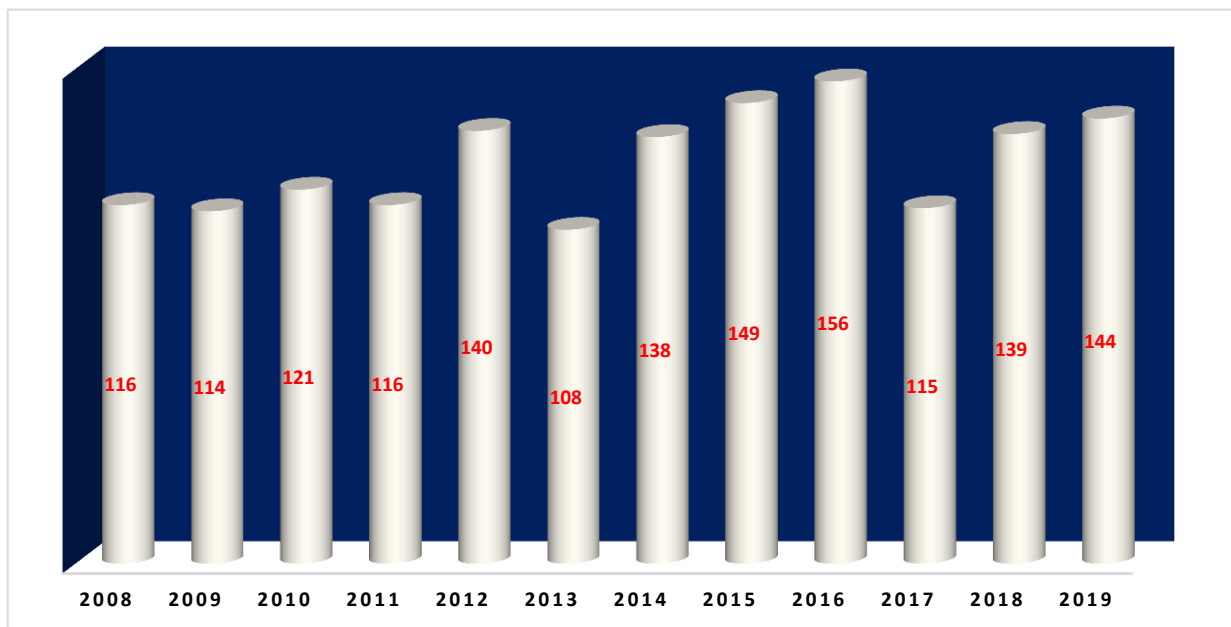
Umur harapan hidup di Sulawesi Selatan tahun 2008-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, gambaran penurunan yang terjadi pada tahun 2013 - 2019 tidak berarti terjadi penurunan usia harapan hidup penduduk, namun hal ini terjadi karena adanya perubahan metode perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peningkatan UHH menunjukkan adanya perbaikan pembangunan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan.

2. Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas.

Angka Kematian Ibu (AKI) diperoleh melalui berbagai survey yang dilakukan secara khusus seperti survey di Rumah Sakit, beberapa survey di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas, Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) serta Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). SKRT dan SDKI merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan RI. Untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota melaporkan Jumlah Kematian Ibu yang menggambarkan jumlah kasus kematian ibu di Sulawesi Selatan. Jumlah kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

GRAFIK 11
JUMLAH KEMATIAN IBU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2019



Berdasarkan data tahun 2008 – 2019, jumlah kematian ibu masih berfluktuasi namun cenderung terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkan upaya penurunan kasus kematian ibu di Sulawesi Selatan.

Monitoring/evaluasi dan Audit Maternal Perinatal terhadap kasus-kasus kematian ibu harus ditingkatkan di semua level pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu ini telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan pendekatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, Asuhan Persalinan Normal, Audit Maternal Perinatal dan sebagainya, namun upaya tersebut masih harus ditingkatkan dan lebih difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki kasus kematian ibu yang tinggi, serta dari aspek responsif gender disadari bahwa perlu melibatkan peran laki-laki/suami terhadap berbagai upaya, program ataupun kegiatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu.

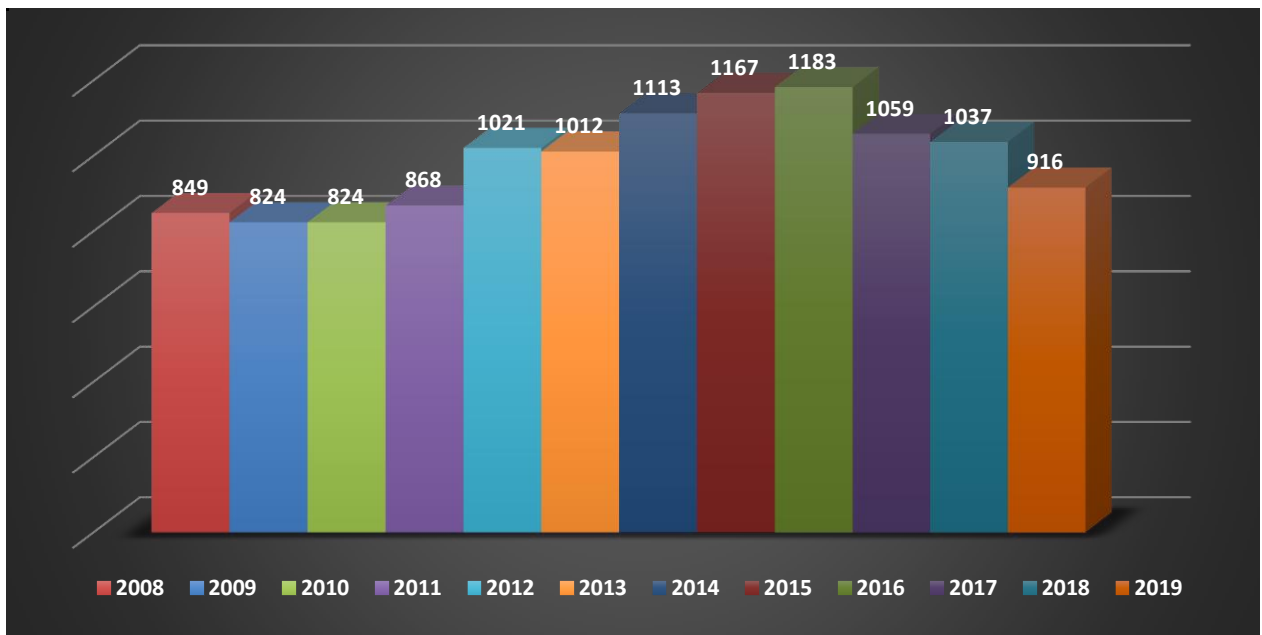
Saat ini telah dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, melibatkan seluruh lintas sektor terkait termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Persatuan Ahli Obgyn Indonesia. Tim ini bertugas untuk mengaudit kasus kematian ibu dan anak yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota dan memberikan bantuan pendampingan dalam menurunkan kasus kematian ibu dan anak.

3. Kematian Bayi

Jumlah Kematian Bayi adalah jumlah kasus kematian bayi yang merupakan refleksi dari kasus kematian yang terjadi di 24 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota, jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2008-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

GRAFIK 12
JUMLAH KEMATIAN BAYI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2019



Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi cenderung menurun. Hal ini menggambarkan adanya hasil yang signifikan terhadap upaya yang telah dilakukan selama ini. Namun hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mengingat kecenderungan peningkatan kasus dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis, termasuk validitas pelaporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota. Monitoring dan evaluasi terhadap kasus-kasus kematian bayi perlu ditingkatkan di semua level pemerintahan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam upaya menurunkan jumlah kematian bayi, telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Anak melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Neonatal, Manajemen Terpadu Balita Sakit dan lain sebagainya, namun upaya tersebut masih harus ditingkatkan dan lebih difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki angka kematian bayi yang tinggi, serta dari aspek responsif gender disadari bahwa perlu melibatkan peran laki-laki/suami terhadap berbagai upaya, program ataupun kegiatan untuk menurunkan kematian bayi.

Sejalan dengan upaya menurunkan jumlah kematian ibu, pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, melibatkan seluruh lintas sektor terkait termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Persatuan Ahli Obgyn Indonesia, serta bertugas untuk mengaudit kasus kematian ibu dan anak yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota dan memberikan bantuan pendampingan dalam rangka penurunan kasus kematian tersebut, menjadi upaya strategis dalam mencegah ataupun menekan terjadinya kasus kematian ibu dan anak di masyarakat.

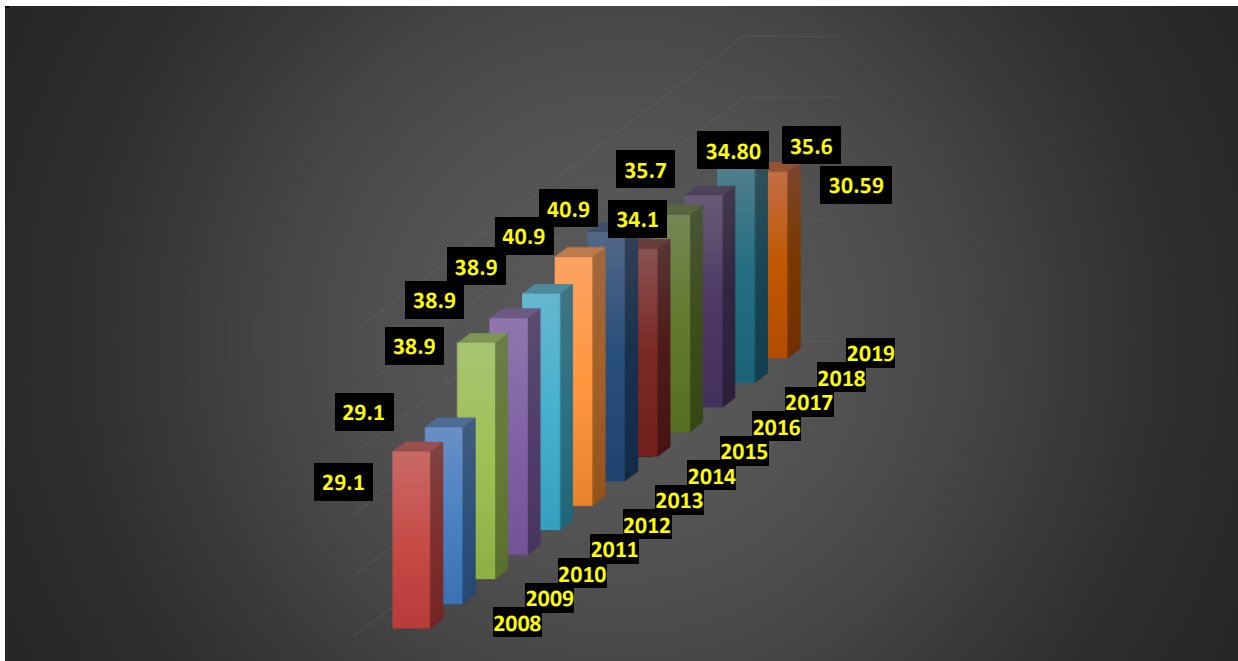
4. Status Gizi

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena selain sebagai faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan Status Gizi janin dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil, Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Anemia pada WUS yang akan berpotensi melahirkan Bayi BBLR serta status gizi Ibu menyusui.

Tolok ukur yang mencerminkan status gizi masyarakat adalah status gizi pada anak balita yang diukur berat badan dan tinggi badannya kemudian dibandingkan dengan baku rujukan WHO (2005). Selain itu keadaan gizi masyarakat juga dapat diketahui dari besarnya masalah kekurangan gizi mikro pada kelompok rentan yaitu Gangguan Akibat Kekurangan iodium (GAKI), Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kekurangan Vitamin A (KVA).

Berikut ini digambarkan salah satu indikator status gizi balita yaitu Prevalensi Balita Stunting tahun 2008 – 2019.

GRAFIK 15
PREVALENSI BALITA STUNTING DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2008 – 2019



Berdasarkan data di atas, prevalensi balita stunting di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 – 2018 berfluktuasi mengalami peningkatan dan penurunan angka prevalensi. Namun pada tahun 2019, angka ini cenderung membaik dan telah memenuhi target capaian kinerja sebesar 30,59%.

Gambaran pelayanan sektor kesehatan juga dapat dilihat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai ukuran minimal pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat.

SPM PROVINSI

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Provinsi terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

Indikator : Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Indikator : Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Capaian dan target kinerja SPM Provinsi :

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN SPM					TARGET SPM					TARGET NASIONAL	KETERANGAN		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	
1	Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	40	50	75	80	85	90	100	100	100	100	100	100	100	SPM Baru (sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018)
2	Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	96,85	96,15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SPM Baru (sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018)

SPM KABUPATEN/KOTA

Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota meliputi pelayanan berikut ini :

- A.** Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - A.1. Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah dan Swasta
- B.** Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - B.1. Jumlah semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
- C.** Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - C.1. Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
- D.** Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - D.1. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Fasilitas Kesehatan
- E.** Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - E.1. Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar
- F.** Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - F.1. Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
- G.** Pelayanan Kesehatan Balita
 - G.1. Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
- H.** Pelayanan Kesehatan Balita
 - H.1. Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
- I.** Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - I.1. Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar

- J.** Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- J.1. Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran
- K.** Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- K.1. Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
- L.** Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- L.1. Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
- M.** Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- M.1. Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
- N.** Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- N.1. Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun
- O.** Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- O.1. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
- P.** Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- P.1. Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
- Q.** Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- Q.1. Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
- R.** Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- R.1. Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
- S.** Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- S.1. Jumlah ODGJ Berat (Psikotik) yang ada di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
- T.** Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- T.1. Jumlah ODGJ Berat (Psikotik) yang ada di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

- U.** Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
 - U.1. Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
- V.** Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
 - V.1. Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
- W.** Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - W.1. Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Fasyankes dalam kurun waktu satu tahun
- X.** Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - X.1. Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama

Pencapaian SPM Kabupaten/Kota Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN	KEGIATAN			ANGGARAN		
		SASARAN	REALISASI	PERSENTASE	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	169.983	136.171	80.11	31.475.684.550	28.635.524.784	90.98
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	160.530	130.924	81.56	38.325.455.919	32.053.496.396	83.64
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	143.652	130.257	90.68	19.457.195.020	17.169.525.686	88.24
4	Pelayanan Kesehatan Balita						
	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapaka	775.958	543.966	70.10	24.805.178.866	23.081.617.116	93.05
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	651.481	414.117	63.57	17.907.163.720	16.646.027.460	92.96
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	4.919.233	2.500.177	50.82	20.154.398.559	16.284.252.994	80.80
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						
	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	715.895	433.256	60.52	18.842.049.134	16.131.673.473	85.62

NO	URAIAN	KEGIATAN			ANGGARAN		
		SASARAN	REALISASI	PERSENTASE	ALOKASI	REALISASI	PERSENTASE
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.529.327	684.726	44.77	15.616.308.793	13.477.015.518	86.30
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)						
	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	161.591	105.578	65.34	17.879.886.742	16.696.895.523	93.38
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						
	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	18.109	11.134	61.48	12.311.355.845	10.005.355.808	81.27
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	72.127	41.198	1	14.911.582.499	12.645.960.209	84.81
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)						
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	277.655	160.138	0.95	12.347.276.889	8.621.754.570	69.83

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator SPM sudah dilaksanakan dan telah mengcover sejumlah sasaran. Upaya untuk merealisasikan indikator SPM hingga tercapai 100% coverage sasaran, masih terus dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota. Provinsi berperan dalam memberikan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pencapaian indikator SPM tersebut.

Saat ini, komitmen global yang menjadi perhatian utama adalah SDGs (Sustainable Development Goals) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015 di New York, secara resmi mengesahkan SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Indonesia. Mulai tahun 2016, Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000–2015. SDGs adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dan 169 target/sasaran pembangunan yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju dan negara berkembang. 17 Tujuan SDGs terangkum dalam gambar berikut :



Prioritas target SDGs di Indonesia, dari 17 goals dan 169 target dibagi dalam 4 pilar yaitu :

1. Pilar Pembangunan Sosial; terdiri dari 6 Goals, 55 Target, 88 Indikator
 - Goal 1 : Penghapusan Kemiskinan
 - Goal 2 : Penghapusan Kelaparan
 - Goal 3 : Kesehatan dan Kesejahteraan
 - Goal 4 : Pendidikan Berkualitas
 - Goal 5 : Kesetaraan Gender
 - Goal 6 : Air Bersih dan Sanitasi
2. Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 Goals, 45 Target, 61 Indikator
 - Goal 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
 - Goal 8 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak
 - Goal 9 : Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif dan Inovatif
 - Goal 10 : Penurunan Kesenjangan
 - Goal 11 : Kota Inklusif dan Berkelanjutan
3. Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 4 Goals, 38 Target, 43 Indikator
 - Goal 12 : Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
 - Goal 13 : Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana
 - Goal 14 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut
 - Goal 15 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
4. Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan, terdiri dari 2 Goals, 31 Target, 48 Indikator
 - Goal 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh
 - Goal 17 : Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan

Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada matriks berikut ini :

MATRIKS PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian					Realisasi Capaian					Target Pencapaian					Program dan Kegiatan	Indikatif Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022						2023
1	13.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Laporan Kab/Kota dan BPJS Kesehatan	%	60%	65%	70%	75%	80%	65%	67%	70%	75%	85,76%	87,02%	95%	96%	97%	99%	100%	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 1. Semiloka Pemanantapan dan Pengembangan Kesehatan Gratis 2. Desiminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis 3. Bimtek dan Monitoring Evaluasi Kesehatan Gratis 4. Pengusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis 5. Konsultasi dan Bimtek Pelayanan Kesehatan Gratis Pojak/Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program JK/MBPJS 8. Pertemuan Kemitraan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat 9. Monitoring UJIA Kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi 10. Sosialisasi dan Advokasi PEMDA dalam rangka Integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program 11. Konsultasi dan Bimtek Pemanantapan Kesehatan 12. Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN 13. Pertemuan Pemutakhiran Data Kepesertaan Program 14. Perubahan Rancangan Program Kesehatan Gratis Perubahan Rancangan Kesehatan Gratis ke Program JKN Masyarakat tentang Pelaksanaan Kesehatan Gratis ke JKN Pelaporan Pelayanan Penduduk Miskin di Puskesmas 16. Konsultasi dan bimtek Pemanantapan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jamkesda Integrasi 18. Pengusunan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi 20. Perubahan Petunjuk Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	105,225,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					308,450,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					240,600,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					89,600,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					83,000,000	APBD	Pusat dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					201,635,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					22,000,000	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					136,680,500	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					186,940,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					186,940,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					198,295,000	APBD	Kab/Kota	Pusat dan Dinas Kesehatan	
																					398,182,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					90,262,500	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																								Dinas Kesehatan	
																					411,475,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					379,975,402	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					375,000,000	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					297,500,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					74,651,000	APBD	Pusat dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					192,080,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					216,780,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
2	14.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Laporan Kab/Kota	%	78%	79%	80%	81%	82%	81,96%	86,81%	80,96%	91,11%	90,05%	89,43%	91,5%	92%	92,5%	93%	93%	Sama dengan indikator 3.12 (a)				
3	14.1(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Laporan Kab/Kota	%	90%	91%	91,5	92	92,5	88,1	96,1	99,4	100	91,67%	98% Update : 95,5%	93,5	94	94,5	95	95	Program Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan 1. Pemeliharaan Cold Room dan Distribusi Vaksin 2. Pertemuan Monitoring Penggunaan Vaksin Baru 3. Pelatihan Surveilans Kejadian Iktan Pasca Imunisasi (KIP) Kab/Kota 4. Pendistribusian Vaksin dan Logistik Lainnya	202,683,370	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					119,330,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					22,345,700	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					83,250,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
4	14.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Laporan Kab/Kota	%	66%	66%	67%	68%	69%	71,88%	71,38%	72,39%	72,67%	73,28%	73%	72,97%	73,27%	73,57%	73,87%	74,17%	Program Pemeliharaan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia 1. Evaluasi sistem pelayanan dan pencatatan/pelaporan KB di fasilitas kesehatan Masyarakat	116,168,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
5	2.11(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	PSG (Pemantauan Status)	%	24,4	23,6	23,1	22,1	22,5	26,1	20,05	25,2	23	22,9%	15,3% (e-PPGBM)	22,0	21	20,3	18,5	17	1. Bimbingan teknis dan pendampingan surveilans gizi pada tingkat desa				

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian					Realisasi Capaian					Target Pencapaian					Program dan Kegiatan	Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022						2023
6	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	PSG (Pemantauan Status Gizi)	%	35,58%	35,26%	34,55%	33,86%	33,14%	35,3%	34%	36%	35%	35,7%	16,16% (e-PPGBM), Update : SSGBI 30,53%	30,58%	27,59%	24,58%	21,58%	18,59%	2. Peningkatan Kapasitas Kader dalam Pemantauan Pangan Lokal dalam Mengatasi Gizi Kurang	328,555,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
7	2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	PSG (Pemantauan Status Gizi)	%	35,58%	35,26%	34,55%	33,86%	33,14%	-	-	26,7%	21,8%	33,8%	14% (e-PPGBM)	33%	32,5%	32%	31,5%	31%	3. Pendampingan Kasus Gizi Buruk oleh kader Posyandu	156,475,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
8	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	PSG (Pemantauan Status Gizi)	%	9,5%	9,25%	9%	8,75%	8,5%	10,2%	10,9%	9,4%	8,7%	12,3%	5,8% (e-PPGBM)	8,25%	8%	7,75%	7,50%	7,25%	4. Bimbingan teknis Pendampingan Surveilans Gizi dan On Job Training KMS baru pada 427	252,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					5. Fasilitasi dan Bimtek Petugas Terkait Pembinaan masyarakat menuju 1000 hari Pertama Kehidupan	100,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					6. Pencapaian Petakan Gizi Masyarakat melalui Penguatan Jejaring dan Mitra LSILP dalam Gerakan Nasional Sadar Gizi Fokus pada 1000 Hari Pertama	329,900,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					7. Pelayanan Balita Gizi Buruk	347,900,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					8. Peningkatan Surveilans Gizi melalui e-PPGBM Dalam rangka penanganan balita Gizi Kurang/Buruk	100,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					9. Peningkatan Buku Grafik Pemantauan Pertumbuhan	72,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
9	2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Laporan Kab/Kota	%	3%	30,5%	30%	28,5%	27%	-	-	15%	13,4%	15,5%	17,64%	28%	27,5%	27%	26,5%	26%	1. Penguatan Buffer Stock bahan antipati kejadian ibu hamil KEK	249,730,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					2. Sweeping dan Monitoring Pendistribusian Tablet Fe Tinggi di Kab/Kota	112,500,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
10	2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Laporan Kab/Kota	%	80%	39%	42%	44%	46%	68%	72%	68%	73%	73,6%	70,82%	75%	77%	78%	80%	85%	Program Peningkatan Masyarakat	201,515,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					1. Pengawasan penegakan PERDA No 6 tahun 2010 dan Pergub No 68 tahun 2011 (Perda dan Pergub ASI)	324,725,375	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					2. Penguatan jejaring dan mitra LSILP dalam implementasi PERDA dan PERGUB tentang ASI				Dinas Kesehatan
																					Program Upaya Kesehatan Masyarakat				Dinas Kesehatan
																					1. Movev Program Indonesia Sehat dengan pertemuan pememriasi dan Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekat Keluarga (PIS-Program Keluarga)	113,147,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
11	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah Kematian Ibu	Laporan Kab/Kota	Kasus	107 Kasus	106 Kasus	105 Kasus	104 Kasus	103 Kasus	138 Kasus	149 Kasus	156 Kasus	115 Kasus	39 Kasus	14 Kasus	94/100.000 KH (1141 Kasus)	93/100.000 KH (113 Kasus)	92/100.000 KH (112 Kasus)	91/100.000 KH (111 Kasus)	90/100.000 KH (110 Kasus)	1. Pertemuan Pokja AKI/IAKB untuk Penguatan Sistem Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam Rangka Akselerasi Penurunan AKI dan AKB	126,600,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					2. Pemanjagan Sistem Pelayanan dan Pencatatan/Pelaporan kesehatan ibu dan	190,200,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					3. Pembinaan SDM dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi sesuai	51,500,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					4. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang sesuai	115,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					5. Pertemuan Pokja AKI/IAKB untuk Penguatan Sistem Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam Rangka Akselerasi penurunan AKI	151,600,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					6. Pemanjagan dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Penguatan Sistem rujukan	329,400,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					7. Pertemuan pemanfaatan buku KIA untuk Bidan Praktek Swasta dan Rumah Sakit	193,431,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					8. Pelatihan Senam Ibu Hamil di Tingkat Provinsi (BKIM)	291,158,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																					9. Audit Maternal Perinatal (AMP)	74,327,840	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					10. Pemanjagan Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan	85,370,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																					11. Pertemuan terintegrasi dalam rangka Penanganan masalah AKI dan AKB Tingkat Provinsi	169,900,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian					Realisasi Capaian					Target Pencapaian					Program dan Kegiatan	Indikatif Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022						2023
																				12. Pengembangan Lansia Sehat	294,575,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				13. Lomba Lansia Sehat Tingkat Provinsi Sulsel	172,225,000	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				14. Lomba Posyandu Lansia	335,121,000	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				15. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia	55,225,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				16. Promosi Lansia Sehat	130,699,375	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				17. Penatalaksanaan latihan fisik pada Usia (EKOM)	522,364,500	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
12	3.12*	Proporsi perempuan pemah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Laporan Kab/Kota	%	93%	94%	95%	96%	97%	92.79%	94.02%	92.90%	94.05%	91.99%	90.97%	96%	96%	97%	97%	98%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia 1. Peningkatan Pemanjapan Petugas PONEK dan Puskesmas PONEK	100,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
13	3.12(a)	Persentase perempuan pemah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Laporan Kab/Kota	%	78%	79%	80%	81%	82%	81.96%	86.81%	80.96%	91.11%	90.05%	89.43%	91.5%	92%	92.5%	93%	93%	2. Evaluasi Pelaksanaan ANC terpadu bagi Pengelola Puskesmas di Kabupaten/Kota	199,327,560	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																				3. Peningkatan Kapasitas petugas dalam pengelolaan program ibu dan Reproduksi yang berbasis Gender	55,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Monev Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) ke Kab/Kota	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				2. Pertemuan Implementasi dan Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
14	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran Jumlah Kematian Balita	Laporan Kab/Kota	Kasus	1.157 Kasus	1.155 Kasus	1.153 Kasus	1.151 Kasus	1.149 Kasus	1.201 Kasus	1.255 Kasus	1.303 Kasus	1.151 Kasus	1.124 Kasus	991 Kasus	67000 KH (1149 Kasus)	67000 KH (1147 Kasus)	57000 KH (1145 Kasus)	57000 KH (1143 Kasus)	47000 KH (1141 Kasus)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Balita dan Lansia 1. Pertemuan Pokja KIA/KB untuk Penguatan Sistem Rujukan dalam rangka Akselerasi Penurunan AKI dan AKB	126,600,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
15	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran Jumlah Kematian Neonatal	Laporan Kab/Kota	Kasus	850 Kasus	845 Kasus	840 Kasus	835 Kasus	830 Kasus	762 Kasus	336 Kasus	887 Kasus	818 Kasus	799 Kasus	714 Kasus	47000 KH (816 Kasus)	47000 KH (814 Kasus)	37000 KH (812 Kasus)	37000 KH (810 Kasus)	37000 KH (808 Kasus)	2. Pertemuan Tim Pokja SHK (Skinning Hipotroid Kongenital)	32,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
16	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Jumlah Kematian Bayi	Laporan Kab/Kota	Kasus	1040 Kasus	1039 Kasus	1038 Kasus	1037 Kasus	1036 Kasus	1113 Kasus	1167 Kasus	1183 Kasus	1059 Kasus	1037 Kasus	919 Kasus	67000 KH (1067 Kasus)	67000 KH (1065 Kasus)	57000 KH (1063 Kasus)	57000 KH (1061 Kasus)	47000 KH (1049 Kasus)	3. Penguatan Sistem Perlindungan Anak (Perda Perlindungan Anak Subsej)	55,025,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																				Pemantauan buku KIA melalui Kerjasama LPKLS terkait kesehatan anak	56,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				5. Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI)	197,369,000	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	100,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				7. Pelaksanaan Penjaringan Anak Sekolah	169,570,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				8. Pembinaan UKS Tingkat Provinsi	66,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Monev Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) ke Kab/Kota	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				2. Pertemuan Implementasi dan Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
17	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 90% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Laporan Kab/Kota	%	75	75	80	85	90	95.83	100	100	95.83	83.33%	96.15%	95	95	95.5	95.5	96	Program Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan 1. Pemeliharaan Cold Room dan Distribusi Vaksin	-	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																				2. Pertemuan Monitoring Penggunaan Vaksin Baru	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				3. Pelatihan Surveilans Kejadian Iktan Pasca Imunisasi (KIPI) Kab/Kota	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				4. Pendistribusian Vaksin dan Logistik Lainnya	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
18	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Laporan Kab/Kota	%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	0,025%	0,056%	0,28%	0,33%	0,013%	0,019%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	Program Pencegahan Penyakit dan Pencegahan Lingkungan 1. Rapid Survey Pengetahuan Komprehensif pada Penduduk Usia 15-24	134,597,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																				2. Pengadaan Logistik HIV	69,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian					Realisasi Capaian					Target Pencapaian					Program dan Kegiatan	Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Penerimaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
																				3. Zero Survei Ineksi Menular Seksual (MS) dan dan HIV/AIDS bagi Pemuda Pelajar dengan Berolahraga (BKOM)	328,647,050	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				5. Pemeriksaan Laboratorium Program HIV	289,253,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				Komprehensif Berkesinambungan (LKE) HIV/AIDS	125,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																					524,559,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
19	3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITE) per 100.000 penduduk.	Subdit TBC dan Dinkes Provinsi (Data tahun 2017, dikumpulkan pada triwulan I tahun 2018)	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di fasilitas DOTS)	152/100.000 Penduduk	154/100.000 Penduduk	156/100.000 Penduduk	158/100.000 Penduduk	160/100.000 Penduduk	152/100.000 Penduduk	154/100.000 Penduduk	155/100.000 Penduduk	155/100.000 Penduduk	156/100.000 Penduduk	166/100.000 Penduduk	216/100.000 Penduduk	202/100.000 Penduduk	207/100.000 Penduduk	212/100.000 Penduduk	217/100.000 Penduduk	222/100.000 Penduduk				
																				1. Pengadaan Laboratorium Supply TB	9,999,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				2. Supervisi Supportif Terpadu TB MDR dan TB HIV	36,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				3. Monitoring dan Evaluasi Program TB Tingkat Provinsi	62,528,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				4. Pengadaan Logistik Tuberculosis (TB)	12,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				5. Pengadaan Format RR (Recording dan Reporting) TB MDR dan TB HIV	35,825,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				6. Supervisi Supportif Program P2 TB	122,121,280	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				7. Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel Paket Spesimen TB	100,000,000	APBD	Provinsi, Kab/Kota dan Pusat	Dinas Kesehatan	
																				Program Cegah Kesenangan Masyarakat					
																				1. Monev Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) ke Kab/Kota		APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				2. Pertemuan Implementasi dan Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-Mass Blood Survey (MBS))					
20	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Laporan Kab/Kota	Per 1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	0,14/1000 Penduduk	0,12/1000 Penduduk	0,12/1000 Penduduk	0,15/1000 Penduduk	0,15/1000 Penduduk	0,10/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk					
																				1. Mass Blood Survey (MBS)	46,350,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
21	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Laporan Kab/Kota	Kab/Kota	Belum ada Penilaian Kab/Kota	Belum ada Penilaian Kab/Kota	12 Kab/Kota	5 Kab/Kota	4 Kab/Kota	Belum ada Penilaian Kab/Kota Eliminasi	Belum ada Penilaian Kab/Kota Eliminasi	14 Kab/Kota	4 Kab/Kota	8 Kab/Kota	2 Kab/Kota	3 Kab/Kota				ELIMINASI MALARIA					
																				3. Pengadaan Logistik Malaria	83,200,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				4. Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria	35,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
22	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Laporan Kab/Kota	%	3%	10%	20%	30%	40%	4%	4%	17%	50%	100%	100%	80%				ELIMINASI HEPATITIS B					
																				1. Advokasi dan Sosialisasi Hepatitis	209,795,440	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				2. Pemeriksaan Laboratorium Program	125,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
23	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Laporan Kab/Kota	Orang	510,441	325,228	330,688	338,635	67,672	422,382	253,736	283,942	333,251	91 Orang	81 Orang	(81 Orang)	(81 Orang)	(81 Orang)	(81 Orang)	1. Pelatihan talaksana kasus filariasis	53,612,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				2. Cetak Format RR Program Kusta	60,800,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
24	3.3.5(a)	Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta.	Laporan Kab/Kota	Kab/Kota	N/A	N/A	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	11 Kab/Kota	9 Kab/Kota	12 Kab/Kota	11 Kab/Kota	3 Kab/Kota	11 Kab/Kota	14 Kab/Kota	16 Kab/Kota	18 Kab/Kota	21 Kab/Kota	24 Kab/Kota	2. Monev dan Supervisi Supportif Program Kusta	198,810,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
25	3.3.5(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Laporan Kab/Kota	Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	-	-	3 Kab/Kota	1 Kab/Kota	2 Kab/Kota	-	-	1 Kab/Kota	-	3 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	1. Pelatihan talaksana kasus filariasis	53,612,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
26	3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur 18 tahun.	Laporan Kab/Kota	%	6.90%	6.60%	6.30%	6%	5.7%	6.9%	7.12%	-	1.3%	2.37%	3.10%	7.1%	7.08%	7.06%	7.04%	7.02%	Program Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	200,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																				1. Rancangan Kawasan Tanpa Asap Rokok (Maskah Akademik)	135,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				2. Pertemuan Rutin Tim Pengendali Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Provinsi	120,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				3. Pelatihan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Provinsi	90,721,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				4. Pengembangan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	392,008,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					
																				1. Peningkatan kesadaran					
																				2. Pengembangan media promosi melalui radio tentang dampak rokok terhadap kesehatan	81,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				3. Pengembangan media cetak promosi dampak rokok terhadap kesehatan	275,750,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				4. Pengembangan kapasitas dokter kecil	123,225,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian					Realisasi Capaian					Target Pencapaian					Program dan Kegiatan	Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022						2023	
35	3.7.1(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Laporan Kab/Kota	%	10%	10%	11%	11%	12%	11,47%	11,67%	12,47%	14%	14,98%	17,13%	15,5%	17%	18,5%	20%	21,5%	1. Pertemuan Pemantapan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang serta Sistem Pematapan Program Pemantapan Pelayanan Kesehatan	156,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
39	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Laporan Kab/Kota dan BPJUS Kesehatan	Orang	500 Orang	550 Orang	600 Orang	700 Orang	750 Orang	500 Orang	550 Orang	600 Orang	750 Orang	8.138 Orang	8.200 Orang	800 Orang	850 Orang	900 Orang	950 Orang	1000 Orang	1. Semiloka Pemantapan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
40	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Laporan Kab/Kota dan BPJUS Kesehatan	%	60%	65%	70%	75%	80%	65%	67%	70%	75%	85,76%	87,02%	95%	96%	97%	98%	100%	2. Desiminasi dan Informasi Pelayanan Kesehatan Gratis	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																					3. Bimtek dan Monitoring Evaluasi Kesehatan Gratis	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																						4. Pengusutan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						5. Konsultasi dan Bimtek Pelayanan Kesehatan Gratis	-	APBD	Pusat dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						Pokja/Sekretariat Pelayanan Kesehatan Gratis	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						Integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program JKNBPJUS	-	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						8. Pertemuan Kemiraan Pengelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						Kepesertaan Program Kesehatan Gratis/Janmedda Integrasi	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						Advokasi PEMDA dalam rangka Integrasi Kesehatan Gratis ke dalam Program	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						11. Konsultasi dan Bimtek Pemantapan Kesehatan Gratis	-	APBD	Pusat dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						12. Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehatan Gratis ke JKN	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						Permutakirhan Data Kepesertaan Program Kesehatan Gratis ke JKN	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						14. Perubahan Ranperda Program Kesehatan Gratis	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						Perubahan Ranperda Kesehatan Gratis ke Program JKN	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						Masyarakat tentang Pelaksanaan Kesehatan Gratis ke JKN	-	APBD	Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						Pelaporan Pelayanan Penduduk Miskin di Puskesmas	-	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						Pemantapan Pelayanan Kesehatan Gratis/Janmedda Integrasi	-	APBD	Pusat dan Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						Teknis Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						20. Perubahan Pergub Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN	-	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
43	3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Laporan Kab/Kota	%	75%	77%	80%	83%	85%	73%	77%	83%	85%	87,06%	90%	85%	87%	90%	93%	95%	1. Program Pengadaan Obat, Makanan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia	870,875,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																						2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Obat Melalui Sistem e-	52,075,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						Pemantauan dan Pelaporan Penggunaan Obat Rasional (POR)	100,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan
																						4. Pertemuan Pembekalan Pembuatan dan analisis laporan POR bagi Tenaga	96,187,800	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																						5. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pengadaan obat melalui e- Catalog RS	55,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
44	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	N/A (Tidak ada data) Indikator yang digunakan adalah rasio tenaga																			Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD				
		Rasio Tenaga Kesehatan	Laporan Kab/Kota	per 100.000 Penduduk											17100.000 Penduduk	23100.000 Penduduk	23100.000 Penduduk	23100.000 Penduduk	23100.000 Penduduk	23100.000 Penduduk	4. Sosialisasi Pemenuhan NAKES di RS dan Puskesmas berdasarkan	350,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																						5. Pertemuan Pengelola Program Sumber Daya Kesehatan (SDK)	179,432,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian					Realisasi Capaian					Target Pencapaian					Program dan Kegiatan	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Peadaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022						2023
																				6. Pertemuan Evaluasi Program SDK dalam rangka Pemenuhan Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk.	145,042,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				7. Pertemuan Evaluasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	76,380,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				8. Pertemuan dalam rangka Pembinaan dan pengawasan Tenaga	167,832,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				9. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga	100,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				10. Sosialisasi Pendayagunaan Tenaga	100,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				11. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pemenuhan Tenaga Kesehatan di	30,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				12. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pemenuhan Tenaga Kesehatan di	70,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				13. Pertemuan Sosialisasi Pemenuhan SDM di	30,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				14. Pertemuan Sosialisasi Pemenuhan SDM di	70,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				15. Monev Pemenuhan SDM di 24 Kab/Kota	100,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
48	6.21(c)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Laporan Kab/Kota	Desa / Kelurahan	525	550	1.300	2.657	2.857	1.245	1.916	2.204	2.657	2.904	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047	<i>Program Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan</i> 1. TOT Community Lead Total Sanitation	61,500,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				2. Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Dasar	257,691,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				3. Pelatihan Manajemen Pengawasan Kualitas Air Minum	38,400,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				4. Pembinaan Kab/Kota Sehat	401,096,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				5. Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Limbah Sarana Kesehatan	40,600,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				Pengolahan Makanan (TPM) dan Tempat-Tempat Umum (TTU)	42,800,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				7. Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum Masyarakat	50,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				8. Pelatihan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)	74,325,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	165,425,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				10. Pemantauan Sanitasi Perumahan	54,425,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				11. Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis pada Sarana Kesehatan	71,825,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				12. Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat	979,301,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				13. Pertemuan Kabupaten/Kota Sehat	227,350,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				14. Pertemuan Koordinasi Program Kab/Kota Sehat	50,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				15. Pemantauan Klinik Sanitasi	249,950,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				16. Bimbingan teknis dan Monitoring Evaluasi Limbah Medis	122,300,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				17. Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program Pencegahan Lingkungan	77,057,500	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				18. Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air Minum	35,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				19. Eimtek dan Monev Sanitasi TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)	65,000,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				20. Pembinaan Kesehatan Lingkungan Sekolah	70,389,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
49	6.21(d)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Laporan Kab/Kota	Desa / Kelurahan	500	530	750	1.000	1.250	333	504	565	932	1.447	2.070	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	<i>Program Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan</i> 1. TOT Community Lead Total Sanitation	61,500,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan
																				2. Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Dasar	257,691,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				3. Pemantauan Sanitasi Perumahan	54,425,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				4. Pembinaan dan Verifikasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat	979,301,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				5. Pertemuan Kabupaten/Kota Sehat	127,350,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	
																				6. Pembinaan Kab/Kota Sehat	401,096,000	APBD	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	
																				7. Pertemuan Koordinasi Program Kab/Kota Sehat	50,000,000	APBD	Provinsi	Dinas Kesehatan	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Analisis lingkungan internal meliputi kekuatan (strength) dan weakness (kelemahan) yang terdapat pada Perangkat Daerah.

Identifikasi Kekuatan (strength) yang dimiliki sebagai berikut :

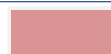
1. Struktur Organisasi yang memadai. Struktur organisasi lengkap dan tersedia, termasuk struktur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT)
2. Adanya jumlah tenaga dan kualitas tenaga yang memadai
3. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai
4. Kinerja pelayanan rata-rata mencapai target yang ditetapkan

Adapun Kelemahan (weakness) yang dimiliki sebagai berikut :

1. Tata kelola organisasi belum optimal, masih terdapat peraturan yang perlu direvisi agar pengelolaan organisasi lebih optimal
2. Distribusi tenaga yang belum merata, sehingga masih ada unit/UPT masih kekurangan tenaga
3. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah
4. Masih terdapat kinerja pelayanan yang capaiannya fluktuatif

Peluang yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

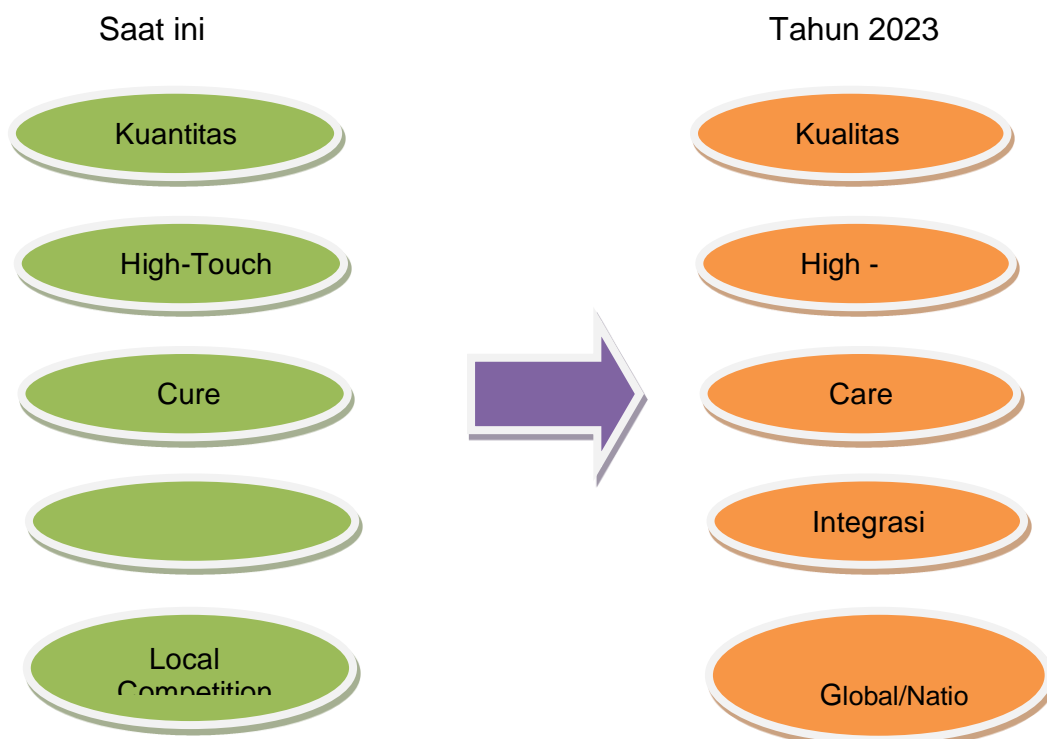
1. Dukungan regulasi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan sektor Kesehatan
2. Dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan kesehatan
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait peningkatan kemitraan dan koordinasi antara Pusat, Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan program pembangunan sektor Kesehatan



Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan diantaranya :

1. Perubahan Pola Penyakit. Terjadinya Pandemi Kesehatan (saat ini merebak wabah Corona Virus Disease (Covid-19)) yang memberikan dampak besar tidak hanya bagi sektor kesehatan tapi hampir seluruh sektor kehidupan dan membutuhkan strategi pencegahan dan penanggulangan yang segera dan tepat.
2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Jumlah penduduk yang besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian pembangunan sektor kesehatan
4. Perubahan nilai sosio kultural masyarakat ditandai dengan :
 - Meningkatnya/berubahnya *needs* dan *kepuasan* masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
 - Masyarakat memasuki era “global digital brain”
 - Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat (hak-hak masyarakat)
5. Perubahan strata demografi ke umur tua
6. Perubahan pada sistem kesehatan

Kondisi ini menuntut dan menyebabkan terjadinya perubahan Paradigma :



Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all policies*).

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Kesehatan masyarakat tidak menjadi tanggung jawab tunggal sektor kesehatan, sektor terkait sangat diperlukan kontribusinya dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam membuat kebijakan serta melaksanakan program dan kegiatan yang berwawasan kesehatan. Kontribusi sektor terkait dirasakan perlu diperkuat agar dapat memberikan kontribusi positif secara berkesinambungan.

Tantangan lainnya adalah kita memasuki era Revolusi Industri 4.0 / Era Digital / Transformasi Digital yang menghilangkan batas antar wilayah dan antar negara, berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang sangat canggih. Perkembangan sistem pelayanan kesehatan dunia yang sangat pesat, tidak dapat dihindari telah memasuki pasar pelayanan kesehatan di Indonesia dan akan menggeser sistem pelayanan kesehatan di negara kita yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat milenial.

Di samping itu, tenaga kesehatan baik tenaga medis, paramedis dan non medis di fasilitas pelayanan kesehatan dituntut profesional, terampil, perhatian (care) dan beretika dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga Kesehatan asing menjadi tantangan utama tenaga kesehatan kita, mereka harus mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing yang saat ini marak memasuki pasar pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Sejalan dengan tingginya tuntutan tersebut, sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dan ditingkatkan agar dapat menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit jumlahnya makin meningkat, artinya dari sisi kuratif dan rehabilitatif terjadi peningkatan demand sementara dari sisi preventif dan promotif masih perlu diperkuat. Hal ini perlu perhatian serius, mengingat aspek preventif dan promotif merupakan strategi utama yang efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tuntutan terbesar terhadap keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Aspek promotif dan preventif ini harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan secara optimal dengan melibatkan lintas sektor terkait / stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat, demikian pula halnya dengan penguatan aspek kuratif dan rehabilitatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan kesehatan olahraga, kesehatan masyarakat serta sumber daya kesehatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan pada 4 aspek yaitu 1) Pelayanan Kesehatan, 2) Kesehatan Masyarakat, 3) Sumber Daya Kesehatan dan 4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pelayanan Kesehatan

Pada aspek pelayanan kesehatan, permasalahan mendasar adalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal. Akses pelayanan kesehatan ke Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya belum optimal serta pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan masih belum memadai. Secara khusus, akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan (DTPK) masih mengalami kendala akibat sulitnya daerah-daerah tersebut dijangkau oleh tenaga kesehatan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan di daerah tersebut terkendala akibat kondisi wilayah yang memiliki keterbatasan, sehingga hal ini berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, kualitas pelayanan kesehatan serta sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit masih belum optimal. Di samping itu, masih perlu ditingkatkan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan baik fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

Kesehatan Masyarakat

Pada aspek kesehatan masyarakat, permasalahan mendasar adalah masih belum optimalnya implementasi pendekatan pelayanan siklus kehidupan “Continuum of Care”, yaitu upaya pelayanan kesehatan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, ibu hamil, ibu menyusui hingga lanjut usia, serta belum optimalnya implementasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Dalam aspek kesehatan masyarakat, terdapat indikator kinerja Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Status Gizi Masyarakat (Prevalensi Balita Kurus (Wasting), Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (Underweight) dan Prevalensi Balita Stunting yang merupakan indikator kinerja utama, namun capaiannya masih berfluktuasi mengalami peningkatan dan penurunan serta belum mencapai target nasional. Kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan masih tinggi. Selain masalah under-nutrisi, kita juga dihadapkan pada masalah over nutrisi, yakni masalah obesitas / kegemukan. Stunting masih menjadi permasalahan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah peningkatan upaya preventif dan promotif secara berkesinambungan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar dapat berperilaku hidup yang sehat dan dapat menjaga kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Sumber Daya Kesehatan

Pada aspek sumber daya kesehatan, permasalahan utama adalah kualitas sumber daya manusia kesehatan belum optimal serta distribusi tenaga kesehatan belum merata. Pada daerah tertentu, di fasilitas pelayanan kesehatan, masih ditemukan adanya kendala berupa kekurangan Dokter, tenaga Perawat ataupun kekurangan tenaga kesehatan lainnya.

Program prioritas Gubernur yang menyediakan layanan ambulans laut untuk memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, perlu dilengkapi dengan fasilitas medis yang memadai dan dilengkapi tenaga Dokter dan Perawat. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah kualitas tenaga kesehatan. Hal ini kadang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Kualitas tenaga kesehatan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan demi menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien dan memuaskan masyarakat.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada aspek pencegahan dan pengendalian penyakit, terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular serta Surveilans dan Imunisasi. Kita menghadapi triple burden disease, dimana masih tinggi kasus penyakit menular seperti HIV, TB, meningkat pula penyakit tidak menular seperti Stroke, Jantung, Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Bahkan saat ini kita menghadapi kondisi yang jauh lebih berat dengan terjadinya pandemi kesehatan global Corona Virus Disease (Covid-19). Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya di sektor kesehatan namun juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan, perekonomian, pariwisata, perdagangan, perhubungan dan berbagai sektor lainnya. Jumlah kematian akibat covid-19 terus meningkat baik yang berasal dari tenaga medis dan paramedis serta korban dari masyarakat umum, demikian pula jumlah kasus terkonfirmasi positif terus mengalami peningkatan.

Hingga saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah total Suspek Covid-19 sebanyak 11.339 Orang, jumlah total Probable sebanyak 237 Orang dengan jumlah meninggal sebanyak 222 Orang (93,7%) dan jumlah total konfirmasi sebanyak 41.697 Orang dengan jumlah meninggal sebanyak 693 Orang.

Kondisi ini memerlukan kesiapan, kewaspadaan, kesigapan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, integrasi dengan seluruh stakeholder terkait dan masyarakat umum agar pandemi dapat segera teratasi dan tidak memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat dan sektor lainnya seperti terjadinya resesi ekonomi dan dampak lain yang dapat mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat.

Hal penting lainnya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Masih diperlukan upaya strategis dalam rangka meningkatkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi tentang kedaruratan/krisis kesehatan dan penanggulangan bencana serta pencapaian 12 jenis layanan dan mutu SPM Kabupaten/Kota.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan isu global yang juga menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. SDGs memiliki 17 tujuan yaitu 1) Tanpa Kemiskinan 2) Tanpa Kelaparan 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4) Pendidikan Berkualitas 5) Kesetaraan Gender 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak 7) Energi Bersih dan Terjangkau 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10) Berkurangnya Kesenjangan 11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 13) Penanganan Perubahan Iklim 14) Ekosistem Lautan 15) Ekosistem Daratan 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kondisi yang digambarkan pada permasalahan di atas menunjukkan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga segala upaya sektor kesehatan yang telah dilakukan hingga saat ini, masih perlu ditingkatkan baik pada aspek preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya akan terwujud, apabila semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan upaya promotif-preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Mengubah pola hidup ke arah promotif-preventif dengan menekankan pada perilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri, mengintegrasikan pembangunan berwawasan kesehatan dan mengedepankan sinergisme dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

32. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pembangunan daerah adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah, diperlukan target pembangunan yang dicapai melalui langkah-langkah strategik, rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program yang relevan dengan sasaran pokok Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), khususnya periode 2020-2024 (Periode IV RPJPD). Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah juga dibutuhkan sosok kepemimpinan di tingkat daerah yang mampu mengimplementasikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah ke dalam berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang tepat. Arah kebijakan dan berbagai program strategis yang dirumuskan di dalam tahapan pembangunan jangka panjang daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi daerah yang kemudian dirumuskan ulang ke dalam perspektif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi dan misi ini merupakan upaya kristalisasi ulang dari visi dan misi daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program strategis dalam perspektif baru, yang akan direalisasikan dalam kerangka percepatan capaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Mencermati potensi yang dimiliki daerah Sulawesi Selatan, baik dari segi ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan didukung oleh kondisi wilayah yang strategis serta nilai-nilai sosial budaya luhur, maka kondisi daya saing daerah Sulawesi Selatan seharusnya mampu menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam realitasnya, belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di urutan 14 dari 34 Provinsi di Indonesia (2016), Rasio jumlah orang miskin dari total jumlah penduduk yaitu 9,48% (2017), tingkat kesenjangan Pembangunan Daerah diukur dari Gini Rasio, yaitu tertinggi kedua di Indonesia (0,429).

Indeks demokrasi yang masih rendah dengan skor 68,53% (2016). Demikian juga dengan tingkat Penggunaan Narkoba yang semakin tinggi (130 ribu pengguna di Sulawesi Selatan), dimana hal ini semakin memperburuk keadaan terutama dilihat dari kualitas sumberdaya manusia. Kondisi di atas bila tidak tertangani dengan baik dan tepat maka akan semakin memperlebar jarak antara apa yang telah direncanakan di dalam RPJPD 2008-2028 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dengan hasil yang dicapai.

Beberapa isu strategis daerah yang menjadi perhatian diantaranya :

- Menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Sayangnya, Pemprov Sulsel saat ini cenderung birokratis, tidak melayani dan kaku. Hal ini membuat Sulsel tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam hasil survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulsel berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari Provinsi lain seperti Jatim, Jabar dan DKI Jakarta
- Selain kinerja birokrasi yang belum optimal, penghambat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan adalah kurangnya kualitas infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Sulawesi Selatan memiliki luas 46.000 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir

- Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pendapatan perkapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48% pada tahun 2016, di atas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulsel pada akhir masa Periode tiga RPJPD, yaitu 6%

- Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan bonus demografi, dimana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 tahun) berada di angka 5,6 juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun, IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada di peringkat 14 dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka Rata-rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas
- Sulawesi Selatan diberkahi oleh sumber daya alam yang berlimpah. Sulawesi Selatan dikenal sebagai lumbung pangan nasional, karena sejak dulu hasil pangan dari petani Sulawesi Selatan sudah berlimpah karena banyaknya sawah dan iklim yang mendukung. Sulawesi Selatan juga memiliki destinasi wisata alam yang sangat indah, seperti Takabonerate di Kepulauan Selayar dan Taman Nasional Bantimurung di Maros. Namun, sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan belum termanfaatkan dengan baik.

Hasil sumber daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah, padahal ada potensi pengolahan yang bisa meningkatkan nilai tambah dan menambah pendapatan petani di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah menjaga kelestarian alam, karena lebih dari 50% wilayah Sulawesi Selatan adalah kawasan hutan dengan berbagai peruntukan. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian SDA yang ada.

- Pandemi Corona Virus (Covid-19) merupakan kondisi pandemi global yang tengah melanda Provinsi Sulawesi Selatan. Kejadian ini menyebabkan banyak korban mengalami kematian akibat infeksi virus corona serta terkonfirmasi positif terinfeksi virus tersebut. Kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, membutuhkan strategi pencegahan dan penanggulangan yang segera dan tepat.
- Revolusi Industri 4.0 / Era Digital / Transformasi Digital / Teknologi Informasi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

***SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF,
INKLUSIF DAN BERKARAKTER***

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Penjelasan tentang rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Inovatif

Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”

Kompetitif

Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”

Produktif

Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”

Inklusif

Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”

Berkarakter

Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”

Berdasarkan rumusan visi, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di sektor kesehatan adalah :

✚ *Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif*

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

✚ *Misi 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter*

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Terkait dengan Visi dan Misi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah beserta UPT Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkannya dengan menghadirkan sektor kesehatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter sehingga terwujud kepuasan masyarakat terhadap pembangunan sektor kesehatan sebagai pengejawantahan hadirnya negara pada kehidupan setiap penduduk.

Hal ini membutuhkan strategi khusus melalui pengintegrasian program pembangunan kesehatan ke dalam program pembangunan strategis lain dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*). Indeks modal manusia (*Human Capital Index*) mencakup parameter:

- 1) *Survival*, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (*probability of survival to age 5*),
- 2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (*expected years of schooling dan harmonized test scores*), dan
- 3) Kesehatan, diukur dari *survival rate* usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami *stunting*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020 - 2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

34. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Lingkungan Strategis Nasional

a. Perkembangan penduduk

Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada penduduk usia non-produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 269.603.400 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 % pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2024 akan naik menjadi sekitar 279.965.200 orang. Proporsi penduduk dengan kelompok umur >65 tahun bertambah dari 6,7% di tahun 2020 menjadi 7,8% di tahun 2024. *Total Fertility Rate* (TFR) diperkirakan tidak mengalami perubahan, tetap 2,1. *Crude Birth Rate* (CBR) turun dari 16,4 menjadi 16,0. Jumlah balita diperkirakan berkurang, dari sebanyak 21.952.000 orang pada tahun 2020 menjadi 21.858.400 pada tahun 2024. Sebaliknya jumlah penduduk berusia > 45 tahun bertambah, dari sebanyak 76.130.400 pada tahun 2020 menjadi 85.506.500 jiwa pada tahun 2024. Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 2020 sebanyak 72.138.600 jiwa menjadi 73.512.600 jiwa pada tahun 2024.

b. Disparitas status kesehatan antar wilayah.

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan gizi buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Beberapa data kesenjangan bidang kesehatan dapat dilihat pada hasil Riskesdas 2018. Proporsi bayi gizi buruk dan gizi kurang, terendah di Provinsi Kepulauan Riau (13%) dan tertinggi di Provinsi NTT (29,5%) atau tiga kali lipat dibandingkan yang terendah.

Kesenjangan yang cukup memprihatinkan terlihat pada bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, antara lain dalam hal keteraturan penimbangan balita (penimbangan balita ≥ 8 kali ditimbang dalam 12 bulan terakhir), terendah di Provinsi Sumatera Utara (hanya 22,5%) dan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (77,6%).

c. Jaminan Kesehatan Nasional.

Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan atau *supply side* dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk pembiayaan. Sejak tahun pertama beroperasi, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Secara sederhana, defisit terjadi ketika klaim lebih besar dari pendapatan premi. Hal ini disebabkan karena pembayaran premi jauh lebih kecil dari perkiraan kebutuhan secara aktuarial. Dari analisis data yang ada sampai tahun 2018, terlihat bahwa *claim ratio* paling tinggi terjadi pada PBU (peserta mandiri) sampai mendekati 500%. Sementara PPU untuk Klas I dan Klas II cenderung rendah (tidak sampai 100%). Untuk PBI *claim ratio* terus naik, sampai akhir tahun 2018 sudah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa untuk peserta mandiri telah terjadi *adverse selection* (peserta yang risiko tinggi dan sudah sakit cenderung ikut JKN-BPJS Kesehatan). Dalam konteks ini, tampak seakan-akan PBI dan PPU memberikan subsidi kepada peserta mandiri.

Dampak dari defisit BPJS telah menyebabkan gangguan *cash flow* rumah sakit, yang kemudian menyebabkan gangguan rantai pasok obat dan bahan medis habis pakai rumah sakit. Efek dominonya mengganggu *cash flow* industri farmasi, yang pada ujungnya bisa mengancam pemutusan hubungan kerja karyawan industri farmasi.

Untuk membenahi penyelenggaraan JKN harus dilakukan analisis secara komprehensif dan holistik terkait beberapa hal:

- 1) Kemungkinan membatasi paket manfaat – sehingga paket manfaat tidak harus tidak terbatas (*un-limited*), untuk diarahkan pada pelayanan kesehatan esensial (pelayanan kesehatan dasar),
- 2) Kemungkinan menerapkan mekanisme *cost-sharing* dan *copayment*,

- 3) Melakukan audit pelayanan kesehatan di FKRTL lebih ketat untuk kendali mutu dan kendali biaya,
- 4) Memperkuat FKTP untuk mampu melayani penyakit dasar (144 penyakit), dan
- 5) Menaikkan iuran (premi) sesuai dengan nilai aktuarial yang rasional.

Menurut peta jalan JKN, ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup JKN. Kepesertaan semesta JKN membawa konsekuensi terhadap tuntutan ketersediaan pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, sehingga terjadi keadilan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, baik antar wilayah, antar kelas sosial ekonomi, dan antara penduduk desa dan kota.

d. Pembagian urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Urusan kesehatan juga menjadi salah satu dari enam urusan konkuren (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, merupakan jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM yang dapat menjadi bahan pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepala daerah, serta akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan JKN. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif-preventif sehingga diharapkan berdampak pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Kementerian Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah menetapkan bahwa SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan di dalam SPM Bidang Kesehatan ini lebih terfokus pada pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus mencapai 100% (seratus persen).

e. Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga

Dalam rangka melakukan penguatan promotif-preventif (paradigma sehat) dan penguatan pelayanan kesehatan, pada periode Renstra 2015-2019 telah diluncurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang pada dasarnya adalah mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga.

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan diharapkan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perlu dilakukan review ulang indikator PIS-PK, dimungkinkan adanya muatan lokal sesuai masalah kesehatan lokal, desentralisasi manajemen pengelolaan data PIS-PK, serta penekanan bahwa PIS-PK adalah alat manajemen puskesmas yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf puskesmas dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan upaya kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

f. Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, kebijakan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tahun 2020-2024 merupakan periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada periode ini, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yaitu memiliki pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Periodisasi pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia.

Pencapaian hasil implementasi reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan periode sebelumnya (2015-2019) menjadi dasar dalam penguatan birokrasi Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pada tahun 2025, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Adanya arahan Presiden untuk membangun reformasi birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan sehingga tercipta birokrasi pemerintahan yang lebih lincah, sederhana, adaptif, dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui peningkatan performa/kinerjanya menjadi lebih efektif dan produktif, penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan, dll. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan terhadap 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus pembangunan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan ini perlu diadaptasi secara kontekstual di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan agar tercipta *value* baru di masing-masing satuan kerja yang mendukung internalisasi perubahan *mind-set* dan *culture-set* nya. Pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target yang diprioritaskan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya.

B. Lingkungan Strategis Regional

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016, mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan menuntut peningkatan daya saing (*competitiveness*) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Pembinaan dan akreditasi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi manajemennya. Tatanan regional ini akan berarti kemudahan untuk penetrasi pasar di dalam negeri oleh kompetitor pelaku usaha bidang kesehatan dari luar. Arus modal untuk bisnis di bidang kesehatan semakin terbuka, sehingga mereka yang memiliki mutu dan strategi yang baik yang akan bertahan. Dengan demikian, daya saing tenaga kesehatan dalam negeri, institusi-institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri harus ditingkatkan.

C. Lingkungan Strategis GLOBAL

a. Komitmen global

Beberapa hal terkait komitmen Indonesia sebagai bagian dari *World Health Organization* (WHO) tetap dilanjutkan dan menjadi perhatian serius, misalnya dalam pelaksanaan ketentuan *International Health Regulations* (IHR) 2005 yang menuntut kemampuan deteksi dini, pencegahan dan respon cepat terhadap munculnya penyakit/kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (*to prevent, to detect, to respond*). Pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) sebagai pintu masuk negara maupun wilayah harus mampu melaksanakan upaya merespon terhadap adanya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC). Pelaksanaan agenda kesehatan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai kontinum dari *Millenium Development Goals* (MDGs), liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam konteks WTO – khususnya *General Agreement on Trade in Service, Trade Related Aspects on*

Intellectual Property Rights serta *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklores* (GRTKF) merupakan bentuk-bentuk komitmen global yang masih perlu disikapi dengan serius dan penuh kehati-hatian.

b. General Programme of Work – GPW13 WHO

Kendati secara umum sudah banyak keberhasilan yang diraih dalam bidang kesehatan, namun berbagai masalah kesehatan masih mendera dunia. Masyarakat dihadapkan pada semakin kompleksnya pengaruh berbagai ancaman terhadap kesehatan, seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Masyarakat juga masih menghadapi penderitaan akibat penyakit menular, di samping peningkatan penyakit tidak menular. Komplikasi kehamilan dan persalinan, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, serta cedera, seluruhnya membutuhkan aksi nyata. Lebih dari setengah populasi dunia masih tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan karena hambatan finansial. Dunia juga menghadapi ancaman kedaruratan kesehatan berdampak besar (epidemi, pandemi, konflik, bencana alam dan teknologi) dan meningkatnya resistensi antimikroba. Banyak dari ancaman terhadap kesehatan tersebut berakar pada inekualitas sosial, politik, ekonomi, dan gender serta determinan kesehatan lainnya.

WHO merupakan otoritas dunia yang mengarahkan, mengkoordinasikan dan mendukung upaya lintas negara dalam mencapai komitmen tujuan 3 SDGs yang menekankan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin hidup sehat dan mempromosikan *well-being* untuk seluruh usia (*ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*). Sebagai acuan kegiatan tahun 2019-2023, WHO telah menetapkan Program Kerja Umum (GPW) 13 WHO, yang meliputi 2 biennium, yakni biennium 2020- 2021 dan biennium 2022-2023. Program kerja ini merupakan kelanjutan dari program kerja sebelumnya, GPW 12, 2014-2019.

Visi GPW 13 ditetapkan berdasarkan SDGs yang berasal dari ayat 1 konstitusi WHO, dunia dengan seluruh penduduk mencapai standar kesehatan tertinggi yang memungkinkan dicapai (*A world in which all people attain the highest possible standard of health and well-being*), dengan misi mempromosikan kesehatan (*promote health*), mempertahankan dunia tetap aman (*keep the world save*), dan melayani masyarakat rentan (*serve the vulnerability*). Nilai-nilai yang diacu WHO meliputi komitmen terhadap hak asasi manusia, universalitas dan ekuitas.

Struktur GPW 13 meliputi tiga prioritas interkoneksi strategis untuk menjamin *healthy lives and well-being* untuk seluruh usia, yakni: mencapai *universal health coverage*, pengelolaan kedaruratan kesehatan dan mempromosikan penduduk yang lebih sehat.

WHO memiliki fokus pada promosi kesehatan, khususnya meningkatkan kesehatan masyarakat rentan serta mengurangi inekuitas. Tujuannya adalah *leaving no one behind*, memberikan peluang tidak hanya umur panjang tetapi juga hidup sehat. Ketidaktahuan tentang kesehatan (*poor health literacy*) bersamaan dengan lemahnya kebijakan promosi kesehatan membuat kesulitan bagi masyarakat untuk membuat keputusan pilihan kesehatan untuk diri dan keluarga mereka. Di sisi lain, *healthy life expectancy*, tidak otomatis meningkat seiring peningkatan umur harapan hidup. Meningkatnya umur seringkali diikuti dengan peningkatan morbiditas dan penurunan fungsi.

WHO juga berkomitmen fokus pada pencapaian dan kemanfaatan *Universal Health Coverage* (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan (*financial risk protection*), akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang bermutu dan akses terhadap keselamatan, efektifitas, mutu serta ketersediaan dan kecukupan vaksin dan obat untuk semua. Esensi dari UHC adalah akses universal untuk memperkuat sistem kesehatan berorientasi manusia. Pelayanan berbasis komunitas, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan komponen utama dalam pencapaian UHC. Tantangan utama dalam mencapai UHC adalah hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan, bisa berupa hambatan ekonomi, geografi, epidemiologi atau budaya.

Pelayanan kesehatan primer yang efektif dan efisien membutuhkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, yang didukung oleh pendekatan kesehatan digital dan sistem inovasi, kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap obat, vaksin, dan produk kesehatan. Juga perlu didukung pembiayaan dan tata kelola yang memadai, termasuk penguatan sistem informasi kesehatan dan peningkatan advokasi.

Setiap negara rentan terhadap epidemi dan kedaruratan, sehingga deteksi dini, *risk assessment*, dan *sharing* informasi adalah sesuatu yang esensial untuk menghindari kesakitan, cedera, kematian, dan kerugian ekonomi dalam skala luas. Peningkatan deteksi seluruh bahaya kedaruratan kesehatan dan kapasitas manajemen risiko (deteksi dan pencegahan risiko, kesiapan kedaruratan, respons terhadap implementasi

International Health Regulations dan Kerangka Kerja Sendai untuk Reduksi Risiko Bencana, serta perubahan iklim) penting untuk segera dilakukan. Perlu juga dibuat Rencana Aksi Nasional untuk mengimplementasikan dan mempertahankan kapasitas kritis untuk melayani masyarakat dengan lebih baik pada tingkat lokal, nasional dan global.

Sistem Kesehatan Nasional yang lebih kuat dan mantap akan memberikan kesiapsiagaan dini atas kemungkinan dan respons kedaruratan. Perlu juga dilakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi (*to detect*), mencegah (*prevent*) dan merespons (*respond*) *new and emerging diseases* dan sumber risiko lain. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain menjamin pemberian pelayanan *essential life-saving*, integrasi vaksinasi dengan kampanye pencegahan epidemik lainnya, implementasi strategi pengendalian vektor baru, menjamin akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta integrasi kesehatan reproduksi dalam strategi dan program nasional.

Pendekatan WHO untuk kedaruratan kesehatan ditujukan untuk menjamin populasi yang terdampak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan *life-saving* yang esensial dan intervensi kesehatan masyarakat; seluruh negara memiliki mitigasi risiko terhadap bahaya ancaman infeksi; seluruh negara menilai kesenjangan kritis atas kesiapan kedaruratan, termasuk kapasitas inti dalam *International Health Regulations* dan kapasitas pengelolaan seluruh risiko bahaya kedaruratan kesehatan.

c. Deklarasi Astana dan Penguatan *Primary Health Care* (PHC)

Negara menjamin pemenuhan hak dasar setiap manusia untuk pencapaian standar kesehatan tertinggi. Menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap tingkat pemerintahan dalam menjaga hak setiap penduduk untuk mencapai standar kesehatan tertinggi yang mampu dicapai. Kondisi ini dapat diperoleh melalui aksi multisektor, melibatkan pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat setempat melalui penguatan PHC, memperhatikan determinan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kesehatan dan mengurangi faktor risiko dengan mengarustamakan pendekatan kesehatan di dalam seluruh kebijakan, melibatkan pemangku kepentingan dalam pencapaian sehat untuk semua (*health for all*), *leaving no one behind*, menjamin pelaksanaan *continuum of care* dan pelayanan kesehatan esensial melalui penyediaan alokasi sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk memperkuat PHC, membangun PHC yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan infrastruktur PHC.

Primary Health Care diyakini menjadi salah satu solusi dalam mencapai agenda untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 dan kesehatan untuk semua, serta menjadi pendekatan yang paling inklusif, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta kesejahteraan sosial. Konferensi Global mengenai PHC di Astana, Kazakhstan, 2018, telah sepakat menggalang komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memprioritaskan, mempromosikan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem kesehatan yang kuat; layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, aman, komprehensif, terpadu, mudah diakses, tersedia dan terjangkau untuk semua orang, dengan pelayanan yang dilingkupi oleh rasa hormat dan bermartabat oleh profesional kesehatan yang terlatih baik, terampil, termotivasi dan berkomitmen.

Primary Health Care yang efektif akan dapat mengatasi meningkatnya beban penyakit tidak menular, kematian dini karena penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, gaya hidup dan perilaku yang tidak sehat, aktivitas fisik rendah dan diet tidak sehat. Pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan paliatif harus dapat diakses oleh semua. Agar berfungsi optimal, PHC juga harus dapat diakses, aman, berkualitas tinggi, komprehensif, efisien, adil (*equitable*), diterima (*acceptable*) dan terjangkau (*affordable*), berkelanjutan, terpadu, *people-centred*, mampu mendeteksi dan merespon penyakit-penyakit menular dan tidak menular.

d. Disrupsi, teknologi, dan era digital

Aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan yang ditandai dengan meluasnya digitalisasi, optimalisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan membuat perubahan besar dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini mengalami kondisi VUCA (*Volatile, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity*) karena dihadapkan pada disrupsi dalam pelayanan kesehatan (*disruption in healthcare*). Disrupsi diartikan sebagai perubahan mendasar yang menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan pembaharuan yang mendasar. Teknologi medis yang semakin canggih (*artificial narrow intelligence, robotics, genomics*); revolusi dalam *hardware* dan *software* dalam pelayanan kesehatan, *telemedicine*, virtual dan *augmented reality*; penetrasi akses internet, telepon *mobile* dan *smartphone*; melimpahnya informasi mengenai kesehatan dari berbagai sumber; masyarakat yang semakin sadar dan cerdas; peningkatan biaya penyediaan pelayanan kesehatan modern, menjadi berbagai tantangan yang hadir di era disruptif. Pelayanan kesehatan ke depan dituntut akan semakin terkoneksi (*hyperconnected healthcare*). Inovasi-inovasi berbasis digital di dalam pelayanan kesehatan serta teknologi- teknologi terobosan (*cloud computing, supercomputing, big data, Internet of Things – IoT*) akan semakin mengambil peran penting dalam pelayanan kesehatan.

35. Penentuan Isu-Isu Strategis

Menganalisis permasalahan yang terjadi, dapat dikemukakan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Kesehatan
4. Pencapaian SPM dan Sustainable Development Goals (SDGs)
5. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita Stunting
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Era Revolusi Industri 4.0 (Era Digital / Teknologi Informasi)

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
				2019 (Baseline)	2020	2021	2022	2023
I	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	% Area Perubahan (Reform) Reformasi Birokras	-	100%	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP OPD	77,24%	78%	79%	80%	81%
			% Temuan Material	4%	3%	2%	1%	0%
IV	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	70,43 Tahun	70,50 Tahun	70,60 Tahun	70,70 Tahun	70,80 Tahun
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	94 /100.000 KH	93 /100.000 KH	92 /100.000 KH	91 /100.000 KH	90 /100.000 KH
			Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	6 /1.000 KH	6 /1.000 KH	5 /1.000 KH	5 /1.000 KH	4 /1.000 KH
			Prevalensi Balita Stunting (%)	30,59%	27,59%	24,59%	21,59%	18,59%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treats) sebagai berikut :

ANALISIS SWOT		
Faktor Eksternal	Peluang (O) : 1. <u>Regulasi yang mendukung</u> 2. <u>Dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan kesehatan</u> 3. <u>Koordinasi antara instansi baik Pusat , daerah dan stakeholder</u>	Tantangan (T): 1. <u>Pandemik Kesehatan</u> 2. <u>Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kesehatan (PHBS)</u> 3. <u>Jumlah Penduduk yang besar</u> 4. <u>Perubahan Nilai Sociokultural Masyarakat (perubahan needs dan kepuasan masy terhadap pelayanan kesehatan, era "global digital brain, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masy)</u> 5. <u>Perubahan strata demografi ke umur tua</u> 6. <u>Perubahan sistem kesehatan</u>
Faktor Internal	Kekuatan (S) 1. <u>Struktur Organisasi memadai;</u> 2. <u>Terdapatnya jumlah tenaga dan kualitas yang memadai;</u> 3. <u>Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai.</u> 4. <u>Kinerja pelayanan rata-rata mencapai target yang ditetapkan</u>	Alternatif Strategi (S-O): 1. <u>Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan</u> 2. <u>Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan</u>
	Kelemahan (W): 1. <u>Tata Kelola organisasi belum optimal</u> 2. <u>Distribusi tenaga yang belum merata</u> 3. <u>Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;</u>	Alternatif Strategi (S-T): 1. <u>Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (pandemik kesehatan)</u> 2. <u>Peningkatan upaya promotif dan preventif</u> 3. <u>Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP dan UKM)</u>
	Kelemahan (W-O): 1. <u>Optimalisasi Tata Kelola Organisasi</u> 2. <u>Pemerataan distribusi tenaga kesehatan;</u> 3. <u>Optimalisasi Fungsi Pengelolaan Aset Daerah;</u>	Alternatif Strategi (W-T): 1. <u>Perlu peningkatan kualitas SDM</u> 2. <u>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan</u> 3. <u>Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan</u>

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terhadap Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”				
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan serta pengendalian penyakit	Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kualitas SDM Kesehatan serta Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
			Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Umur Harapan Hidup	70,43 Tahun	70,50 Tahun	70,60 Tahun	70,70 Tahun	70,80 Tahun	70,80 Tahun	
2	Angka Kematian Ibu	94 /100.000 Kelahiran Hidup	93 /100.000 Kelahiran Hidup	92 /100.000 Kelahiran Hidup	91 /100.000 Kelahiran Hidup	90 /100.000 Kelahiran Hidup	90 /100.000 Kelahiran Hidup	
3	Angka Kematian Bayi	6 /1.000 Kelahiran Hidup	6 /1.000 Kelahiran Hidup	5 /1.000 Kelahiran Hidup	5 /1.000 Kelahiran Hidup	4 /1.000 Kelahiran Hidup	4 /1.000 Kelahiran Hidup	
4	Prevalensi Balita Stunting	30,59%	27,59%	24,59%	21,59%	18,59%	18,59%	

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditentukan oleh keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan dan pencapaian indikator kinerja pada masing-masing UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah kerangka kebijakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Perubahan Rencana Strategis ini menjabarkan lebih lanjut kebijakan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Strategis merupakan perencanaan tingkat (menengah) Perangkat Daerah yang perlu difahami oleh pengambil kebijakan dan pelaksana pada semua tingkatan dalam rangka menjamin arah pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai outcome dan impact yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra merupakan pedoman perencanaan tahunan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD) selama 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 dan diharapkan akan dijalankan berlandaskan semangat integritas tinggi dan kolaborasi multi-sektoral dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**.

Makassar, November 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

dr. H. MUHAMMAD ICHSAN MUSTARI, MHM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660217 199803 1 004

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kesehatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	% Area Perubahan (Reform) Reformasi Birokrasi						-					100%	69,759,700,000	100%	70,953,000,000	100%	90,001,000,000	100%	230,713,700,000	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD				77,24 %					79%	69,759,700,000	80%	70,953,000,000	81%	90,001,000,000	81%	230,713,700,000	Dinas Kesehatan	
			% Temuan Material				4 %					2%		1%		0%		0%		Dinas Kesehatan	
				01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Realisasi kegiatan Perangkat Daerah; % ASN Perangkat Daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik; % Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100% 100% 4%						100% 100% 2%	69,759,700,000	100% 100% 1%	70,953,000,000	100% 100% 0%	90,001,000,000	100% 100% 0%	230,713,700,000	Dinas Kesehatan
				01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%						100 %	192,000,000	100 %	217,000,000	100 %	250,000,000	100 %	659,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen						3 Dokumen	24,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	40,000,000	9 Dokumen	94,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen						1 Dokumen	84,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	274,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen						1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,000,000	3 Dokumen	33,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen						1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	9,000,000	3 Dokumen	24,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen						1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	9,000,000	3 Dokumen	24,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	6 Dokumen						6 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	70,000,000	6 Dokumen	80,000,000	18 Dokumen	210,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%						100%	66,286,700,000	100%	67,295,000,000	100%	85,319,000,000	100%	218,900,700,000	Dinas Kesehatan
				01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ;	1 Tahun						1 Tahun	66,000,000,000	1 Tahun	67,000,000,000	1 Tahun	85,000,000,000	3 Tahun	218,000,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan						12 Laporan	8,500,000	12 Laporan	9,000,000	12 Laporan	10,000,000	36 Laporan	27,500,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi;	100 Laporan;					100 Laporan	173,700,000	100 Laporan	175,000,000	100 Laporan	190,000,000	300 Laporan	538,700,000	Dinas Kesehatan
				01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	1 Laporan					1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	5,000,000	3 Laporan	10,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang di susun	18 Laporan					18 Laporan	100,000,000	18 Laporan	105,000,000	18 Laporan	110,000,000	54 Laporan	315,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Laporan					1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	4,000,000	3 Laporan	9,500,000	Dinas Kesehatan
				01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%					100%	360,000,000	100%	385,000,000	100%	450,000,000	100%	1,195,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	178,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	628,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah di SKPD;	1 Laporan					1 Laporan	182,000,000	1 Laporan	185,000,000	1 Laporan	200,000,000	3 Laporan	567,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	87					87	856,000,000	88	890,000,000	89	1,075,000,000	89	2,821,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	270 Pasang					508 Pasang	200,000,000	508 Pasang	230,000,000	508 Pasang	400,000,000	1.524 Pasang	830,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dikelola Administrasi Kepegawaiannya;	1.000 Orang					1.000 Orang;	481,000,000	1.000 Orang	485,000,000	1.000 Orang	500,000,000	1.000 Orang	1,466,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-					30 Orang	100,000,000	30 Orang	100,000,000	30 Orang	100,000,000	90 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	-					40 Orang	75,000,000	40 Orang	75,000,000	40 Orang	75,000,000	200 Orang	322,166,000	Dinas Kesehatan
				01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%					100%	835,000,000	100%	876,000,000	100%	1,107,000,000	100%	2,818,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	35 unit					35 unit	130,000,000	35 unit	140,000,000	35 unit	150,000,000	35 Unit	420,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Sesuai Kebutuhan;	20 Jenis					20 Jenis	400,000,000	20 Jenis	430,000,000	20 Jenis	650,000,000	20 Jenis	1,480,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	30 Jenis					30 Jenis	8,000,000	30 Jenis	9,000,000	30 Jenis	10,000,000	30 Jenis	27,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Koordinasi	2.136 Orang					2.136 Orang	297,000,000	2.136 Orang	297,000,000	2.136 Orang	297,000,000	2.136 Orang	891,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi	30 Orang					30 Orang		30 Orang		30 Orang			Dinas Kesehatan	
				01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					100%	230,000,000	100%	240,000,000	100%	400,000,000	100%	870,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia sesuai Kebutuhan	30 Buah					30 Buah	230,000,000	30 Buah	240,000,000	30 Buah	400,000,000	90 Buah	870,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					100%	700,000,000	100%	720,000,000	100%	850,000,000	100%	2,270,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik;	12 Bulan					12 Bulan	700,000,000	12 Bulan	720,000,000	12 Bulan	850,000,000	36 Bulan	2,270,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	100%					100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	550,000,000	100%	1,180,000,000	Dinas Kesehatan
				01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara	52 Unit					52 Unit	300,000,000	52 Unit	330,000,000	52 Unit	550,000,000	52 Unit	1,180,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dibayarkan Pajak	52 Unit					52 Unit		52 Unit		52 Unit		52 Unit		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup						70,43 Tahun					70,60 Tahun	73,757,314,342	70,70 Tahun	74,594,950,483	70,80 Tahun	100,604,115,937	70,80 Tahun	248,956,380,762	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu				94/100.000					92/100.000		91/100.000		90/100.000		90/100.000		Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi				6/1.000					5/1.000	73,757,314,342	5/1.000	74,594,950,483	4/1.000	100,604,115,937	4/1.000	248,956,380,762	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Stunting				30,59%					24,59%		21,59%		18,59%		18,59%		Dinas Kesehatan
				1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	85%					87%		90%		100%		100%		Dinas Kesehatan
						% Rumah Sakit Regional yang terbangun dan ditingkatkan	17% (1 Unit)					33		50		100%		100%		Dinas Kesehatan
						% Penduduk/Warga pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%					100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan
						% Penduduk/Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%					100%	68,130,314,342	100%	68,752,950,483	100%	93,865,115,937	100%	230,748,380,762	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						% Anak yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	5,5%					6,5%				7%			7,5%			Dinas Kesehatan
						% Ibu Hamil yang mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	11%					12%				12,5%			13%			Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	-					100%	36,665,997,342	100%	37,115,000,000	100%	3,290,000,000	100%	77,070,997,342			Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Regional yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	1 Unit					2 Unit	30,000,000,000	3 Unit	30,000,000,000	0 Unit	0	6 Unit	60,000,000,000			Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan (UPK)	-					10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	1,000,000,000	10 Jenis	2,000,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah Alat Kesehatan di Rumah Sakit Regional yang diadakan	1 Paket					2 Paket	1,860,000,000	3 Paket	2,000,000,000	0 Paket	0	6 Paket	3,860,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah Alat Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) yang diadakan	-					1 Paket	800,000,000	1 Paket	800,000,000	0 Paket	0	2 Paket	1,600,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah Alat Kesehatan Rest Area yang diadakan	-					4 Paket	900,000,000	6 Paket	1,000,000,000	0 Paket	0	10 Paket	1,900,000,000			Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Rumah Sakit Regional yang tersedia	1 Paket					2 Paket	400,000,000	3 Paket	450,000,000	0 Paket	0	6 Paket	850,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah pengadaan media KIE Kesehatan Haji yang tersedia	-					1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	40,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah media KIE Imunisasi yang tersedia	-					1 Paket	25,997,342	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	25,997,342			Dinas Kesehatan
						Jumlah Prasarana Rumah Sakit Regional yang tersedia	1 Paket					2 Paket	400,000,000	3 Paket	450,000,000	0 Paket	0	6 Paket	850,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah format Pencatatan hepatitis yang tersedia	-					100 Exemplar	20,000,000	100 Exemplar	20,000,000	100 Exemplar	40,000,000	300 Exemplar	80,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah format Pencatatan Program TB, TB MDR dan TB HIV yang tersedia	1 Paket					1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	40,000,000	3 Paket	80,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah format pencatatan dan pelaporan Program P2 Kusta yang tersedia	-					4 Paket Format	10,000,000	4 Paket Format	10,000,000	4 Paket Format	20,000,000	12 Paket Format	40,000,000			Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan di Rumah Sakit Regional yang tersedia dan terpelihara	-					2 Paket	400,000,000	2 Paket	450,000,000	2 Paket	800,000,000	6 Paket	1,650,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah Rapid Test Demam Berdarah Dengue (DBD) yang tersedia	-					48 Paket	60,000,000	48 Paket	60,000,000	48 Paket	60,000,000	144 Paket	180,000,000			Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit Regional yang dipelihara	1 Paket					2 Paket	150,000,000	3 Paket	200,000,000	0 Paket	0	6 Paket	350,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah Cold Room yang dipelihara	1 Unit					1 Unit	40,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	120,000,000			Dinas Kesehatan
						Jumlah Mobil Angkutan Vaksin yang dipelihara	1 Unit					1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	60,000,000			Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah Kapal Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan terpelihara	-					2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	100,000,000	2 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab/Kota dengan distribusi Vaksin yang berkualitas	6 Kab/Kota					10 Kab/Kota	100,000,000	10 Kab/Kota	135,000,000	10 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	385,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Item Obat yang disiapkan sebagai Buffer Stock Provinsi	50 item obat					25 item obat	200,000,000	25 item obat	200,000,000	25 item obat	200,000,000	25 item obat	600,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Obat-Obatan, Bahan Kimia, Bahan Laboratorium, Bahan Logistik Kesehatan	-					150 Jenis	650,000,000	150 Jenis	650,000,000	150 Jenis	800,000,000	150 Jenis	2,100,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan layanan kesehatan UKP dan UKM Rujukan	-					100%	30,300,317,000	100%	30,434,950,483	100%	89,065,115,937	100%	149,800,383,420	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Ambulans Laut siap siaga	6 Unit					6 unit	300,000,000	7 unit	400,000,000	8 unit	800,000,000	8 unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	-					30 Orang	20,000,000	30 Orang	20,000,000	30 Orang	20,000,000	90 Orang	60,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	-					24 Kab/kota	40,000,000	24 Kab/kota	40,000,000	24 Kab/kota	40,000,000	24 Kab/kota	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota sasaran Bimtek dan Supervisi Supportif Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan	-					24 Kab/Kota	50,000,000	24 Kab/Kota	50,000,000	24 Kab/Kota	50,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Pengelola Program Penanggulangan Bencana/Krisis Kesehatan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelolaan Program Bencana/Krisis Kesehatan Kab/Kota	-					24 Orang	40,000,000	24 Orang	40,000,000	24 Orang	40,000,000	72 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah paket penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan Krisis Kesehatan	-					2 paket	250,000,000	2 paket	300,000,000	2 paket	460,000,000	6 Paket	1,010,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang dipelihara (Bencana dan KLB)	-					36 unit	250,000,000	43 unit	349,633,483	57 unit	450,000,000	57 unit	1,049,633,483	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pelatihan BTCLS (Basic Trauma and Cardiac Life Support)	-					4 angkatan	300,000,000	4 angkatan	350,000,000	4 angkatan	450,000,000	12 angkatan	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Medis dan Paramedis	-					4 angkatan	300,000,000	4 angkatan	350,000,000	5 angkatan	500,000,000	13 angkatan	1,150,000,000	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Sosialisasi Krisis Kesehatan	-					2 kali	250,000,000	2 kali	250,000,000	2 kali	350,000,000	4 kali	850,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah hari pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemantauan kejadian krisis kesehatan	-					365 hari	200,000,000	365 hari	200,000,000	365 hari	200,000,000	1.095 hari	600,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kabupaten/Kota yang diberi penguatan dan fasilitas Public Safety Centre (PSC)	-					24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	450,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Ambulans Laut yang diadakan	6 Unit					1 unit	1,000,000,000	1 unit	1,000,000,000	1 unit	2,500,000,000	3 unit	4,500,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Ambulans Laut yang dipelihara	6 Unit					6 unit	150,000,000	7 unit	200,000,000	8 unit	350,000,000	8 unit	700,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Ambulans Darat yang diadakan	12 unit					3 unit	1,000,000,000	3 unit	1,000,000,000	3 unit	2,000,000,000	9 unit	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kendaraan Operasional Roda Empat (R-4) yang diadakan (Bencana/Krisis Kesehatan)	-					1 unit	350,000,000	0 unit	0	1 unit	600,000,000	2 unit	950,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Perahu Karet yang diadakan (Bencana/Krisis Kesehatan)	-					2 unit	150,000,000	5 unit	300,000,000	5 unit	600,000,000	12 unit	1,050,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah pemakaian bahan bakar untuk pemanasan dan operasional (Bencana/Krisis Kesehatan)	-					5000 liter	50,000,000	10000 liter	100,000,000	12500 liter	125,000,000	27500 liter	275,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah kejadian Krisis Kesehatan yang ditangani	-					40 kejadian	350,000,000	40 kejadian	400,000,000	40 kejadian	555,000,000	120 kejadian	1,305,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Aplikasi Sistem Panggilan Darurat Terpadu (SPDT) yang tersedia	-					1 Paket	3,000,000,000	1 Paket	3,000,000,000	1 Paket	5,000,000,000	3 Paket	11,000,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Mobil Ambulans BSB yang diadakan	-					5 Unit	2,000,000,000	5 Unit	2,000,000,000	5 Unit	3,000,000,000	15 Unit	7,000,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah KLB Penyakit Menular yang tertangani	-					15 Kejadian	250,000,000	15 Kejadian	250,000,000	15 Kejadian	350,000,000	45 Kejadian	850,000,000	Dinas Kesehatan
						Tertanganinya Pandemi Kesehatan (Covid-19 dan Pandemi Kesehatan lainnya)	-					100%	9,636,000,000	100%	10,000,000,000	100%	56,150,798,937	100%	75,786,798,937	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kab/Kota sasaran pemantauan Antenatal Care Terpadu	-					10 Kab/Kota	75,000,000	14 Kab/Kota	80,000,000	24 Kab/Kota	90,000,000	24 Kab/Kota	245,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota sasaran Audit Maternal dan Perinatal	-					24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	125,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	375,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Hasil Pengkajian Kasus Kematian Maternal dan Perinatal oleh Tim AMP Provinsi	-					35 Orang	90,000,000	35 Orang	100,000,000	35 Orang	110,000,000	105 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota sasaran kegiatan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	-					24 Kab/Kota	60,000,000	24 Kab/Kota	75,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	235,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Pelayanan Neonatal Esensial	-					30 Orang	90,000,000	30 Orang	100,000,000	30 Orang	110,000,000	90 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Regulasi Penurunan AKI dan AKB	-					30 Orang	82,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang	82,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Rutin Tim AMP Provinsi	-					35 Orang	100,000,000	35 Orang	135,000,000	35 Orang	150,000,000	105 Orang	385,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Balita Terintegrasi	-					0 Orang	0	30 Orang	125,000,000	40 Orang	150,000,000	70 Orang	275,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kab/Kota sasaran pelaksanaan Home Care	-					12 Kab/Kota	75,000,000	12 Kab/Kota	100,000,000	12 Kab/Kota	120,000,000	24 Kab/Kota	295,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Pemenang Lomba Lansia Sehat , Aktif dan Produktif di Kab/Kota	5 kab/Kota					0 Kab/Kota	0	12 Kab/Kota	75,000,000	15 Kab/Kota	100,000,000	15 Kab/Kota	175,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Lansia dan Geriatri	-					30 Orang	85,000,000	30 Orang	90,000,000	30 Orang	92,000,000	110 Orang	267,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Pelaksanaan Pelayanan Santun Lansia di Tingkat Provinsi	-					0 Orang	0	50 Orang	80,000,000	50 Orang	80,000,000	50 Orang	160,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Intervensi Micronutrient pada Anak Umur 6-24 Bulan	-					4.878 Orang	700,000,000	35.000 Orang	700,000,000	35.000 Orang	700,000,000	74.878 Orang	2,100,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Intervensi Gizi pada Ibu Hamil	-					5.642 Orang	1,000,000,000	26.810 Orang	1,000,000,000	26.810 Orang	3,000,000,000	59.262 Orang	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Anak yang terlaksana	-					2 Kab/Kota	250,000,000	24 Kab/Kota	350,000,000	24 Kab/Kota	550,000,000	24 Kab/Kota	1,150,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah pendampingan dalam pemanfaatan paket intervensi Gizi pada Ibu Hamil yang terlaksana	-					2 Kab/Kota	250,000,000	24 Kab/Kota	350,000,000	24 Kab/Kota	550,000,000	24 Kab/Kota	1,150,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pegawai Dinkes yang diukur kebugarannya	-					50 Orang	25,000,000	50 Orang	25,000,000	50 Orang	25,000,000	150 Orang	75,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah kab/kota yang dilakukan pengamatan penyakit akibat kerja di Daerah Migran	-					2 Kab/kota	10,000,000	2 Kab/kota	10,000,000	2 Kab/kota	10,000,000	6 Kab/kota	30,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah dan Jenis Rambu-Rambu K3	-					5 Jenis	10,000,000	5 Jenis	10,000,000	5 Jenis	15,000,000	15 Jenis	35,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di pantau	-					20 Faskes	20,000,000	20 Faskes	20,000,000	20 Faskes	20,000,000	60 Faskes	60,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sarana Kesehatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibina	2 Sarkes					3 Sarkes	10,000,000	4 Sarkes	10,000,000	4 Sarkes	10,000,000	12 Sarkes	30,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Perusahaan yang di pantau oleh tim Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	-					30 Perusahaan Binaan	10,000,000	30 Perusahaan Binaan	10,000,000	30 Perusahaan Binaan	10,000,000	90 Perusahaan Binaan	30,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta pertemuan rutin tim Gerakan Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	-					30 Orang	10,000,000	30 Orang	10,000,000	30 Orang	10,000,000	90 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kabupaten yang dibina Sektor Informalnya	-					24 Kab/kota	35,000,000	24 Kab/kota	40,000,000	24 Kab/kota	45,000,000	24 Kab/kota	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah pengamatan dampak keterpaparan peptisida terhadap pekerja informal	-					60 Orang	20,000,000	60 Orang	30,000,000	60 Orang	30,000,000	180 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
						jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) yang mengikuti senam setiap pelaksanaan senam	50 Orang					100 orang	30,000,000	100 orang	40,000,000	100 orang	50,000,000	300 orang	120,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM yang dibimtek	-					24 Desa	75,000,000	24 Desa	80,000,000	24 Desa	85,000,000	72 Desa	240,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Desa STBM yang diverifikasi	-					10 Desa	40,000,000	0 Desa	0	0 Desa	0	10 Desa	40,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kawasan Sehat melalui pendekatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/kota	-					24 Kab/kota	80,000,000	24 Kab/kota	80,000,000	0 Kab/kota	0	24 Kab/kota	160,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah klasifikasi penghargaan Swasti Saba	Swasti Saba Wiwerda 8 Kab./Kota, Swasti Saba Wistara 13 Kab/Kota					24 Kab./Kota Swsati Saba Wistara	55,000,000	0 Kab./Kota Swsati Saba Wistara	0	24 Kab./Kota Swsati Saba Wistara	65,000,000	24 Kab./Kota Swsati Saba Wistara	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan Tatanan Kawasan Sehat	Swasti Saba Wiwerda 10 Kab./Kota, Swasti Saba Wistara 13 Kab./Kota Swasti Saba Padapa 1 Kab					24 Kab./Kota Swasti Saba Wistara	150,000,000	0 Kab./Kota Swasti Saba Wistara	0	24 Kab./Kota Swasti Saba Wistara	160,000,000	24 Kab./Kota Swasti Saba Wistara	310,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di kab/Kota	-					600 orang	140,000,000	600 orang	140,000,000	600 orang	140,000,000	1800 orang	420,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pengelola Program Yang Terlatih Implementasi Kawasan tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	48 orang					80 Orang	100,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	80 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah kab/Kota yang mengembangkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	24 Kab/Kota					24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara (Pengembangan Daerah Pilot Project)	30 Orang					60 Orang	80,674,000	60 Orang	80,674,000	60 Orang	80,674,000	180 Orang	242,022,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota sasaran monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	24 Kab/Kota					24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah petugas/pengelola program TB yang yang mendapat bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program P2 TB	20 Orang					15 orang	25,000,000	0 orang	0	15 orang	25,000,000	30 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi Program Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	5 Kab/Kota					24 Kab/Kota	45,000,000	24 Kab/Kota	45,000,000	24 Kab/Kota	45,000,000	24 Kab/Kota	135,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah Petugas/Pengelola Program Kesehatan Indra yang mendapat bimbingan teknis Program Kesehatan Indra	24 Orang					24 Orang	90,000,000	24 Orang	90,000,000	24 Orang	90,000,000	24 Orang	270,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dalam rangka pelaksanaan Program Vektor	24 Kab/Kota					6 Kab/Kota	30,000,000	6 Kab/Kota	30,000,000	8 Kab/Kota	45,000,000	20 Kab/Kota	105,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota sasaran pembinaan dalam rangka pelaksanaan Program P2 ISPA	3 Kab/Kota					12 Kab/Kota	40,000,000	12 Kab/Kota	50,000,000	12 Kab/Kota	60,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program Malaria	-					10 Kab/Kota	40,000,000	10 Kab/Kota	40,000,000	10 Kab/Kota	40,000,000	24 Kab/Kota	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Imunisasi	-					24 Orang	59,000,000	0 Orang	0	24 Orang	59,000,000	48 Orang	118,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah pelaksanaan Survey Prevalensi Kecacangan pada Anak Pra Sekolah dan Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada Kab/Kota	2 Kab/Kota					2 Kab/Kota	60,000,000	2 Kab/Kota	60,000,000	0 Kab/Kota	0	4 Kab/Kota	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program HIV	-					6 Kab/kota	40,000,000	10 Kab/kota	50,000,000	9 Kab/kota	50,000,000	24 Kab/kota	140,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Workshop Advokasi Imunisasi	-					25 Orang	40,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	25 Orang	40,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan program imunisasi	-					12 Kab/Kota	27,000,000	12 Kab/Kota	30,000,000	12 Kab/Kota	30,000,000	12 Kab/Kota	87,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan Program Kusta	-					7 Kab/kota	30,000,000	7 Kab/kota	30,000,000	7 Kab/kota	30,000,000	24 Kab/kota	90,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Petugas Kesehatan yang mendapat bimtek dalam rangka pelaksanaan program Hepatitis	-					8 Kab/kota	45,000,000	8 Kab/kota	45,000,000	8 Kab/kota	45,000,000	24 Kab/kota	135,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Berbasis Penyakit Tular Vektor dan Zoonotic	-					185 Orang	45,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	185 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Berbasis Penyakit Menular Langsung	-					185 Orang	45,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	185 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah kegiatan kampanye TB pada kelompok masyarakat berisiko yang dilaksanakan	-					1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	3 Paket	60,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Deteksi Dini Melalui Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular (PTM)	24 Kab/Kota					24 Kab./Kota	70,000,000	0 Kab./Kota	0	24 Kab./Kota	70,000,000	24 Kab./Kota	140,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah Peserta Workshop Hipertensi	50 orang					50 Orang	70,000,000	0 Orang	0	50 Orang	70,000,000	100 Orang	140,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab./Kota yang Melaksanakan Impelementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	24 Kab/Kota					24 Kab./Kota	70,000,000	24 Kab./Kota	0	0 Kab./Kota	0	24 Kab./Kota	70,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	24 Kab/Kota					24 Kab./Kota	70,000,000	24 Kab./Kota	70,000,000	0 Kab./Kota	0	24 Kab./Kota	140,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta workshop dalam rangka penyusunan rencana tindak lanjut masing masing peran organisasi profesi dalam penanggulangan TB	-					50 Orang	30,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Ranperda TB yang disusun	-					1 Paket	100,000,000	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah OPD Yang Melaksanakan Posbindu	-					0 OPD Provinsi	0	25 OPD Provinsi	60,000,000	0 OPD Provinsi	0	25 OPD Provinsi	60,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah petugas/pengelola program tifoid kab/kota yang mendapat bimbingan teknis pelaksanaan program Tifoid	-					9 Kab/kota	50,000,000	10 Kab/kota	55,000,000	10 Kab/kota	55,000,000	24 Kab/kota	160,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi dalam rangka pelaksanaan program Zoonosis	10 Kab/Kota					14 Kab/Kota	50,000,000	14 Kab/Kota	60,000,000	14 Kab/Kota	60,000,000	24 Kab/Kota	170,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota dilaksanakan EVM (Effective Vaccine Management)	-					0 Kab/Kota	0	8 Kab/Kota	25,000,000	0 Kab/Kota	0	8 Kab/Kota	25,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kabupaten/Kota dengan tindak lanjut Sosialisasi Kesehatan Haji	-					24 Kab/Kota	50,000,000	24 Kab/Kota	50,000,000	24 Kab/Kota	50,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Workshop Orientasi Sistem Komputerisasi dan Informasi Kesehatan Haji	-					30 Orang	40,000,000	30 Orang	40,000,000	30 Orang	40,000,000	90 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam rangka pelaksanaan Program Kesehatan Haji	-					15 Kab/Kota	50,000,000	15 Kab/Kota	50,000,000	15 Kab/Kota	50,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Haji Kab/Kota	-					24 Orang	40,000,000	24 Orang	40,000,000	24 Orang	40,000,000	24 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	-					30 Orang	190,000,000	30 Orang	190,000,000	30 Orang	190,000,000	90 Orang	570,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Sosialisasi Haji Sehat Bagi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah	-					30 Orang	20,000,000	30 Orang	20,000,000	30 Orang	20,000,000	90 Orang	60,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah Jemaah Haji Embarkasi Debarkasi yang dipantau	-					15.000 Orang	30,000,000	15.000 Orang	30,000,000	15.000 Orang	30,000,000	45000 Orang	90,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Peserta Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Provinsi						40 Orang	65,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	40 Orang	65,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Pengelola Kesehatan Jiwa yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Kesehatan Jiwa di Kab/Kota						48 Orang	53,000,000	48 Orang	53,000,000	48 Orang	53,000,000	144 Orang	159,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL)	-					50 Orang	70,000,000	50 Orang	70,000,000	50 Orang	70,000,000	150 Orang	210,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-					50 Orang	30,543,000	50 Orang	30,543,000	50 Orang	30,543,000	150 Orang	91,629,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Sosialisasi IPWL bagi Tenaga Kesehatan dan Guru	-					50 Orang	60,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	60,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi dalam rangka Pemantapan Kesehatan Gratis Integrasi ke Program JKN	45 Orang					100 Orang	75,000,000	100 Orang	75,000,000	100 Orang	75,000,000	300 Orang	225,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sosialisasi dan informasi Kesehatan Gratis Integrasi ke program JKN melalui Media Cetak dan Elektronik	4 Kali Kegiatan					4 kali	65,000,000	4 kali	65,000,000	4 kali	65,000,000	12 kali	195,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab./Kota sasaran Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gratis Integrasi JKN	24 Kab./kota					24 Kab./Kota	75,000,000	24 Kab./Kota	75,000,000	24 Kab./Kota	100,000,000	24 Kab./Kota	250,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Petugas/pengelola JKN Kab/Kota mendapat bimbingan teknis dan jumlah pengelola JKN Provinsi yang melakukan konsultasi ke Pusat	-					168 Orang	75,000,000	168 Orang	75,000,000	168 Orang	95,000,000	504 Orang	245,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab./Kota sasaran Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Yankes Penduduk Miskin di Fasilitas Kesehatan	24 Kab/Kota					24 Kab/Kota	75,000,000	24 Kab/Kota	80,000,000	24 Kab/Kota	82,500,000	24 Kab/Kota	237,500,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah kab./kota sasaran advokasi dan sosialisasi dalam rangka Sulawesi Selatan menuju Universal Health Coverage (UHC) 2019	24 kab./kota					12 Kab/Kota	30,000,000	12 Kab/Kota	35,000,000	12 Kab/Kota	40,500,000	24 Kab/Kota	105,500,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas (SKDR)	-					48 Orang	150,000,000	48 Orang	150,000,000	48 Orang	150,000,000	144 Orang	450,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan/Reviu Petugas District Surveilans Officer	-					60 Orang	53,100,000	60 Orang	53,100,000	60 Orang	53,100,000	180 Orang	159,300,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota sasaran bimbingan teknis Program Sistem Terpadu Penyakit	-					24 Kab/Kota	65,000,000	24 Kab/Kota	65,000,000	24 Kab/Kota	65,000,000	24 Kab/Kota	195,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta pengembangan PEST (Provincial Epidemiologi Surveillance Team)	40 Orang					70 Orang	100,000,000	70 Orang	100,000,000	70 Orang	100,000,000	210 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi terpadu tentang pengelolaan Program Kesehatan Tradisional, Gigi Mulut, Laboratorium dan Pelayanan Darah	-					24 Kab/Kota	120,000,000	24 Kab/Kota	138,000,000	24 Kab/Kota	138,000,000	24 Kab/Kota	396,000,000	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pelayanan kesehatan di UPK	-					12 Bulan	800,000,000	12 Bulan	800,000,000	12 Bulan	1,000,000,000	36 Bulan	2,600,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi dalam mendukung Quickwins Program Pelayanan Darah	-					48 orang	224,000,000	0 orang	0	0 orang	0	48 orang	224,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Peningkatan dan Penguatan Tenaga Pendamping Akreditasi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)	-					48 orang	105,000,000	48 orang	105,000,000	48 orang	105,000,000	144 orang	315,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-					24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	450,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Puskesmas Berprestasi (Kinerja Terbaik) Tingkat Provinsi Sulsel yang terpilih	10 PKM					12 Puskesmas Berprestasi	300,000,000	12 Puskesmas Berprestasi	300,000,000	12 Puskesmas Berprestasi	300,000,000	36 Puskesmas Berprestasi	900,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Kegawatdaruratan BSB	-					50 Orang	85,000,000	50 Orang	85,000,000	50 Orang	85,000,000	150 Orang	255,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Klinik BSB	-					50 Orang	85,000,000	50 Orang	85,000,000	50 Orang	85,000,000	150 Orang	255,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Mobiler BSB	-					1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	3 Paket	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pertemuan Peningkatan Tenaga Klinik Rest Area	-					30 Orang	70,000,000	30 Orang	70,000,000	30 Orang	70,000,000	90 Orang	210,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi Rest Areanya	-					4 Kab/Kota	40,000,000	4 Kab/Kota	40,000,000	4 Kab/Kota	40,000,000	12 Kab/Kota	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Mobil Ambulans Rest Area yang diadakan	-					4 Unit	1,000,000,000	4 Unit	1,000,000,000	4 Unit	2,500,000,000	12 Unit	4,500,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Mobiler Rest Area	-					4 Paket	400,000,000	4 Paket	400,000,000	4 Paket	500,000,000	12 Paket	1,300,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	-					7 Kab/Kota	25,000,000	7 Kab/Kota	35,000,000	7 Kab/Kota	50,000,000	21 Kab/Kota	110,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan ketersediaan data dan informasi kesehatan	100%					100%	264,000,000	100%	275,000,000	100%	290,000,000	100%	829,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan;	84 Laporan;					84 Laporan;	54,000,000	84 Laporan;	55,000,000	84 Laporan;	60,000,000	252 Laporan;	169,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	10 sistem informasi					10 sistem informasi	110,000,000	10 sistem informasi	120,000,000	10 sistem informasi	130,000,000	10 Sistem informasi	360,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	200 berita/informasi					200 berita/informasi	100,000,000	200 berita/informasi	100,000,000	200 berita/informasi	100,000,000	600 Berita/informasi	300,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%					100%	900,000,000	100%	928,000,000	100%	1,220,000,000	100%	3,048,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pemantauan Izin Operasional di RS Swasta	56 RS					56 RS	83,000,000	0 RS	0	0 RS	0	56 RS	83,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Pendukung Pengembangan RS	-					2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	600,000,000	Dinas Kesehatan
						Berkembangnya layanan unggulan/spesialisasi RS Provinsi						2 RS	250,000,000	2 RS	270,000,000	2 RS	500,000,000	6 RS	1,020,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Peserta Pelaporan SIRS Online bagi Petugas Rekam Medik RS	-					105 Orang	117,000,000	105 Orang	118,000,000	105 Orang	120,000,000	105 Orang	355,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah petugas yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan Ambulans RS	-					0 Orang	0	49 Orang	120,000,000	49 Orang	150,000,000	98 Orang	270,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Petugas dalam pengelolaan CSSD di RS yang meningkat pemahamannya	-					0 Orang	0	49 Orang	120,000,000	0 Orang	0	49 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang dipantau tentang implementasi Klinik di Rest Area	-					12 Kab/Kota	100,000,000	12 Kab/Kota	100,000,000	12 Kab/Kota	100,000,000	12 Kab/Kota	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Tim PPRA yang meningkat pemahamannya tentang pengendalian Resistensi Antimikroba di RS	-					49 Orang	150,000,000	0 Orang	0	49 Orang	150,000,000	98 Orang	300,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan	17/100.000 Penduduk					23/100.000 Penduduk	3,612,000,000	23/100.000 Penduduk	3,657,000,000	23/100.000 Penduduk	4,154,000,000	23/100.000 Penduduk	11,423,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	60%					100%	1,097,000,000	100%	1,127,000,000	100%	1,222,000,000	100%	3,446,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota sasaran pelaksanaan advokasi pemenuhan 5 jenis profesi tenaga kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di kab/kota	-					24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	120,000,000	24 Kab/Kota	130,000,000	24 Kab/Kota	350,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah jenis profesi tenaga kesehatan di Kab/Kota yang terdata	22 Jenis Profesi					22 Jenis Profesi	100,000,000	22 Jenis Profesi	100,000,000	22 Jenis Profesi	100,000,000	22 Jenis Profesi	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Pertemuan Pengelola SDMK	-					24 Orang	80,000,000	24 Orang	85,000,000	24 Orang	90,000,000	72 Orang	255,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan upaya pemenuhan tenaga kesehatan sesuai analisis beban kerja	24 Kab/Kota					24 Kab/Kota	115,000,000	24 Kab/Kota	120,000,000	24 Kab/Kota	200,000,000	24 Kab/Kota	435,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Koordinasi Upaya Pemenuhan NAKES di Provinsi	30 orang					30 Orang	97,000,000	30 Orang	97,000,000	30 Orang	97,000,000	90 Orang	291,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta koordinasi dalam upaya pemenuhan NAKES di Kab/Kota	78 orang					78 Orang	135,000,000	78 Orang	135,000,000	78 Orang	135,000,000	234 Orang	405,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta koordinasi pemenuhan tenaga kesehatan 6 RS Regional	-					50 Orang	120,000,000	50 Orang	120,000,000	50 Orang	120,000,000	150 Orang	360,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah pemetaan tenaga kesehatan pada RS Swasta/Klinik/TNI/POLRI	-					30 RS	100,000,000	40 RS	100,000,000	60 RS	100,000,000	60 RS	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Sosialisasi Upaya Pemenuhan Tenaga Kesehatan	-					72 Orang	250,000,000	72 Orang	250,000,000	72 Orang	250,000,000	216 Orang	750,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	70%					100%	2,515,000,000	100%	2,530,000,000	100%	2,932,000,000	100%	7,977,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan E-Logistik dan E-Purchasing	-					24 Kab/Kota	120,000,000	24 Kab/Kota	140,000,000	24 Kab/Kota	160,000,000	24 Kab/Kota	420,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Wahana Internsip di Kab/Kota yang dipantau	-					28 Wahana	85,000,000	0 Wahana	0	28 Wahana	87,000,000	28 Wahana	172,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah tenaga kesehatan yang dibekali dalam penerapan POR (Penggunaan Obat Rasional)	-					150 Orang	100,000,000	150 Orang	120,000,000	150 Orang	180,000,000	450 Orang	400,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Sosialisasi e-Monev RKO	-					60 Orang	70,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	60 Orang	70,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih	27 Orang (9 Kategori)					27 Orang (9 Kategori)	250,000,000	27 Orang (9 Kategori)	300,000,000	27 Orang (9 Kategori)	400,000,000	81 Orang (9 Kategori)	950,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Jumlah peserta Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan	-					74 orang	100,000,000	74 orang	120,000,000	74 orang	140,000,000	222 orang	360,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Sosialisasi Perundang-Undangan SDMK	-					107 orang	100,000,000	107 orang	120,000,000	107 orang	140,000,000	321 orang	360,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Jenis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang disosialisasikan	-					7 Jenis Jafung	140,000,000	8 Jenis Jafung	140,000,000	9 Jenis Jafung	140,000,000	9 Jenis Jafung	420,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Workshop Penguatan Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	-					60 Orang	280,000,000	60 Orang	280,000,000	60 Orang	280,000,000	180 Orang	840,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Pertemuan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	-					72 Orang	250,000,000	72 Orang	250,000,000	72 Orang	250,000,000	216 Orang	750,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Alkes dalam negeri	-					24 Sarana PAK/PKRT	200,000,000	24 Sarana PAK/PKRT	200,000,000	24 Sarana PAK/PKRT	200,000,000	72 Sarana PAK/PKRT	600,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kader Kesehatan yang dibina dalam produksi makanan	-					60 Orang	70,000,000	70 Orang	70,000,000	80 Orang	70,000,000	210 Orang	210,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mampu melaksanakan Surveilans Produk	-					58 Pengelola Program	120,000,000	58 Pengelola Program	120,000,000	58 Pengelola Program	120,000,000	58 Pengelola Program	360,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	-					70 orang	140,000,000	70 orang	140,000,000	70 orang	140,000,000	210 orang	420,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Produsen Makanan Khusus yang beredar dan telah diidentifikasi serta dipetakan	-					45 Produsen	110,000,000	50 Produsen	120,000,000	60 Produsen	125,000,000	155 Produsen	355,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah pemantauan Program Sumber Daya Kesehatan pada Kab/Kota	-					24 kab/kota	100,000,000	24 kab/kota	100,000,000	24 kab/kota	100,000,000	24 kab/kota	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sarana PAK yang mengusulkan permohonan Sertifikat CDAKB	-					20 Sarana Alkes	120,000,000	20 Sarana Alkes	140,000,000	20 Sarana Alkes	200,000,000	60 Sarana Alkes	460,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah masyarakat yang menggunakan Alkes dan PKRT yang baik	-					60 orang	160,000,000	60 orang	170,000,000	60 orang	200,000,000	180 orang	530,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	70%					85%	885,000,000	95%	995,000,000	100%	1,115,000,000	100%	2,995,000,000	
				1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	% pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang diterbitkan	100%					100%	885,000,000	100%	995,000,000	100%	1,115,000,000	100%	2,995,000,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	Jumlah Sarana yang disurvei dan tersertifikasi	-					20 Sarana	40,000,000	20 Sarana	40,000,000	20 Sarana	45,000,000	60 Sarana	125,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sarana Distribusi Obat BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan Vaksin yang dipetakan	-					110 Sarana	100,000,000	125 Sarana	150,000,000	125 Sarana	200,000,000	125 Sarana	450,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang telah memiliki data ketersediaan alat kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas	-					24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	100,000,000	24 Kab/Kota	300,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Program Alat Kesehatan dan PKRT	-					24 Kab/Kota	115,000,000	24 Kab/Kota	115,000,000	24 Kab/Kota	115,000,000	24 Kab/Kota	345,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sarana yang telah tersosialisasi dengan per UU No 24 Tahun 2018	-					60 Sarana	90,000,000	80 Sarana	90,000,000	115 Sarana	100,000,000	255 Sarana	280,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Permenkes 56 Tahun 2014	-					24 Kab/Kota	126,000,000	24 Kab/Kota	126,000,000	24 Kab/Kota	126,000,000	24 Kab/Kota	378,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Permenkes 75 Tahun 2014	-					20 orang	100,000,000	20 orang	125,000,000	20 orang	150,000,000	60 orang	375,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sampel Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang teruji di BPFK dan BBPOM	-					2 Jenis sampel (alkes&PKRT)	24,000,000	2 Jenis sampel (alkes&PKRT)	24,000,000	2 Jenis sampel (alkes&PKRT)	24,000,000	6 Jenis sampel (alkes&PKRT)	72,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Sarana yang telah disurvei dalam rangka Perizinan	-					30 Sarana PAK/PKRT	40,000,000	30 Sarana PAK/PKRT	45,000,000	30 Sarana PAK/PKRT	50,000,000	90 Sarana PAK/PKRT	135,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan dan distribusi yang baik	-					80 Alkes dan PKRT	150,000,000	80 Alkes dan PKRT	180,000,000	80 Alkes dan PKRT	205,000,000	240 Alkes dan PKRT	535,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan PHBS	62,15%					66% (16 Kab/Kota)	1,130,000,000	75% (18 Kab/Kota)	1,190,000,000	85% (20 Kab/Kota)	1,470,000,000	100%	3,790,000,000	
				1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pelaksanaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat	100%					100%	760,000,000	100%	780,000,000	100%	850,000,000	100%	2,390,000,000	
				1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyebaran informasi kesehatan melalui Pameran Kesehatan	1 kali					2 Kali	100,000,000	2 Kali	135,000,000	2 Kali	150,000,000	6 Kali	385,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah dibekali GEMA Cermat dalam pemberdayaan masyarakat	-					200 orang	130,000,000	200 orang	140,000,000	200 orang	150,000,000	600 orang	420,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan Pengelolaan Obat Satu Pintu (One Gate Policy)	-					24 Kab/Kota	150,000,000	24 Kab/Kota	200,000,000	24 Kab/Kota	250,000,000	24 Kab/Kota	600,000,000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
						Terbentuknya jejaring Obat dan Pangan Lintas Sektor	-					20 orang	80,000,000	30 orang	85,000,000	0 orang	0	50 orang	165,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan yang mengikuti Konas Promkes	-					10 Orang	100,000,000	0 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah penyebaran informasi kesehatan melalui Kampanye Kesehatan	-					1 Kali	80,000,000	1 Kali	80,000,000	1 Kali	100,000,000	3 Kali	260,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah tenaga Apoteker dan Apoteker AOC yang telah dievaluasi Penerapan Gema Cermat dalam Pemberdayaan Masyarakat	-					130 Apoteker	120,000,000	140 Apoteker	140,000,000	150 Apoteker	200,000,000	410 Apoteker	460,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tersebarluasnya informasi PHBS melalui berbagai media	100%					100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	280,000,000	100%	580,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah penyebarluasan informasi melalui radio, TV, media cetak, merchandise, kelompok potensial dan evaluasi media	5 Paket					5 Paket	150,000,000	5 Paket	150,000,000	5 Paket	280,000,000	15 Paket	580,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%					100%	220,000,000	100%	260,000,000	100%	340,000,000	100%	820,000,000	Dinas Kesehatan
				1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah pimpinan dan anggota SBH yang mengikuti persiapan dan pelaksanaan PERTINAS SBH	-					10 Orang	100,000,000	10 Orang	120,000,000	10 Orang	140,000,000	30 Orang	360,000,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Posyandu terbaik tingkat Provinsi	-					5 Posyandu	120,000,000	5 Posyandu	140,000,000	5 Posyandu	200,000,000	15 Posyandu	460,000,000	Dinas Kesehatan
Grandtotal												143,517,014,342		145,547,950,483		190,605,115,937		479,670,080,762		

TABEL T - C.27
TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DADI PROV. SULSEL

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME),KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			TARGET
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP RSKD DADI Provinsi Sulawesi Selatan													
					Rata-rata Kinerja Program UPT. RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan					97.50%		98.00%		99.00%		100%		
			1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	%					97.50		98%		99.00%		100%	
					Persentase ASN perangkat daerah berkinerja baik dan sangat baik	%					80%	147,949,059,570.00	85%	123,553,854,752.00	90%	117,159,700,560.00	100%	
					Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	%					-0.13		-0.19		-0.23		-54%	
			1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan keuangan Tepat Waktu	%					100%	56,225,989,394.00	100%	59,272,324,050.00	100%	62,235,940,253.00	100%	
			1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Dibayar Gaji dan Tunjangan Setiap Bulan	Orang Bulan					6.062 Orang Bulan	56,225,989,394.00	6.300 Orang Bulan	59,272,324,050.00	6.510 Orang Bulan	62,235,940,253.00	18.872 Orang Bulan	
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	%					100%	3,723,070,176.00	100%	4,281,530,702.00	100%	4,923,760,307.00	100%	
			1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang dibayarkan Gaji Setiap Bulan	Orang Bulan					1.176 Orang Bulan	3,723,070,176.00	1.344 Orang Bulan	4,281,530,702.00	1.548 Orang Bulan	4,923,760,307.00	4.068 Orang Bulan	
			1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD	%					1%	88,000,000,000.00	-32%	60,000,000,000.00	-17%	50,000,000,000.00	-47%	
		1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	Rp				88,000,000,000.00	88,000,000,000.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	198,000,000,000.00			
	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasien	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit			Indeks Kepuasan Pasien RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan						88%		90%		95%		273%	
					1. Tingkat pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)						72%		80%		85%		237%	
					2. Rata-rata lamanya pasien dirawat (ALOS)						32 Hari		30 Hari		25 Hari		87 Hari	
					3. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)						20 Hari		18 Hari		15 Hari		53 Hari	
					4. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)						10 Kali		20 Kali		25 Kali		55 Kali	
					5. Angka kematian kasar (GDR)						10‰		15‰		25‰		50‰	
					6. Angka kematian setelah dirawat (NDR)						46‰		46‰		45‰		137‰	
			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	%					100%	26,178,244,000.00	100%	51,494,397,731.54	100%	64,633,318,650.49	100%	
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan	%					100%	26,178,244,000.00	100%	51,494,397,731.54	100%	64,633,318,650.49	100%	
			1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Sarana & Prasarana yang diadakan	Unit					-		1 Unit	10,000,000,000.00	1 Unit	25,000,000,000.00	2 Unit	

1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Sarana yang direhab/direnov	Unit					1 Unit	5,250,000,000.00	2 Unit	11,000,000,000.00	2 Unit	13,300,000,000.00	1 Unit
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / alat Penunjang medik yang diadakan	Jenis					61 Jenis	20,928,244,000.00	62 Jenis	28,500,000,000.00	50 Jenis	25,000,000,000.00	173 Jenis
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai/Logistik RS yang diadakan	Jenis						-	40 Jenis	1,994,397,731.54	35 Jenis	1,333,318,650.49	75 Jenis
									174,127,303,570.00		175,048,252,483.54		181,793,019,210.49	

Makassar, 25 Januari 2021

Direktur,
UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi S

dr. Arman Bausat Sp.B.OT (K) Spine
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19630224 199010 1 001

AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
Rp		
18	19	20
388,662,614,882.00	UPT RSKD DADI	Makassar
177,734,253,697.00	UPT RSKD DADI	Makassar
177,734,253,697.00	UPT RSKD DADI	Makassar
12,928,361,185.00	UPT RSKD DADI	Makassar
12,928,361,185.00	UPT RSKD DADI	Makassar
198,000,000,000.00	UPT RSKD DADI	Makassar
198,000,000,000.00	UPT RSKD DADI	Makassar
142,305,960,382.03	UPT RSKD DADI	Makassar
142,305,960,382.03	UPT RSKD DADI	Makassar
35,000,000,000.00	UPT RSKD DADI	Makassar

172,364,815,937.50

29,550,000,000.00	UPT RSKD DADI	Makassar
45,928,244,000.00	UPT RSKD DADI	Makassar
3,327,716,382.03	UPT RSKD DADI	Makassar
530,968,575,264.03		

elatan

Makassar, 25 Januari 2021

Direktur,
UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan

dr. Arman Bausat, Sp.B, Sp.OT
Nip. 19630224 199010 2 001

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
UPT RSUD Sayang Rakyat Dinas Kesehatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Table T-C.27 (Draft Rancangan Akhir)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip RSUD Sayang Rakyat															
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Rata-rata Kinerja Program RS Sayang Rakyat									80%		85%		90%		
			1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah					80%		85%		90 %		
						Persentase ASN perangkat daerah berkinerja baik dan sangat baik					80%	48,018,506,870.00	83%	52,029,791,279.00	85%	56,358,038,246.90	
						Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP					-0.7		-0.3		-0.2		
			1 02 01 1 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu					100%	30,224,271,581.00	100%	33,674,389,279.00	100%	37,041,828,206.90	
			1 02 01 1 02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	28,807,951,447.00				18,71 OB	30,224,271,581.00	20 OB	33,674,389,279.00	21,07 OB	37,041,828,206.90	
			1 02 01 1 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tagihan listrik rumah sakit yang dibayarkan					100%	779,135,289.00	100%	1,000,000,000.00	100%	1,613,700,000.00	
			1 02 01 1 08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik rumah sakit yang dibayarkan	663,980,155.00				12 Bulan	779,135,289.00	12 Bulan	800,000,000.00	12 Bulan	1,113,700,000.00	
			1 02 01 1 08 04		Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kantor yang dibayarkan					-		12 Bulan	200,000,000.00	12 Bulan	500,000,000.00	
			1 02 01 1 10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD					-0.5	17,015,100,000.00	0.02	17,355,402,000.00	0.02	17,702,510,040.00	
			1 02 01 1 10 01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	33,629,448,104.00				17,015,100,000.00	17,015,100,000.00	17,355,402,000.00	17,355,402,000.00	17,702,510,040.00	17,702,510,040.00	
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasien		Indeks Kepuasan Pasien RSUD Sayang Rakyat															
	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	1. Tingkat pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)									18%		19%		20%		
		2. Rata-rata lamanya pasien dirawat (ALOS)									3 Hari		3 Hari		3 Hari		

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		PD Penanggung Jawab
Target	Rp	
(18)	(19)	(20)
85%		
85 %		UPT RSUD Sayang Rakyat
82,6%	156,406,336,395.90	
-0,4%		
100%	100,940,489,066.90	UPT RSUD Sayang Rakyat
59,79 OB	100,940,489,066.90	
100%	3,392,835,289.00	UPT RSUD Sayang Rakyat
12 Bulan	2,692,835,289.00	
12 Bulan	700,000,000.00	
-0.15	52,073,012,040.00	UPT RSUD Sayang Rakyat
52,073,012,040	52,073,012,040.00	
19%		
3 Hari		

10 Hari		
25 Kali		
8,67%		
3%		
100%	17,780,396,589.69	UPT RSUD Sayang Rakyat
100%	17,780,396,589.69	UPT RSUD Sayang Rakyat
2 Unit	2,500,000,000.00	
3 Unit	3,958,581,134.85	
13 Jenis	6,580,909,000.00	
14 Unit	3,300,000,000.00	
25 Unit	1,030,906,454.84	
15 Unit	130,000,000.00	
15 Unit	150,000,000.00	
15 Unit	130,000,000.00	
69%	654,000,000.00	UPT RSUD Sayang Rakyat
69%	654,000,000.00	UPT RSUD Sayang Rakyat
160 Orang	624,000,000.00	

10 Orang	30,000,000.00	
174,840,732,985.59		

TABEL TC 27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pemerintahan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		PD Penanggungjawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar	Pelayanan terhadap masyarakat	1.02.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Penyelesaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	10,500,000,000	100	11,000,000,000	100	11,500,000,000	100	33,000,000,000	
			1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	% Peningkatan Pelayanan BLUD						100	10,500,000,000	100	11,000,000,000	100	11,500,000,000	100	33,000,000,000	
			1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pasien rawat jalan yang dilayani						24000 Org	10,500,000,000	26400 Org	11,000,000,000	28800 Org	11,500,000,000	79200 Org	33,000,000,000	
					Jumlah pasien rawat inap yang dilayani						100 Org		110 Org		120 Org		330 Org		
					Jumlah Pendapatan BLUD (dlm jutaan)						10500 Juta		11000 Juta		11500 Juta		33 M		
			1.02.02	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Pemenuhan Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan pada Masyarakat						100	45,152,000,000	100	5,814,000,000	100	8,166,000,000	100	59,132,000,000	
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	% Terpenuhinyan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk Rujukan RS Tingkat Daerah Provinsi						100	45,152,000,000	100	5,814,000,000	100	8,166,000,000	100	59,132,000,000	
			1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Gedung, Ruang yang di Rehabilitasi						4 Paket	36,750,000,000	3 Paket	250,000,000	3 Paket	450,000,000	10 Paket	37,450,000,000	
			1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan						27 Jenis	2,500,000,000	30 Jenis	3,000,000,000	35 Jenis	5,000,000,000	35 Jenis	10,500,000,000	
			1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan						3 Unit	3,500,000,000	-	0	-	0	Unit	3,500,000,000	
			1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dipelihara						25 Jenis	100,000,000	25 Jenis	120,000,000	25 Jenis	130,000,000	25 Jenis	350,000,000	
			1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bahan, Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang diadakan						243 Jenis	1,000,000,000	243 Jenis	1,100,000,000	243 Jenis	1,200,000,000	243 Jenis	3,300,000,000	
			1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Layanan yang dilaksanakan						14 Jenis	1,302,000,000	14 Jenis	1,344,000,000	14 Jenis	1,386,000,000	14 Jenis	4,032,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pemerintahan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir	PD Penanggungjawab
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusi Kesehatan					100	1,091,225,374	100	1,101,225,374	100	1,102,225,374	100	3,294,676,122	
			1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	% Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					100	1,091,225,374	100	1,101,225,374	100	1,102,225,374	100	3,294,676,122	
			1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumah Tenaga Kesehatan yang ditinkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya					100 Org	1,091,225,374	100 Org	1,101,225,374	100 Org	1,102,225,374	100 Org	3,294,676,122	
			1.02.05	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					400	200,000,000	500	500,000,000	500	500,000,000	1400	1,200,000,000	
			1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	% Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					400	200,000,000	500	500,000,000	500	500,000,000	1400	1,200,000,000	
			1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumla Masyarakat yang mendapatkan Informasi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Pelayanan Dasar Kesehatan Gigi dan Mulut					400 Org	200,000,000	500 Org	500,000,000	500 Org	500,000,000	1400 Org	1,200,000,000	

Mengetahui/Menyetujui
Direktur RSKD Gigi dan Mulut Prov. Sulsel

drg. Hj LULIKSRI HANDAYANI, MARS
NIP. 19640618 199302 2 004

Tabel T-C27
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel T-C27 (Draft Rancangan Awal)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab					
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD							
							Tarjet (R8)	Ro (R9)	Tarjet (R10)	Ro (R11)	Tarjet (R12)	Ro (R13)	Tarjet (R14)	Ro (R15)	Tarjet (R16)	Ro (R17)	Tarjet (R18)	Ro (R19)						
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Efisiensi Layanan Rumah Sakit Kepada Masyarakat	Persentase Capaian Kualitas Layanan RS Kepada Masyarakat	0 00 X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat ASN	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
			0 0 0 X	X.XX.01.02	X.XX.01.02 XXX Administrasi Keuangan		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21,586,889,816.00	0	22,738,205,174.83	0	23,225,136,502.38	0	67,550,231,493.21				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi
			0 0 0 X	X.XX.01.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	377	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	200 Orang	21,586,889,816.00	213 Orang	22,738,205,174.83	213 Orang	23,225,136,502.38	1003 Orang	67,550,231,493.21				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			0 0 0 X	X.XX.01.10	X.XX.01.10 XXX Peningkatan Pelayanan BLUD		0	0,00	0	0,00	0	0	12,000,000,000.00	0	12,600,000,000.00	0	13,230,000,000.00	0	37,830,000,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			0 0 0 X	X.XX.01.10	XXX Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan BLUD RS (Rp)	21500692589	0 Rp	0,00	0 Rp	0,00	1200000000 Rp	12,000,000,000.00	12600000000 Rp	12,600,000,000.00	13230000000 Rp	13,230,000,000.00	99330692589 Rp	37,830,000,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Persentase Angka Kematian di RS	1 02 1.02.02		PROGRAM PENJAJAN UPAYA KESEHATAN PRASARANA DAN PRASARANA dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	100%	0%	0%	0%	100%	0%	8,733,570,656.00	100%	5,138,372,908.39	100%	5,497,498,717.28	100%	19,369,442,281.67				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.02.01	1.02.02.01 Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UFK Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah		0	0,00	0	0,00	0	0	8,661,832,656.00	0	2,250,000,000.00	0	2,270,000,000.00	0	13,181,832,656.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.02.01	1.02.02.01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	3,686,750,000.00	1 Unit	1,000,000,000.00	1 Unit	1,000,000,000.00	5 Unit	5,686,750,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.02.01	1.02.02.01 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan	326	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	61 Unit	4,975,082,656.00	50 Unit	1,250,000,000.00	50 Unit	1,270,000,000.00	287 Unit	7,495,082,656.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.02.02	1.02.02.02 Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UFK Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat		0	0,00	0	0,00	0	0	71,738,000.00	0	2,888,372,908.39	0	3,227,498,717.28	0	6,187,609,625.67				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.02.02	1.02.02.02 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Pasien RS (Pasien)	14689	0 Pasien	0,00	0 Pasien	0,00	6428 Pasien	71,738,000.00	7071 Pasien	2,888,372,908.39	7778 Pasien	3,227,498,717.28	35966 Pasien	6,187,609,625.67				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Persentase Angka Kematian di RS	1 02 1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah memperoleh pendidikan	100%	0%	0%	0%	100%	0%	89,700,000.00	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	689,700,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.03.02	1.02.03.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan		0	0,00	0	0,00	0	0	89,700,000.00	0	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0	689,700,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.03.02	1.02.03.02 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	3	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	10 Orang	89,700,000.00	30 Orang	300,000,000.00	30 Orang	300,000,000.00	73 Orang	689,700,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Persentase Angka Kematian di RS	1 02 1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Cakupan Pasien Yang Tertangani Sesuai	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0,00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	400,000,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.05.02	1.02.05.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi RIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah		0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	200,000,000.00	0	200,000,000.00	0	400,000,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
			1 0 2 1	1.02.05.02	1.02.05.02 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	200,000,000.00	2 Jenis	200,000,000.00	7 Jenis	400,000,000.00				Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi	
					Grandtotal		0,00		0,00		42,410,160,472.00		40,976,578,083.22		42,452,635,219.66		125,839,372,774.88							

MATRIKS RENCANA STRATEGIS UPT TRANSFUSI DARAH

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								OPD PENANGGUNG JAWAB
												TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
												13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	X	XX	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	% Pemenuhan Administrasi perkantoran, % Pemenuhan sarana dan Praarana perkantoran, % keterpenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan Kinerja Tepat Waktu, % ASN Berkinerj sangat baik	95%	100	1,342,000,000	100	2,053,000,000	100	1,806,000,000	100	1,806,000,000	UPT TRANSFUSI DARAH
			x	xx	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	88,000,000	100%	330,000,000	100%	335,000,000	100%	335,000,000	
			x	xx	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Didakan	0	25	20,000,000	40	30,000,000	40	35,000,000	40	35,000,000	
			x	xx	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang dilaksanakan	10	24	68,000,000	24	300,000,000	24	300,000,000	24	300,000,000	
			x	xx	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	609,000,000	100%	638,000,000	100%	649,000,000	100%	649,000,000	
			x	xx	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	20	20	20,000,000	20	20,000,000	22	20,000,000	22	20,000,000	
			x	xx	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	30	30	35,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	
			x	xx	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	30	30	115,000,000	30	120,000,000	30	120,000,000	30	120,000,000	
			x	xx	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	10	2,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	
			x	xx	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak Dan Penggandaan yang disediakan	20	20	110,000,000	20	110,000,000	20	120,000,000	20	120,000,000	
			x	xx	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis BahanMaterial yang disediakan	5	5	2,000,000	5	3,000,000	5	4,000,000	5	4,000,000	
			x	xx	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	% Kunjungan Tamu yang difasilitasi	100%	100	25,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	
			x	xx	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan dari yng direncanakan	100%	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	
			x	xx	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	
			x	xx	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah JenisPeralatan Dan Mesin Kantor yang diadakan	3	3	15,000,000	4	20,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	
			x	xx	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	300,000,000	100	380,000,000	100	380,000,000	100	380,000,000	
			x	xx	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan pembiayaan tagihan telepon, air dan listrik	100%	100	200,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	100	230,000,000	
			x	xx	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	100%	100	100,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	

			x	xx	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	100%	100%	330,000,000	100%	685,000,000	100%	417,000,000	100%	417,000,000
			x	xx	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak dan Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Pajak yang disediakan	1	1	60,000,000	1	150,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000
			x	xx	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dipelihara, Pajak Dan Perizinan yang disediakan	7	7	240,000,000	9	500,000,000	9	310,000,000	9	310,000,000
			x	xx	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Dan Mesin Kantor Yang dipelihara	4	4	30,000,000	4	35,000,000	4	37,000,000	4	37,000,000
Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1	02	02				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Stok Darah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Darah	77.58%	80%	12,647,853,865	85%	12,870,032,504	90%	15,111,748,861	90%	15,111,748,861
			1	02	02	1	01		Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, Prasarana, Alat & Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	7,712,853,865	100%	7,890,032,504	100%	9,726,748,861	100%	9,726,748,861
			1	02	02	1	01	02	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang dikembangkan/dibangun	1	1	600,000,000	1	600,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000
			1	02	02	1	01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan faskes	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000
			1	02	02	1	01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alkes yang diadakan	1	21	2,800,000,000	21	2,900,000,000	21	3,000,000,000	21	3,000,000,000
			1	02	02	1	01	11	Pengadaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis sarana Fasilitas Kesehatan yang diadakan	1	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000
			1	02	02	1	01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai yang diadakan	10	10	50,000,000	10	90,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000
			1	02	02	1	01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Jenis Peralatan Kesehatan/Alat Laboratorium yang diadakan dan dikalibrasi	0	6	100,000,000	6	100,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000
			1	02	02	1	01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis Sarana Fasilitas Kesehatan yang dipelihara	3	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000
			1	02	02	1	01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat, Vaksin Makanan Dan Minuman Serta Fasilitas kesehatan lainnya yang diadakan	35	35	3,897,853,865	35	3,935,032,504	35	5,361,748,861	35	5,361,748,861

									Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM & UKM Rujukan yang diselenggarakan	100%	100%	115,000,000	100%	150,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000
									Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Jenis Kegiatan Promosi Kesehatan yang dikelola	1	1	50,000,000	1	70,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000
									Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	5	10	65,000,000	15	80,000,000	24	150,000,000	24	150,000,000
									Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	100%	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000
									Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Jenis Media Informasi Kesehatan yang dikelola	0	1	20,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000
									Penerbitan Izin Rumah Sakit Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Provinsi	Persentase Pemenuhan penyediaan pelayanan yang memenuhi syarat operasional Unit Transfusi Darah	100%	100%	4,800,000,000	100%	4,800,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000
									Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase pemenuhan pelayanan operasional Unit Transfusi Darah	100%	100	4,800,000,000	100	4,800,000,000	100	5,000,000,000	100	5,000,000,000
Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1	02	03				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	% Pemenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	80%	90%	120,000,000	95%	130,000,000	95%	140,000,000	95%	140,000,000
									Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan teknis	100%	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%	140,000,000	100%	140,000,000
									Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti kegiatan pengembangan SDM	5	10	120,000,000	10	130,000,000	10	140,000,000	10	140,000,000
												14,109,853,865.00		15,053,032,504.00		17,057,748,861.00		17,057,748,861.00	

TABEL TC.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah
Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

(Draft Rancangan akhir 2018-2023)

Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan	Sasaran	KODE Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah											
			1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rata-rata Kinerja Program RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah											
					Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah					85%			88%		90%	
					Persentase ASN perangkat daerah berkinerja baik dan sangat baik					80%	32.620.658.858.00		83%	41.374.967.819.80	85%	41.424.967.819.80
					Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP					-21%			-27%		-38%	
			1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu					100%	18.824.775.246.00		100%	24.472.207.819.80	100%	24.672.207.819.80
			1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan setiap bulan					1960 OrangBulan	18.824.775.246.00		2100 OrangBulan	24.472.207.819.80	2100 OrangBulan	24.672.207.819.80
			1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN					-			100%	150.000.000.00		
			1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaiannya					-			150 Orang	150.000.000.00		
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor								100%	200.000.000.00	100%	200.000.000.00
			1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan								25 kali	200.000.000.00	25 Kali	200.000.000.00
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang					100%	798.123.612.00		100%	3.000.000.000.00	100%	3.000.000.000.00
			1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air dan Listrik yang dibayarkan tepat waktu					12 Bulan	456.209.004.00		12 Bulan	500.000.000.00	12 Bulan	500.000.000.00
			1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan gajinya					108 OrangBulan	341.914.608.00		1200 OrangBulan	2.500.000.000.00	1200 OrangBulan	2.500.000.000.00
			1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik					100%	152.760.000.00		100%	552.760.000.00	100%	552.760.000.00
			1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Baye Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara					1 unit			1 unit		1 unit	
					Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara					4 unit	152.760.000.00		4 unit	152.760.000.00	4 unit	152.760.000.00

Misi RPJMD 2016-2023	Tujuan	Sasaran	KODE Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
					Jumlah Genset yang dipelihara					1 unit		1 unit		1 unit		
			1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunannya yang dipelihara dan direhabilitasi							1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	
			1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara dan direhabilitasi							1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	
			1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD					28%	12,845,000,000.00	1%	13,000,000,000.00	0%	13,000,000,000.00	
			1.02.01.1.10.01	Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD					12,845,000,000.00	12,845,000,000.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	
Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasien				Indeks Kepuasan Pasien UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah											
		Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit			1. Tingkat pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)					67%		69%		70%		
					2. Rata-rata lamanya pasien dirawat					3 hari		3 hari		3 hari		
					3. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)					1 hari		1 hari		1 hari		
					4. Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)					50 kali		60 kali		65 kali		
					5. Angka kematian kasar (GDR)					15 %		15 %		15 %		
					6. Angka kematian setelah dirawat (NDR)					10 %		10 %		10 %		
			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik					100%	12,392,941,963.00	100%	3,515,157,672.43	100%	5,129,755,349.90	
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang diadakan					100%	12,392,941,963.00	100%	3,415,157,672.43	100%	5,029,755,349.90	
			1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Sarana yang direhabilitasi / diadakan					3 Paket	2,000,000,000.00		-		-	
			1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang diadakan					109 Unit	9,283,819,575.00	2 Unit	2,315,157,672.43	10 Unit	3,929,755,349.90	
			1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan					1 Unit	50,000,000.00	10 Unit	100,000,000.00	10 Unit	100,000,000.00	
			1.02.02.1.01.12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan					2 Unit	398,000,000.00	5 Unit	200,000,000.00	5 Unit	200,000,000.00	
			1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dipelihara					38 Jenis	100,000,000.00	50 Jenis	100,000,000.00	50 Jenis	100,000,000.00	
			1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara					9 Jenis	150,000,000.00	10 Jenis	200,000,000.00	10 Jenis	200,000,000.00	
			1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara					4 Paket	411,122,388.00	4 Paket	500,000,000.00	4 Paket	500,000,000.00	

Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan	Sasaran	KODE Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	% Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan							100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	
			1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Survey Akreditasi RS yang dilaksanakan							1 Dok	100,000,000.00	1 Dok	100,000,000.00	
			1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan					100%	156,594,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00	
			1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	% Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM					100%	156,594,000.00	100%	400,000,000.00	100%	400,000,000.00	
			1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai baik laki-laki dan perempuan yang mengikuti Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDM					16 orang	156,594,000.00	30 Orang	200,000,000.00	30 Orang	200,000,000.00	
			1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan baik laki-laki dan perempuan							50 Orang	200,000,000.00	50 Orang	200,000,000.00	
TOTAL											45,176,194,821.00		45,290,125,492.23		46,954,723,169.70	

Kondisi Kinerja pada akhir periode RESNTRA Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab
Target	Rp	
(18)	(19)	(20)
87.60%	115,420,594,497.60	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
82.60%		
-28.60%		
100%	67,969,190,885.60	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
6160 OrangBulan	67,969,190,885.60	
100%	150,000,000.00	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
150 Orang	150,000,000.00	
100%	400,000,000.00	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
50 Kali	400,000,000.00	
100%	6,796,123,612.00	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
36 Bulan	1,456,209,004.00	
2506 OrangBulan	5,341,914,608.00	
100%	1,258,280,000.00	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
3 Unit		
12 Unit	458,280,000.00	

Kondisi Kinerja pada akhir periode RESNTRA Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab
3 Unit		
2 Paket	400,000,000.00	
2 Paket	400,000,000.00	
9.6%	38,845,000,000.00	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
38,845,000,000.00	38,845,000,000.00	
69%		
9 Hari		
3 Hari		
175 Kali		
15%		
10%		
100%	21,037,854,985.33	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
100%	20,837,854,985.33	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
3 Paket	2,000,000,000.00	
121 Unit	15,528,732,597.33	
21 Unit	250,000,000.00	
12 Unit	798,000,000.00	
138 Jenis	300,000,000.00	
29 Jenis	550,000,000.00	
12 Paket	1,411,122,388.00	

Kondisi Kinerja pada akhir periode RESNTRA Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab
100%	200,000,000.00	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
2 Dok	200,000,000.00	
100%	956,594,000.00	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
100%	956,594,000.00	UPT RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulsel
76 Orang	556,594,000.00	
100 Orang	400,000,000.00	
	21,994,448,985.33	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN (PERMENDAGRI 90/2019)	INDIKATOR KINERJA TAHUNAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							100%	391,477,540.00	100%	430,625,294.00	100%	473,687,823.00	100%	521,056,606.00
2			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						100%	470,786,720.00	100%	517,865,392.00	100%	569,651,931.00	100%	626,617,124.00		
			1.02.02.1.01	Kegiatan 1: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersediannya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100%	13,174,220.00	100%	14,491,642.00	100%	15,940,806.00	100%	17,534,887.00		
			1.02.02.1.01.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersediannya Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					100%	13,174,220.00	100%	14,491,642.00	100%	15,940,806.00	100%	17,534,887.00		
			1.02.02.1.04	Kegiatan 2: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					100%	457,612,500.00	100%	503,373,750.00	100%	553,711,125.00	100%	609,082,237.00		
			1.02.02.1.04.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					100%	457,612,500.00	100%	503,373,750.00	100%	553,711,125.00	100%	609,082,237.00		
3			1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						100%	535,373,456.00		588,910,801.00		647,801,882.00		712,582,070.00		
			1.02.03.1.01	Kegiatan 1: Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					100%	170,957,304.00	100%	188,053,034.00	100%	206,858,338.00	100%	227,544,172.00		
			1.02.03.1.01.01	Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan					100%	170,957,304.00	100%	188,053,034.00	100%	206,858,338.00	100%	227,544,172.00		
			1.02.03.1.02	Kegiatan 2: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					100%	364,416,152.00	100%	400,857,767.00	100%	440,943,544.00	100%	485,037,898.00		
			1.02.03.1.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan					100%	364,416,152.00	100%	400,857,767.00	100%	440,943,544.00	100%	485,037,898.00		
TOTAL											100%	3,372,365,396.00	100%	3,709,601,936.00	100%	4,080,562,126.00	100%	4,488,618,341.00	

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
(18)	(19)

UNT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
(18)	(19)
UPT PELATHAN KESEHATAN	PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
(18)	(19)
UPT PELATHAN KESEHATAN	PROVINSI SULAWESI SELATAN
UPT PELATHAN KESEHATAN	PROVINSI SULAWESI SELATAN